

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PENGANTAR.....1

1.2 PENGERTIAN 1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 2

1.4 LANDASAN.....2

1.5 SISTEMATIKA 3

1.6 KERANGKA PIKIR 3

1.7 PROSES PENYUSUNAN.....4

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI PADA SAAT INI.....2

2.1.1 Pendidikan.....3

2.1.2 Kesehatan 5

2.1.3 Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial 8

2.1.4 Keagamaan 10

2.1.5 Pemuda dan Olah Raga 10

2.1.6 Kebudayaan 11

2.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11

2.1.8 Ekonomi 12

2.1.8.1 Sektor Pertanian.....13

2.1.8.2 Pertambangan dan Penggalian 13

2.1.8.3 Industri Pengolahan.....14

2.1.8.4 Listrik, Gas dan Air Bersih 15

2.1.8.5 Bangunan / Kontruksi 15

2.1.8.6 Perdagangan, Hotel dan Restoran.....15

2.1.8.7 Pengangkutan dan Komunikasi 16

2.1.8.8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....16

2.1.8.9 Jasa – Jasa 17

2.1.9 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).....17

2.1.10 Sarana dan Prasarana 18

2.1.11 Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 20

2.1.12 Politik.....22

2.1.12.1 Kehidupan Berpolitik 22

2.1.12.2 Partisipasi Politik.....23

2.1.13 Hukum dan HAM 24

2.1.14 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....24

2.1.14.1 Stabilitas keamanan dan ketertiban.....24

2.1.14.2 Antisipatif dan Preventif 26

2.1.14.3 Peran Aparat dan Partisipasi Masyarakat 26

2.1.15 Aparatur 27

2.1.16	Keuangan Daerah.....	30
2.2	TANTANGAN	30
2.2.1	Pendidikan.....	30
2.2.2	Kesehatan.....	31
2.2.3	Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial	35
2.2.4	Keagamaan.....	37
2.2.5	Pemuda dan Olah Raga	37
2.2.6	Kebudayaan.....	37
2.2.7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
2.2.8	Ekonomi	38
2.2.8.1	Sektor Pertanian.....	39
2.2.8.2	Pertambangan dan Penggalian	40
2.2.8.3	Industri Pengolahan.....	41
2.2.8.4	Listrik, Gas dan Air Bersih	41
2.2.8.5	Bangunan / Konstruksi	42
2.2.8.6	Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	42
2.2.8.7	Pengangkutan dan Komunikasi	43
2.2.8.8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	43
2.2.8.9	Jasa – Jasa	44
2.2.9	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	47
2.2.10	Sarana dan Prasarana	47
2.2.11	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	50
2.2.12	Politik	51
2.2.12.1	Kehidupan Berpolitik	51
2.2.12.2	Partisipasi Politik.....	52
2.2.13	Hukum dan HAM	52
2.2.14	Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	54
2.2.14.1	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	54
2.2.14.2	Antisipatif dan preventif	54
2.2.14.3	Peran Aparat dan Partisipasi Masyarakat	55
2.2.15	Aparatur	56
2.2.16	Keuangan Daerah.....	57
2.3	MODAL DASAR.....	57

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	1
3.1.1	Pendidikan	1
3.1.2	Kesehatan.....	1
3.1.3	Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial	2
3.1.4	Keagamaan.....	3
3.1.5	Pemuda dan Olah Raga	3
3.1.6	Kebudayaan	3
3.1.7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
3.1.8	Ekonomi	4
3.1.8.1	Pertanian	5
3.1.8.2	Industri Pengolahan.....	5
3.1.8.3	Pertambangan dan Penggalian	6
3.1.8.4	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	6
3.1.8.5	Listrik, Gas dan Air Bersih	6

3.1.8.6	Bangunan / Konstruksi.....	6
3.1.8.7	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6
3.1.8.8	Pengangkutan dan Komunikasi.....	6
3.1.8.9	Jasa - Jasa	7
3.1.9	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	7
3.1.10	Sarana dan Prasarana.....	7
3.1.11	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	12
3.1.12	Politik	15
3.1.13	Hukum dan HAM	16
3.1.14	Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	16
3.1.15	Aparatur	17
3.1.16	Keuangan Daerah.....	17
3.2	ISU STRATEGIS.....	17

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1	VISI.....	1
4.2	MISI	3
Misi Satu :	Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul.....	3
Misi Dua :	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	3
Misi Tiga :	Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis potensi dan peluang daerah	4
Misi Empat :	Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan ..	4
Misi Lima :	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan	5

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah	5
Misi Satu : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul.....	5
Misi Dua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.....	6
Misi Tiga : Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis potensi dan peluang daerah	6
Misi Empat : Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan ..	7
Misi Lima : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan	7

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1 SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBAGUNAN JANGKA	
PANJANG DAERAH.....	1
a.	Misi Satu : Terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, berbudaya, menguasai ilmu dan teknologi, produktif dan unggul
	1. Sasaran Pokok Misi Satu 1
	2. Arah Kebijakan Misi Satu 3
b.	Misi Dua : Terwujudnya tata pemerintahan yang baik
	1. Sasaran Pokok Misi Dua 7

2. Arah Kebijakan Misi Dua	8
c. Misi Tiga : Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis potensi dan peluang daerah	
1. Sasaran Pokok Misi Tiga	11
2. Arah Kebijakan Misi Tiga	13
d. Misi Empat : Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan	
1. Sasaran Pokok Misi Empat	15
2. Arah Kebijakan Misi Empat	15
e. Misi Lima, Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan	
1. Sasaran Pokok Misi Lima	16
2. Arah Kebijakan Misi Lima	16
5.2 TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	18
5.2.1 RPJM Daerah Pertama (2005 – 2007).....	19
5.2.2 RPJM Daerah Kedua (2007 – 2012).....	29
5.2.3 RPJM Daerah Ketiga (2012 – 2017).....	40
5.2.4 RPJM Daerah Keempat (2017 – 2022).....	51
5.2.5 RPJM Daerah Kelima (2022 – 2025)	60
 BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN.....	1
 BAB VII PENUTUP	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGANTAR

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2015, selanjutnya menjadi pedoman dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan, daerahnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selain itu Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kota Cimahi.

RPJPD Kota Cimahi merupakan serangkaian langkah-langkah upaya mencapai tujuan jangka panjang pembangunan kota sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Jawa Barat maupun Sistem Pembangunan Nasional. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang pada pasal 5 (lima) diatur tentang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah akan menjadi acuan untuk mengawal pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita otonomi daerah Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi, yaitu (1) mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan daya saing kota; (3) meningkatkan prinsip demokratisasi, pemerataan, dan keadilan.

1.2 PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Cimahi yang tercantum dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi dalam

bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Kota Cimahi untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Cimahi 2005-2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah bagi seluruh komponen otonomi daerah Kota Cimahi (pemerintah kota, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Cimahi yang disepakati bersama sesuai dengan karakter kota dan ciri-ciri keunggulan kota yang menjadi harapan di masa depan untuk turut ambil bagian dalam pencapaian Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada tahun 2025.

1.4 LANDASAN

Landasan idiil RPJP Kota Cimahi adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 32 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005–2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III Analisis Isu-Isu Strategis.

Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2005–2025.

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025.

Bab VI Kaidah Pelaksanaan.

Bab VII Penutup.

1.6 KERANGKA PIKIR

Kecenderungan pembangunan global menunjukkan bahwa seiring dengan perjalanan waktu, jumlah penduduk terus meningkat dan diperkirakan akan

mencapai puncaknya pada tahun 2030. Bagi Indonesia, periode 2015 - 2025 merupakan sebuah periode emas, yang berarti pada masa itu proporsi penduduk usia produktif mencapai jumlah tertinggi sepanjang sejarah dalam perjalanan sebuah bangsa. Hal tersebut merupakan peluang yang berharga bagi Kota Cimahi sebagai bagian dari Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia, dan jumlah penduduk produktif sebagian besar akan berada di Jawa Barat.

Bersama dengan laju pembangunan yang semakin meningkat, berbagai fenomena juga semakin terasa antara lain dampak tekanan penduduk pada kerusakan lingkungan, peningkatan kebutuhan pangan dan permintaan produk barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, serta peningkatan kebutuhan energi guna mendukung proses industrialisasi maupun konsumsi domestik. Pada sisi lainnya ketersediaan sumber daya alam yang terbatas untuk mendukung kebutuhan yang ada, terlebih lagi bagi Kota Cimahi yang hampir tidak memiliki sumber daya alam pada masa mendatang menuntut pandai mereposisi fungsi kotanya untuk dapat bersaing secara regional dan nasional.

Mencermati perkembangan tersebut berbagai langkah perlu ditempuh untuk menjamin terlaksananya pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka pemikiran dalam penyusunan RPJP Daerah Kota Cimahi didasarkan pada kecenderungan tersebut untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.7 PROSES PENYUSUNAN

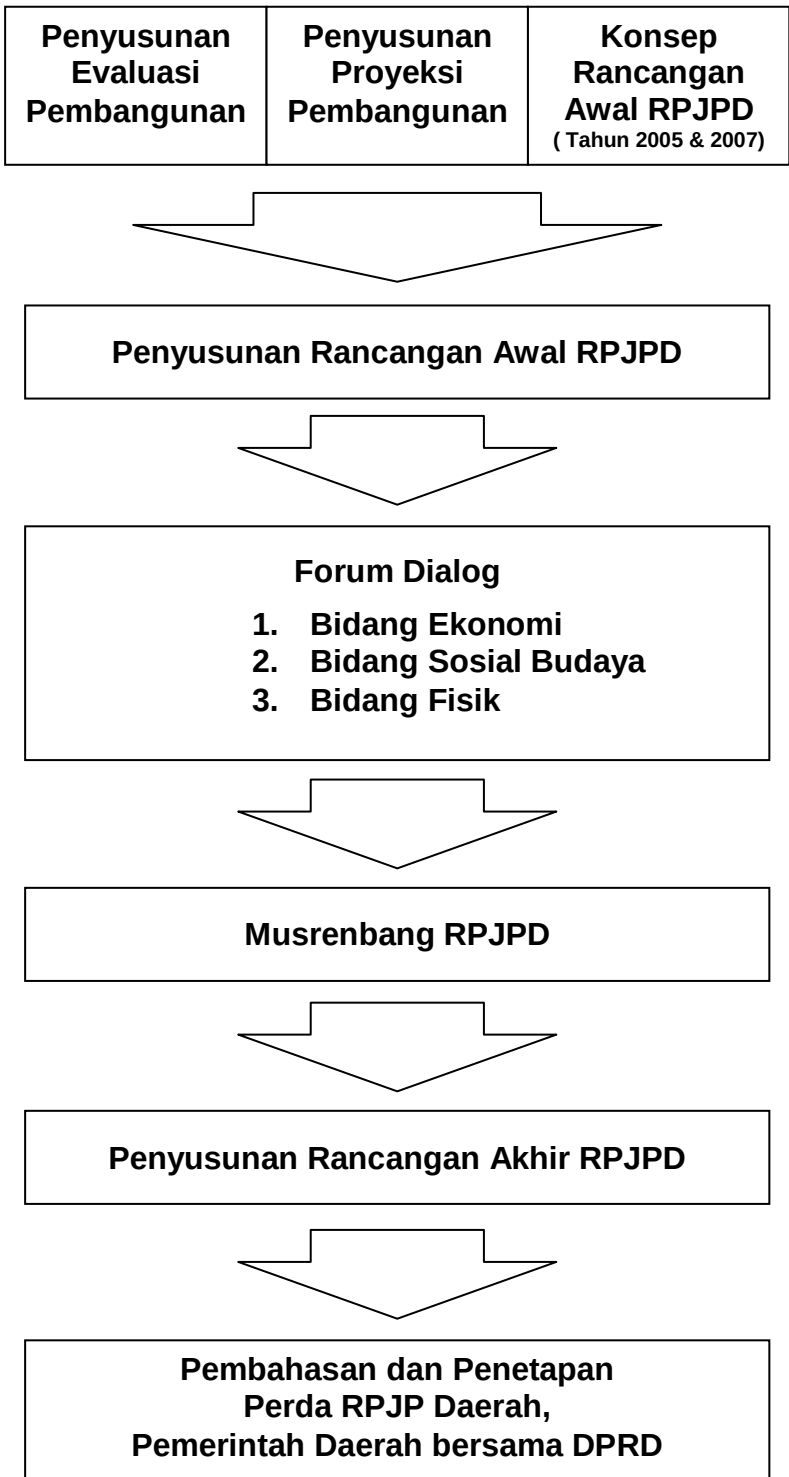
RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 disusun dengan pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif dari masyarakat bawah-atas (bottom up) dan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi atas-bawah (top down) dengan melalui proses analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.

Penyiapan rancangan awal RPJPD Kota Cimahi telah dilaksanakan pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2007 dilaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Rancangan RPJPD, namun dokumen tersebut pada saat itu belum dapat diselesaikan mengingat RPJPD Propinsi Jawa Barat sebagai dokumen acuan belum disusun. Pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Kota Cimahi kembali menyusun dokumen RPJPD, pada perjalanannya kegiatan tersebut diundur ke tahun 2009 untuk menunggu penetapan Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat. Akhirnya kegiatan Penyusunan RPJPD Kota Cimahi tahun 2005 – 2025 dapat dilaksanakan finalisasinya pada Tahun Anggaran 2010.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung penyelesaian penyusunan RPJPD Kota Cimahi, maka Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk menampung aspirasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Cimahi, dan untuk menyesuaikan rancangan awal RPJPD yang telah disusun disesuaikan dengan kondisi yang berkembang, termasuk adanya perubahan partial RPJMD Jawa Barat pada 2010.

Tahapan penyusunan RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 dapat dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi merupakan formulasi cita-cita masyarakat kota yang berkeinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan hidupan kota yang lebih baik di masa depan bagi kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih baik pula sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, mandiri, aman, damai serta lebih demokratis dan adil.

Lebih dari sewindu kota Cimahi sebagai bagian dari bangsa Indonesia lahir menjadi kota otonom dari jalur perjalanan baru yakni jalur demokrasi, yang berdampak pada aspirasi maraknya pemekaran daerah-daerah. Sebagai kota otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi mewarisi kondisi kota yang padat, zona industri pengolahan, kawasan militer, dan sarana perdagangan yang semraut. Setelah melalui konsolidasi segenap komponen masyarakat, kota Cimahi mampu melewati tantangan dan hambatan dalam pengelolaan kehidupan sebuah kota. Sudah setengah windu Cimahi mampu membangun dirinya menjadi lebih baik, sehingga wibawa dan kehormatan sebuah kota diakui dan dihormati di tingkat nasional, bahkan beberapa di tingkat internasional.

Sebagai kota dengan tulang punggung ekonomi formal didominasi industri pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mencapai 62%, pendapatan per kapita Kota Cimahi kurang menunjukkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pendapatan per kapita yang di atas angka rata-rata pendapatan per kapita Jawa Barat tidak diikuti oleh indeks daya beli masyarakatnya yang masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Padahal indeks Pendidikan Kota Cimahi termasuk tertinggi bersama Depok dan Kota Bandung, demikian juga indeks Kesehatan yang jauh di atas rata-rata Jawa Barat, sehingga angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi masih di atas angka IPM Jawa Barat.

Masyarakat kota Cimahi bertekad teguh, menyusun langkah-langkah secara strategis untuk menyongsong masa medatang periode 2005-2025 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Beberapa isu terkait dengan ketertinggalan dalam meningkatkan indeks daya beli mengarah pada bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis ekonomi formal yang ada serta

didukung oleh pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan berbasis pada daya saing ketenagakerjaan, pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan KUKM kota Cimahi. Dengan terungkitnya kesejahteraan warga Kota Cimahi di masa depan akan membangkitkan pelayanan publik yang lebih handal dalam melayani kehidupan sosial kemasyarakatan warganya.

Pembangunan Kota Cimahi yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi ke-enam belas urusan yang menjadi garapan utama, antara lain meliputi: (i)Pendidikan; (ii)Kesehatan; (iii)Kependudukan, Ketenagakerjaan dan sosial; (iv)Keagamaan; (v)Pemuda dan Olah raga; (vi)Kebudayaan; (vii)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; (viii)Ekonomi; (ix)Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); (x)Sarana dan Prasarana; (xi)Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (xii)Politik; (xiii)Hukum dan HAM; (xiv)Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; (xv)Aparatur; dan (xvi)Keuangan Daerah.

Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya-upaya strategis mengatasinya dalam pembangunan Kota Cimahi 20 tahun ke depan.

2.1 KONDISI PADA SAAT INI

Dalam 20 tahun mendatang, Kota Cimahi dan masyarakatnya, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, akan menghadapi persaingan regional dan pengaruh persaingan global yang makin meningkat. Kota Cimahi juga akan menghadapi dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan perlu dirangkaikan menjadi suatu konsep perencanaan pembangunan jangka panjang, mencakup berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan yang akan menuntun menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai.

Sejak terbentuknya Kota Cimahi tahun 2001, sebagai bagian Provinsi Jawa Barat, daerah ini berhadapan dengan dinamika perkembangan yang harus dilaluinya. Antara lain sebagai daerah otonom baru harus menunjukkan kinerja dan perkembangan suatu daerah baru yang signifikan di berbagai sektor pembangunan. Dalam konteks Bandung Metropolitan Area (BMA), Kota Cimahi merupakan salah satu Wilayah Pengembangan (WP) bersama-sama dengan Kota Bandung ditetapkan sebagai Pusat (*core*) PKN Metropolitan Bandung dengan

fungsi pengembangan permukiman dan industri, yang sekaligus diidentifikasi sebagai kawasan perkotaan yang tumbuh pesat. Konsekuensi logis dari penetapan fungsi Kota Cimahi sebagai pengembangan permukiman dan industri, kemudian diiringi oleh perkembangan fungsi-fungsi lain seperti jasa dan perdagangan, telah menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, terutama karena faktor migrasi. Kota Cimahi menjadi *magnet* bagi para pendatang dari berbagai daerah untuk beraktifitas di Kota Cimahi, terutama dalam sektor industri, perdagangan dan jasa. Karakteristik Kota Cimahi dengan fungsinya sebagai kawasan perkotaan (*urban area*) yang memiliki angka laju pertumbuhan penduduk tinggi (sebesar 2,63% per tahun, BPS Tahun 2005), telah berimbas kepada semakin intensifnya pemanfaatan lahan, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tingginya perkembangan penduduk dan intensitas pemanfaatan lahan yang melebihi kapasitas atau daya dukung lahan, telah mengakibatkan munculnya kawasan-kawasan pemukiman kumuh dengan tingkat kemampuan sosial ekonomi masyarakatnya yang relatif rendah. Hal tersebut merupakan pemicu timbulnya berbagai masalah yang dihadapi oleh Kota Cimahi, seperti masalah ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, maupun ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan.

Sejak digulirkannya kebijakan desentralisasi dan demokratisasi serta Otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, memberikan kesempatan yang luar biasa kepada daerah untuk mengembangkan daerah dan masyarakatnya dalam rangka memberikan kehidupan yang lebih layak. Pembangunan daerah bergerak lebih dinamis, sekalipun Pemerintah Daerah dan masyarakatnya masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan yang harus diatasi.

2.1.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kota Cimahi dititikberatkan kepada peningkatan mutu, perluasan kesempatan belajar terutama pada jenjang pendidikan dasar. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam bidang yang diajarkannya, disamping itu kurang terwujudnya pemerataan pendidikan di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan urusan pendidikan diarahkan pada terwujudnya pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berdaya saing serta berakhlak mulia.

Hasil evaluasi terhadap pembangunan pendidikan, Indeks Pendidikan (IP) Kota Cimahi pada tahun 2005, yang terdiri atas indeks Angka Melek Huruf (AMH)

dan indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 87,96, sedangkan pada tahun 2009 Indeks Pendidikan Kota Cimahi diperkirakan sama dengan capaian tahun 2008 yaitu sebesar 89,22% dan merupakan angka capaian yang tinggi mengingat Indeks Pendidikan Propinsi Jawa Barat sendiri pada tahun yang sama hanya mencapai 81,64 dan bahkan pada tahun 2010 hanya ditargetkan mencapai 85,9.

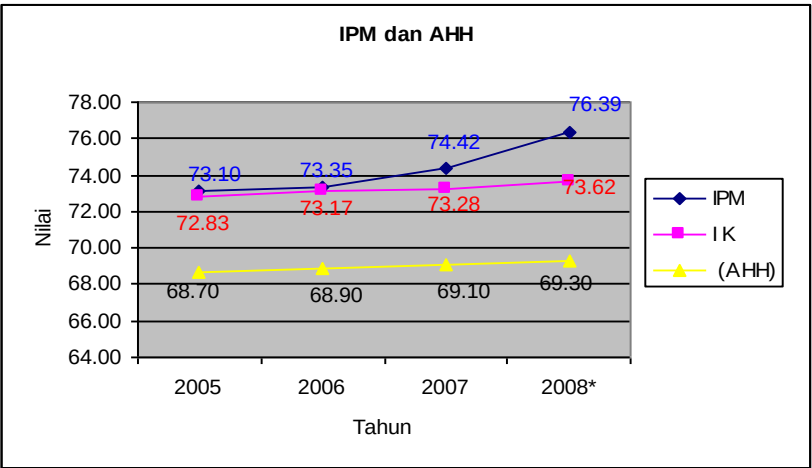
Sampai dengan tahun 2009 Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Kota Cimahi selama periode Tahun 2005-2009 mengalami peningkatan yang cukup baik, pada Tahun 2005 menunjukkan angka 99,60% dan Tahun 2009 sebesar 99,85%. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Cimahi selama periode Tahun 2005-2009 mengalami peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2005 menunjukkan RLS sebesar 9,70 tahun dan tahun 2009 sebesar 10,64 tahun. Jika dikaitkan dengan Target pendidikan pada Tahun 2005 Kota Cimahi telah mencapai wajar dikdas 9 Tahun dan mulai Tahun 2006 Kota Cimahi mencanangkan rintisan pendidikan wajib belajar 12 Tahun. Berhasilnya pencapaian RLS tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan atau Angka Partisipasi murni (APM) dan Angka Partisipasi kasar (APK) merupakan komponen yang dijadikan indikator makro Kota Cimahi dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan. Data pencapaian APM pada Tahun 2005 dapat digambarkan sebagai berikut : pencapaian APM tingkat SD/ sederajat sebesar 86,81%. APM tingkat SMP/ sederajat sebesar 51,05%, dan APM tingkat SMU/ sederajat adalah sebesar 45,53%. Sedangkan untuk Pencapaian Angka partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan penduduk seluruh umur yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap kelompok umur tertentu pada tingkat pendidikan tertentu. Data indikator pencapaian APK diseluruh jenjang sekolah yang ada di Kota Cimahi pada Tahun 2005, yaitu : pencapaian APK tingkat SD/ sederajat pada Tahun 2005 sebesar 99,82%. APK tingkat SMP/ sederajat pada Tahun 2005 sebesar 70,51%. APK tingkat SMU/ sederajat pada Tahun 2005 sebesar 65,76%. Sedangkan data pencapaian APM pada Tahun 2009 dapat digambarkan sebagai berikut : pencapaian APM tingkat SD/ sederajat sebesar 89,04%. APM tingkat SMP/ sederajat sebesar 76,97%, dan APM tingkat SMU/ sederajat adalah sebesar 79,63%. Sedangkan untuk Pencapaian Angka partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan penduduk seluruh umur yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap kelompok umur tertentu pada tingkat pendidikan tertentu. Data indikator pencapaian APK diseluruh jenjang sekolah yang ada di Kota Cimahi pada Tahun 2009, yaitu : pencapaian APK tingkat SD/ sederajat pada Tahun 2009

sebesar 118,25%. APK tingkat SMP/ sederajat pada Tahun 2005 sebesar 86,34%. APK tingkat SMU/ sederajat pada Tahun 2009 sebesar 80,63%.

2.1.2 Kesehatan

Kondisi kesehatan di Kota Cimahi dapat direpresentasikan melalui Indeks Kesehatan, dimana angka tersebut mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu, yang diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan data BPS tahun 2008 mencapai 69,30 sedangkan pada tahun 2005 mencapai 68,70. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin atau setara 0,1%. Dilihat dari grafik dibawah ini maka setiap tahun AHH dan indeks kesehatan Kota Cimahi memiliki kecenderungan selalu meningkat sejalan dengan peningkatan nilai IPM.

Gambar 2.1
Perkembangan IPM dan AHH Kota Cimahi 2005-2009



Sumber: BPS berbagai tahun diolah

Nilai AHH tersebut dipengaruhi oleh kondisi Kesehatan Ibu dan anak khususnya oleh jumlah kematian Ibu dan anak yang direpresentasikan melalui AKI dan AKB, dimana pada tahun 2005 AKI mencapai 57,12 /100000 KH, sedangkan tahun 2009 meningkat 149,06/100000KH. Sedangkan AKB pada tahun 2005 5,14/1000KH dan di tahun 2009 mencapai 7,45.

Tabel 2.1
Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Kota Cimahi Tahun 2005 s.d 2008

TAHUN	A K B		A K I	
	Σ kematian	Konversi (/ 1000KH)	Σ kematian	Konversi (/ 100.000KH)
2005	45/8753 KH	5,14	5/8753 KH	57,12
2006	56/9566 KH	5,85	10/9566 KH	104,54
2007	60/9729 KH	6,17	10/9729 KH	102,79
2008	82/ 11375 KH	7,20	9/11375 KH	79,12
2009	80/10734 KH	7,45	16/10734 KH	149,06

Sumber : Dinkes Kota Cimahi 2010

Sementara itu perkembangan dalam 5 tahun terakhir status kondisi gizi masyarakat Kota Cimahi, khususnya status gizi balita umumnya cukup baik dimana untuk balita gizi baik selalu di atas 85% dan di tahun 2009 mencapai 86,01%, sementara pada tahun 2005 hanya 85,96%. Walaupun kondisi gizi balita sudah cukup baik tapi masih terdapat sebagian kecil balita gizi kurang dan balita gizi buruk yang harus ditangani, yaitu pada tahun 2009 balita gizi buruk mencapai 0,8% sementara balita gizi kurang mencapai 10,01%.

Tabel 2.2
Status Gizi Balita di Kota Cimahi Tahun 2004-2009

STATUS GIZI	TAHUN				
	2005	2006	2007	2008	2009
Gizi lebih	2.42	2.31	2.29	2.32	3.18
Gizi baik	85.96	86.14	87.98	88.31	86.01
Gizi kurang	11.52	10.64	9.24	8.81	10.01
Gizi buruk	0.11	0.90	0.50	0.56	0.80

Sumber : Dinkes Kota Cimahi tahun 2010

Kota Cimahi merupakan kota dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi. pada tahun 2005 jumlah penduduk telah mencapai 509.189 jiwa dan pada tahun 2009 mencapai 599.095 jiwa, serta dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,15%. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi mempengaruhi terhadap daya dukung dan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berakibat pada derajat kesehatan masyarakat. Kota Cimahi dengan Jumlah penduduk mencapai 597.317 jiwa dan luas wilayah hanya 4.036,45 menyebabkan tingkat kepadatan tinggi dimana pada beberapa lokasi kepadatan tersebut sangat tinggi dan cenderung menjadi kumuh dengan kondisi kesehatan lingkungan yang kurang

baik. Kondisi ini terlihat dari perilaku dan kebiasaan mereka, misalnya dari pola masyarakat yang memiliki jamban sampai tahun 2009 baru sekitar 81.559 KK, sementara yang telah menggunakan septic tank hanya sekitar 2.655 KK , dari total KK sekitar 166.345 KK. Selain itu jumlah penduduk yang mempergunakan air bersih masih relatif rendah, cakupan penduduk yang menggunakan air bersih pada tahun 2006 adalah 68.141 KK, sementara sisinya menggunakan sumber air yang tidak memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi 90.075 KK, walaupun telah mengalami kenaikan akan tetapi perlu ditingkatkan mengingat jumlah KK di tahun 2009 juga meningkat. Penduduk yang menggunakan air minum dari sumur terlindung sebesar 25,45%, pompa 16,40% , air ledeng 22,1%, dan dari sumber lainnya sebesar 36,05%.

Kota yang padat dengan pengawasan kesehatan yang tidak mudah membawa Cimahi juga merupakan daerah endemis DBD hal ini terlihat dari jumlah kasus DBD yang cukup tinggi, bahkan pada tahun 2007 berstatus KLB. Perkembangan Jumlah kasus demam berdarah di Kota Cimahi dari tahun 2005 sampai dengan 2009 diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kasus DBD Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah Kasus
2005	1270
2006	1322
2007	2376
2008	1250
2009	1906

Sumber : Dinkes Kota Cimahi tahun 2010

Bila dilihat dari Sarana kesehatan yang ada di Kota Cimahi, maka terdapat beragam sarana kesehatan yang dapat melayani masyarakat mulai dari layanan yang paling lengkap yang ada di Rumah Sakit baik Rumah Sakit milik pemerintah yaitu RSUD Cibabat, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit TNI AD. Fasilitas lainnya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Dokter Praktek, Apotik, dan lain-lain, data lengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Sarana Kesehatan di Kota Cimahi

NO	SARANA KESEHATAN	2005	2009
1	Puskesmas	9	11
2	Pustu	5	4
4	RSUD	1	1
5	RS TNI	1	1
6	RS Swasta	2	2
7	Balai Pengobatan	55	57
8	Rumah Bersalin	5	5
9	Praktek Dokter Spesialis	66	109*
10	Praktek Dokter Umum	220	254*
11	Praktek Dokter Gigi	66	66*
12	Praktek Bidan	159	174*
13	Apotik	54	51*
14	Toko Obat	18	18*
15	Posyandu	372	382
16	Posbindu	138	155

Sumber : Dinas kesehatan kota Cimahi

(*) Data tahun 2008

Berdasarkan gambaran umum tersebut dalam upaya pembangunan bidang kesehatan Kota Cimahi terdapat beberapa tantangan dan permasalahan di bidang kesehatan yang harus diatasi.

2.1.3 Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial

Pada tahun 2009 jumlah penduduk di Kota Cimahi adalah sebesar 599.095 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 3,33 % dari tahun 2008 yang berjumlah 579.802 jiwa, sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Cimahi pada tahun 2005 yang berjumlah 500.710, maka pertumbuhan penduduk tiap tahunnya adalah sebesar 4,59%. Perkembangan jumlah penduduk Kota Cimahi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2005 - 2009

Kecamatan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Cimahi Selatan	218,120	218,820	225,246	254,851	264,286
Cimahi Tengah	156,240	161,760	157,173	174,638	180,308
Cimahi Utara	126,350	128,403	135,640	150,313	154,501
Kota Cimahi	500,710	508,983	518,059	579,802	599,095

Sumber : SUSEDA 2005-2006 & Database Kependudukan Kota Cimahi 2007-2009

Dalam bidang ketenagakerjaan hal yang paling menjadi sorotan adalah mengenai tingkat pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas regional. Dari data terakhir pada tahun 2009 persentase pengangguran di Kota Cimahi adalah sebesar 16,32 % dari total angkatan kerja. Angka ini menunjukkan sedikit kenaikan dibandingkan dengan angka pada tahun 2008 yang berkisar pada 16,12% dan 16,31% pada tahun 2007. Sedangkan jika dilihat pada tahun 2005 persentase jumlah pengangguran berada pada angka 6,58% dan pada tahun 2006 15,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang begitu besar di Kota Cimahi belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang sebagai akibat dari tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang menjadi pemicu timbulnya permasalahan sentral dalam ketenagakerjaan. Selain itu tingkat kompetensi angkatan kerja yang belum maksimal pun turut berperan dalam hal ini. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka penanggulangan pengangguran, antara lain melalui program pemberian pelatihan agar kualitas tenaga kerja semakin meningkat dan produktif dan juga penyebarluasan informasi lowongan kerja

Struktur penduduk di Kota Cimahi yang di dominasi oleh penduduk usia produktif menyebabkan besarnya jumlah angkatan kerja di Kota Cimahi. Pada tahun 2009, jumlah angkatan kerja di Kota Cimahi adalah sebesar 264.216 jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun 2008 yang berjumlah 257.256 jiwa dan 243.988 jiwa pada tahun 2007. Pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja adalah 132.754 jiwa dan pada tahun 2006 adalah 153.567 jiwa. Jumlah angkatan kerja dan pengangguran dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.6
Angkatan Kerja Kota Cimahi Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Bekerja	Tidak Bekerja	% Tidak Bekerja
2005	132,754	124,018	8,736	6.58
2006	153,567	129,090	24,477	15.94
2007	243,988	204,193	39,795	16.31
2008	257,256	215,793	41,463	16.12
2009	264,216	221,103	43,113	16.32

Sumber : SUSEDA 2005-2006 & Database kependudukan Kota Cimahi 2007-2009

Jika dilihat lebih luas lagi maka kondisi ketenagakerjaan di Kota Cimahi akan meliputi tiga aspek utama yaitu aspek penawaran, permintaan, dan hubungan ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja. Dari aspek penawaran, banyaknya pengangguran di Kota Cimahi merupakan permasalahan tersendiri bagi pengembangan kota. Tumbuhnya industry dan usaha-usaha lain di Kota Cimahi

akan mendukung dalam memberikan kesempatan bagi para pencari kerja yang telah siap. Dari sisi hubungan industrial hubungan antara pekerja dan pengusaha berada dalam koridor suasana yang cukup kondusif. Perselisihan hubungan industrial tetap diusahakan untuk diselesaikan dengan seringkali melibatkan pemerintah sebagai mediator dan fasilitator.

Berkaitan dengan permasalahan sosial di Kota Cimahi, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akan terus mengalami peningkatan sebagai eksis dari perkembangan Kota Cimahi yang memang dari sisi ukuran wilayah kota tidak terlalu besar. Isu PMKS ini tetap menjadi isu yang harus diperhatikan sebagai sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.1.4 Keagamaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pembangunan urusan keagamaan merupakan Urusan Pemerintah Pusat. Pembangunan urusan keagamaan di Kota Cimahi pada dasarnya adalah memfasilitasi peningkatan kualitas kerukunan sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kehidupan beragama dan aktifitas keagamaan. Selain itu untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Cimahi dilaksanakan melalui berbagai momentum antara lain peringatan hari besar keagamaan dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kota, komunikasi antar sesama alim ulama, tokoh agama dan pemerintah.

2.1.5 Pemuda dan Olah Raga

Pemuda merupakan salah satu sumber daya yang harus dikembangkan dan diberdayakan karena ditangan mereka pembangunan Kota Cimahi akan berlanjut, disamping itu pemuda sebagai salah satu cita-cita penerus bangsa harus disiapkan dan dikembangkan pula beberapa aspek penunjang seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan hidup, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari BPS Kota Cimahi hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2005 yang tercatat dalam buku Kota Cimahi Dalam Angka 2005 bahwa jumlah penduduk usia 15 – 34 Tahun di Kota Cimahi mencapai 152.339 Jiwa atau 29,90%

dari total penduduk Kota Cimahi, sedangkan pada tahun 2009 jumlah penduduk yang berusia 15 -34 tahun mencapai 232.161 jiwa atau 38,75% dari total penduduk. Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemuda selama kurun 4 tahun telah bertambah sebanyak 79.822 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 52,40%. Dengan potensi tersebut pemuda Kota Cimahi harus diberdayakan menjadi generasi yang siap dan maju untuk membangun Kota Cimahi di setiap bidang pembangunan.

2.1.6 Kebudayaan

Sebagai daerah perkotaan, dengan berbagai latar belakangnya, Kota Cimahi termasuk kota yang memiliki keanekaragaman, termasuk keanekaragaman etnik. Hal ini tentu merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat menjadi modal untuk menuju keunggulan kota. Pembangunan seni dan budaya sudah mengalami kemajuan yakni ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, pentingnya toleransi dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya. Pentingnya pembangunan kebudayaan di Kota Cimahi ditujukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan kaidah kebudayaan daerah itu sendiri dan yang lebih penting adalah melestarikan jati diri dan nilai budaya ditengah semakin derasnya informasi dan pengaruh negatif budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia.

2.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Cimahi telah menunjukkan perubahan yang signifikan, hal ini tercermin dari peningkatan hidup kualitas perempuan. Salah satu indikator keberhasilan di atas Pemerintah Kota Cimahi mengambil beberapa kebijakan terhadap peningkatan peran kaum perempuan dan anak seperti yang diamanatkan dalam MDGs (Milenium Development Goals) yang secara kualitatif dan kuantitatif di seluruh sector dan aspek pembangunan seperti dalam aspek politik 22% anggota legislatif adalah perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa kiprah perempuan dalam bidang politik semakin meningkat. Sampai dengan tahun 2005 telah dilakukan beberapa upaya terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar kesetaraan gender dan memberikan perlindungan kepada anak-anak untuk mendorong kesadaran masing-masing individu dan masyarakat untuk mencegah

kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta trafficking dan eksploitasi kaum perempuan dan anak-anak.

2.1.8 Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan disokong oleh meningkatnya investasi, ekspor, revitalisasi industri, pengembangan sektor tersier, serta optimalisasi pengeluaran dan pengelolaan kekayaan milik daerah. Kemajuan yang terjadi pada sektor ekonomi formal tersebut diimbangi pula dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas di segenap lapisan masyarakat. Upaya mengungkit daya saing ketenagakerjaan menjadi penting sebagai penyeimbang memajukan sektor ekonomi informal yang mendominasi jumlah unit usaha di perkotaan, selain pemberdayaan UMKM dan pengurangan angka kemiskinan.

Dengan menggunakan analisa sektoral dapat diketahui perkembangan sembilan sektor yang ada dalam sebuah perekonomian dan salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan perekonomian adalah dengan menghitung besarnya produksi seluruh barang akhir dalam sebuah perekonomian atau dengan menghitung seluruh jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di wilayah tertentu pada suatu kurun waktu tertentu yang dikenal dengan konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Dengan menggunakan data PDRB Rill Kota Cimahi dari tahun 2000 hingga tahun 2008 dapat diketahui bahwa struktur perekonomian Kota Cimahi secara umum masih bertumpu pada sektor Industri (bercorak industrial) dengan kontribusi secara rata-rata sebesar 62.27% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 4.18%. Akan tetapi, jika persentase pertumbuhan PDRB rill sektor ini dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4.50% maka diketahui bahwa sektor ini terus mengalami perlambatan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,12%. Maka dalam jangka waktu panjang, perekonomian Kota Cimahi harus diarahkan menjadi perekonomian dengan struktur tersier dimana sektor jasa dan perdagangan memegang peran penting bagi perekonomian kota.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa masing-masing memberikan kontribusi rata-rata terbesar kedua dan ketiga terhadap PDRB Kota Cimahi sebesar 18.49% dan 5.62% dengan laju rata-rata pertumbuhan sebesar 5,67% dan 5.90%. Pertumbuhan kedua sektor tersebut berada di atas laju pertumbuhan kota, sehingga kedua sektor tersebut memiliki potensi untuk

mendorong lebih tumbuhnya perekonomian kota dan memiliki potensi untuk dikembangkan.

Berdasarkan data tahun 2000 hingga 2008, diketahui bahwa pengembangan perekonomian Kota Cimahi menunjukkan pergeseran menuju struktur ekonomi tersier sebagaimana didukung oleh angka pertumbuhan rata-rata sektor jasa-jasa sebesar 5,90% terutama sub sub-sektor jasa hiburan dan rekreasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6.32% sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

2.1.8.1 Sektor Pertanian

Melihat data rata-rata laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun 2000 hingga 2008, dapat diketahui bahwa sektor pertanian mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2.41%. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan laju rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi sebesar 4.50%. Dilihat dari kontribusi per sektor terhadap PDRB riil kota maka sektor ini hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0.17%, atau tidak cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi.

Dilihat lebih lanjut, pertumbuhan pada sektor ini mengalami kecenderungan yang menurun bahkan mencapai pertumbuhan negative pada tahun 2005-2006 sebesar - 3.36%. Penurunan ini dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Berkurangnya produksi ikan, unggas dan sapi pada sektor peternakan.
- b) Berkurangnya produktifitas lahan dan tenaga kerja sektor pertanian.
- c) Berkurangnya lahan pertanian di Kota Cimahi sebagai akibat dari konversi lahan.
- d) Kendala pemasaran produk pertanian.
- e) Sistem pertanian yang bercorak sub sistem.

Melihat data secara umum, muncul perkiraan bahwa pertanian yang dilaksanakan selama ini kurang memberikan nilai tambah (*added value*) oleh karenanya jika sektor ini akan ditingkatkan maka model pertanian yang dilakukan harus ditingkatkan dari pertanian yang berorientasi pada produksi menjadi berorientasi pada pasar.

2.1.8.2 Pertambangan dan Penggalian

Kota Cimahi tidak mempunyai sumber daya mineral sehingga sektor ini tidak berkembang.

2.1.8.3 Industri Pengolahan

Dengan menggunakan data PDRB rill Kota Cimahi kurun waktu 2000-2008, diketahui bahwa besarnya rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB rill Kota Cimahi adalah sebesar 62.27%, dan merupakan contributor terbesar terhadap PDRB Kota Cimahi.

Jika dilihat dari data PDRB rill per sub-sektoral maka dapat diketahui bahwa sub-sektor dengan kontribusi terbesar adalah sub-sektor Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki dengan rata-rata kontribusi terhadap perekonomian kota sebesar 52.58% dengan laju pertumbuhan sebesar 8.71% jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan itu sendiri.

Walaupun sektor ini mengalami tekanan yang berat dikarenakan biaya produksi yang relative tinggi, faktor pemasaran yang juga berpengaruh terhadap kelangsungan produksi, serta persaingan dengan produk-produk industri dari dalam negeri dan negara lain terutama negara Cina, namun ternyata sektor ini masih terus dapat tumbuh dengan laju yang cukup tinggi.

Sub-sektor pada industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah Makanan, Minuman dan Tembakau dengan rata-rata kontribusi sebesar 3.79%. Akan tetapi, sub-sektor ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3.32% hal ini disebabkan pada tahun 2004-2005 sub-sektor tersebut mengalami penurunan produksi yang sangat tinggi sebesar 86.1%. Walaupun sub-sektor Logam Dasar dan Baja mengalami pertumbuhan yang cukup besar 144.75% namun kontribusi sub-sektor ini terhadap PDRB rill kota hanya sebesar 0.37%.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur Kota Cimahi
Tahun 2002 - 2008

KETERANGAN	PERTUMBUHAN					
	2002 - 2003	2003 - 2004	2004 - 2005	2005 - 2006	2006 - 2007*)	2007*) - 2008**)
INDUSTRI PENGOLAHAN	4.01	4.43	4.24	3.73	4.30	3.88
3.1 Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 Industri Tanpa Migas	4.01	4.43	4.24	3.73	4.30	3.88
3.2.1 Makanan, Minuman dan Tembakau	26.01	6.22	-86.10	4.29	2.08	-5.85
3.2.2 Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	3.98	4.64	20.97	3.66	4.21	6.80
3.2.3 Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	-18.75	2.02	-41.95	3.07	3.92	-7.19
3.2.4 Kertas dan Barang Cetakan	-76.10	1.07	-8.29	5.77	4.20	-10.28
3.2.5 Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	33.33	1.10	-63.54	6.33	5.95	-2.28
3.2.6 Semen dan Barang Galian Bukan Logam	-52.24	1.00	-92.01	7.38	4.56	-18.36
3.2.7 Logam Dasar dan Baja	33.43	1.10	1230.21	2.48	7.32	186.11
3.2.8 Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	-23.71	1.10	-25.93	5.21	7.90	-5.04
3.2.9 Barang Lainnya	-6.44	1.05	24.97	3.31	2.04	3.81

2.1.8.4 Listrik, Gas dan Air Bersih

Seiring terus bertambahnya jumlah penduduk di Kota Cimahi maka semakin besar sumber daya air dan listrik yang diperlukan untuk melakukan aktifitas penduduknya. Selama kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2008, sektor ini secara rata-rata telah tumbuh sebesar 4,18% dengan kontribusi sebesar 3,72%. Pengelolaan penyediaan air bersih serta adanya program penggunaan / konversi ke gas di Kota Cimahi akan memperbesar kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan perekonomian kota.

2.1.8.5 Bangunan / Kontruksi

Berdasarkan data PDRB tahun 2000 – 2008 maka terlihat sektor ini telah memberikan kontribusi secara stabil dengan kisaran 6,35% dan laju rata-rata pertumbuhan sebesar 2,91%. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan rill Kota Cimahi sebesar 4.54%. Pertumbuhan sektor bangunan dan konstruksi didorong oleh adanya pembangunan pusat-pusat perdagangan baru serta pembangunan perumahan dan bangunan lainnya terutama pada tahun 2006 hingga 2008.

2.1.8.6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

Secara umum sektor ini telah tumbuh melebihi angka rata-rata pertumbuhan PRDB kota dengan kisaran rata-rata sebesar 5.67% dan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 18.49% terhadap PDRB kota. Dilihat dari kontribusi per sub-sektor maka sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran memberikan rata-rata kontribusi terbesar atau sebesar 16.54% terhadap PDRB kota .

Dilihat dari segi pemanfaatan ruang maka dapat dikatakan bahwa secara umum pusat perdagangan yang berada di CBD (*central business district*) yang terletak sepanjang Jalan Nasional (100 m kanan-kiri jalan) pada Kelurahan Padasuka, Setiamanah, Cimahi, dan Cibabat telah tumbuh rata-rata sebesar 5,94% dengan kontribusi 18.33%.

Sementara itu, sub-sektor hotel dan restoran masih memberikan kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan Kota Cimahi. Secara rata-rata dari tahun 2000-2008 sub-sektor hotel memberikan kontribusi sebesar 0.02% terhadap PDRB kota atau jauh lebih rendah daripada kontribusi sektor pertanian yang sebesar 0,17%. Adapun laju pertumbuhan rata-rata sub-sektor hotel selama kurun waktu 2000 –

2008 mencapai sebesar 3,78%. Walaupun demikian, pada tahun 2008 sempat mengalami lonjakan pertumbuhan yang mencapai 12,16%.

Untuk sub sektor restoran, selama kurun waktu 2000 – 2008 telah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,93% terhadap PDRB kota dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,72% atau sedikit di atas pertumbuhan rata-rata ekonomi kota.

2.1.8.7 Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini memberikan kontribusi yang masih kecil hanya sebesar 1.52% terhadap rata-rata PDRB rill Kota Cimahi dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,70%. Terdapat empat sub-sektor pengangkutan dan komunikasi yang berkembang di Kota Cimahi antara lain:

- Angkutan Rel
- Angkutan jalan raya
- Jasa Penunjang Angkutan
- Komunikasi.

Sektor komunikasi sebenarnya sudah cukup berkembang persiapannya, seperti dengan adanya Gedung Baros Information Technology & Creative (BITC) adalah untuk mendukung Cimahi agar berfungsi sebagai pusat teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahap selanjutnya Cimahi dapat berperan penting dengan memanfaatkan keunggulan sarana komunikasi yang dimiliki, sementara masyarakat Kota Cimahi juga dapat terlibat dengan keterampilan bidang komunikasi yang akhirnya dapat mencitrakan kepakaran yang khusus.

2.1.8.8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Rata-rata kontribusi sektor ini terhadap PDRB rill Kota Cimahi hanya sebesar 1.85% dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 6,95% atau lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan rill Kota Cimahi.

Berdasarkan data per sub-sektor maka sub-sektor jasa sewa bangunan ternyata memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,95% atau lebih besar dibandingkan sub sektor perbankan yang hanya mencapai 0,75% terhadap PDRB kota. Bila melihat pertumbuhan rata-rata, sub sektor jasa sewa bangunan yang sebesar 3,41% justru jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sub sektor perbankan yang mencapai 12,38%.

Dengan melihat tingginya angka pertumbuhan sektor perbankan yang ternyata tidak diikuti oleh besarnya kontribusi terhadap PDRB maka terdapat

kecenderungan bahwa usaha yang dilakukan perbankan di Kota Cimahi hanya berupa simpan-pinjam dalam jumlah yang relatif kecil.

Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang masih tergolong ke dalam sub-sektor lembaga keuangan lainnya memiliki kontribusi yang cenderung stabil/tetap terhadap PDRB Kota Cimahi yakni berkisar 0,03% dengan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 6,16%.

Jika dilihat dari komposisi penggunaan dana dari lembaga-lembaga keuangan dan non perbankan lainnya diketahui bahwa besarnya kredit pada lembaga-lembaga ini sebagian besar digunakan untuk modal kerja dengan rata-rata kontribusi terhadap jumlah total kredit tahun 2000 hingga tahun 2005 adalah sebesar 67% dan dengan pertumbuhan sebesar 7.4%. Akan tetapi, laju pertumbuhan kredit perbankan untuk konsumsi tumbuh sangat cepat rata-rata sekitar 41.9% pada tahun 2000-2005.

2.1.8.9 Jasa – Jasa

Berdasarkan data tahun 2000 hingga tahun 2008 secara rata-rata sektor ini telah tumbuh sebesar 5,90% atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB rill Kota Cimahi. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 5,62% dan merupakan kontributor terbesar ketiga terhadap PDRB setelah sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor jasa ini meliputi jasa pemerintahan umum dan swasta

Ditinjau dari sub-sektor maka peran pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) yang merupakan aktifitas pemerintahan Kota Cimahi dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi memberikan rata-rata kontribusi terhadap PDRB rill sebesar 4,17% dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,26%.

Sub-sektor swasta hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,46% dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,90%. Sementara itu sub sub-sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi jauh telah tumbuh sebesar 6,32%.

2.1.9 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dirasakan melalui pemanfaatan hasil pengembangan dan penguasaan iptek untuk pelayanan publik. Pemanfaatan iptek yang telah berjalan di Kota Cimahi diantaranya di bidang persampahan melalui konsep Industri Daur Ulang Sampah, di bidang prasarana transportasi yang berupa penggunaan *down counter* pada *traffic light*, di bidang

Teknologi Informasi melalui konsep *e-government* yang selama ini dikelola oleh Kantor PDE dan Arsip Daerah Kota Cimahi, dan penggunaan berbagai macam Sistem Informasi yang berbasis teknologi Informasi yang dijalankan oleh beberapa SKPD. Demikian juga konsep *e-procurement* yang masih dalam tahap persiapan pembentukan Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).

Penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum optimal hal ini dikarenakan mekanisme intermediasi yang menjadi jembatan antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan penggunaan belum efektif, belum adanya *konsistensi dan sinergisitas* kebijakan yang mengakibatkan iptek belum dapat memberikan hasil yang signifikan, belum berkembangnya budaya Iptek serta belum terkaitnya hasil kajian dengan kehidupan yang nyata.

Dikalangan aparatur pemerintah pemanfaatan iptek belum dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena terbatasnya kualitas SDM untuk menyerap iptek, sarana dan prasarana teknologi yang terbatas terutama teknologi informasi yang penggunaannya belum maksimal diakses oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Menyadari kenyataan tersebut di atas pengembangan IPTEK ke depan harus dikaitkan dengan daya saing daerah, hal-hal yang menjadi pemikiran unggul komunitas kota akan menghasilkan rantai produksi unggul pula yang pada akhirnya membawa lokasi kota sebagai tempat yang unggul.

2.1.10 Sarana dan Prasarana

Pada sektor transportasi di Kota Cimahi yang merupakan transportasi darat, terdapat ketidakseimbangan antara pertumbuhan volume kendaraan dengan kapasitas pengembangan infrastruktur yang ada. Meningkatnya jumlah penduduk dan berbagai perkembangan fungsi kota, mendorong peningkatan pergerakan/mobilisasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, belum terbentuknya jalur kolektor alternatif, serta belum optimalnya sistem transportasi publik dan angkutan massal, menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan manajemen dan kapasitas (kualitas dan kuantitas) infrastruktur transportasi yang ada.

Keberadaan infrastruktur sumber daya air saat ini masih belum memadai. Fluktuasi debit air permukaan masih tinggi sehingga menimbulkan masalah banjir dan kekeringan pada musim tertentu, menandakan bahwa sistem pengelolaan sumber daya air belum optimal. Secara kualitas air permukaan tercemar oleh limbah industri maupun limbah domestik sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air bersih. Di sisi lain, ketersediaan air tanah dari

tahun ke tahun semakin menurun, yang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak terkendali tanpa diimbangi oleh upaya pemulihan yang optimal. Pengembangan bangunan embung, irigasi dan sumur resapan yang sampai saat ini telah terbangun, belum cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya air yang ditunjang oleh infrastruktur yang baik dan terintegrasi dalam suatu dan antar kawasan/ wilayah yang dapat termanfaatkan secara optimal.

Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta peningkatan daya saing masyarakat Kota Cimahi. Masalah utama dalam pembangunan telematika adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses informasi. Kondisi itu menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital. Dari sisi penyelenggara pelayanan sarana dan prasarana telematika (sisi *supply*), kesenjangan digital itu disebabkan oleh (a) terbatasnya kemampuan pembiayaan operator sehingga kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dan pembangunan baru terbatas; (b) belum terjadinya kompetisi yang setara dan masih tingginya hambatan masuk (*barrier to entry*) sehingga peran dan mobilisasi dana swasta belum optimal; (c) belum berkembangnya sumber dan mekanisme pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana telematika, seperti kerja sama pemerintah-swasta, pemerintah-masyarakat, serta swasta-masyarakat; (d) masih rendahnya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana; (e) terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi; (f) terbatasnya pemanfaatan industri dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap komponen industri luar negeri masih tinggi; dan (g) masih terbatasnya industri aplikasi dan materi (*content*) yang dikembangkan oleh penyelenggara pelayanan sarana dan prasarana. Terkait dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan sarana dan prasarana dari sisi permintaan, kesenjangan digital disebabkan oleh (a) terbatasnya daya beli (*ability to pay*) masyarakat terhadap sarana dan prasarana telematika; (b) masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi; dan (c) terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi menjadi peluang ekonomi, yaitu menjadikan sesuatu mempunyai nilai tambah ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan energi dihadapkan pada densitas penduduk Kota Cimahi yang bervariasi, keterbatasan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi; tingginya pertumbuhan permintaan berbagai jenis energi setiap tahun; serta kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah.

Dalam sektor permukiman, peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dengan keterbatasan ruang dan lahan yang ada menyebabkan timbulnya permukiman padat dan kumuh. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan sederhana dan sehat secara vertikal. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai kendala. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan lahan dan pembiayaan, masih rendahnya tingkat daya beli masyarakat, masih minimnya keberpihakan pihak swasta dalam menyediakan perumahan bersubsidi, serta sulitnya merubah perilaku serta pola hidup masyarakat. Pelayanan sarana dan prasarana permukiman, terutama pelayanan air bersih perkotaan, masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Cakupan pelayanan dari sistem air bersih perpipaan masih rendah serta terbatasnya sumber air baku baik dari segi kuantitas maupun kualitas menjadi masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Minimnya sarana pengolahan air limbah baik domestik maupun industri, menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap sumber daya air. Pengembangan sanitasi skala komunal dan kawasan yang kini digalakkan masih terbentur keterbatasan pemilihan lahan dan pembiayaan, serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Minimnya infrastruktur drainase skala kawasan menimbulkan genangan air di beberapa area terutama pada intensitas curah hujan yang sangat tinggi di musim penghujan. Kondisi drainase masih dijadikan tempat pembuangan limbah secara langsung, terutama di kawasan padat huni dan industri yang belum memiliki tempat pengolahan limbah yang baik sehingga menimbulkan pencemaran. Untuk persampahan, program 3 R (Reuse, Reduce, Recycle) terus digalakkan oleh pemerintah pada skala kawasan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah.

2.1.11 Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi 2003-2012, kinerja penataan ruang di Kota Cimahi kurang optimal, dimana masih terdapat beberapa ketidaksesuaian baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis.

Pengembangan struktur dan ruang kota dengan membuka jaringan prasarana baru terkendala oleh beberapa hambatan teknis dan geografis, yaitu:

- a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi, yaitu 1446,59 Ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna.
- b) Berdasarkan hasil Kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi Geologi Lingkungan Metropolitan Bandung yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Kota Cimahi termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gunung api I, yaitu kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan hujan abu, serta tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas, aliran lava dan lontaran batu (pijar) apabila terjadi letusan besar Gunung Tangkubanperahu. Selain itu, di Kota Cimahi juga terdapat patahan Lembang yang berarah timur-barat, merupakan bagian dari segmen bagian Utara dari patahan Cimandiri yang berarah barat daya-timur laut. Patahan Lembang perlu mendapat perhatian dan diwaspadai terutama keaktifannya dalam kaitannya dengan Cekungan Bandung. Melihat posisi patahan Lembang yang berdekatan dengan Gunung Tangkubanperahu yang tergolong masih aktif, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gempa-gempa yang akan terjadi di sepanjang jalur patahan yang merupakan petunjuk keaktifan suatu patahan.
- c) Keputusan Menteri Perhubungan No. 49/2000 menetapkan sebagian wilayah Kota Cimahi (20% luas) termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Lapangan Udara Husein Sastranegara. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pembangunan vertikal di beberapa kawasan di Kota Cimahi.
- d) Hambatan lain yang berupa hambatan fisik dan geografis dalam pengembangan Kota Cimahi adalah terdapatnya lembah-lembah sungai di kawasan Cimahi bagian Utara, jalan tol dan jalan kereta api mengakibatkan kota Cimahi terpecah menjadi beberapa kawasan yang sulit berinteraksi. Hal tersebut disebabkan belum memadainya infrastruktur untuk mengintegrasikan kawasan-kawasan tersebut sehingga pemanfaatan ruang Kota Cimahi menjadi terbatas.

Keterbatasan-keterbatasan dalam pengembangan struktur dan ruang kota disikapi dengan upaya penyusunan instrumen-instrumen perencanaan dan pengendalian ruang.

Kondisi lahan kritis, berdasarkan data tahun 2007 luas lahan kritis di Kota Cimahi adalah 609 hektar. Rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis). Sampai dengan tahun 2008, pencapaian reboisasi di Kota Cimahi adalah sekitar 84,4% dengan luas lahan yang direboisasi seluas 514 hektar dan jumlah tanaman sebanyak 205.600 pohon.

Kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan, menunjukkan bahwa pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan air yang terjadi di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cibabat masih belum menunjukkan perbaikan hingga tahun 2008. Secara umum kualitas air di lima sungai menunjukkan besarnya pengaruh kegiatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan industri dan rumah tangga. Kecenderungannya, semua parameter kualitas air di sungai-sungai tersebut menunjukkan konsentrasi yang meningkat dan melebihi baku mutu dari hulu ke hilir dan dari tahun ke tahun. Pencemaran air di Kota Cimahi dihasilkan terutama oleh limbah cair dari kawasan industri yang dibuang ke sungai terdekat sebagai badan air penerima buangan limbah industri. Kawasan industri sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Cimahi Selatan, sehingga dominasi pencemaran akibat limbah cair industri terletak di hilir aliran Sungai Cimahi dan Sungai Cisangkan, yang selanjutnya bermuara menjadi effluent ke Sungai Citarum. Pencemaran udara di Kota Cimahi berasal dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Pencemaran yang diakibatkan oleh sumber bergerak lebih banyak terjadi di Wilayah Kota Cimahi bagian Utara, terutama di sepanjang jalur yang menghubungkan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sementara pencemaran udara yang diakibatkan oleh sumber tidak bergerak banyak terjadi di wilayah Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah, dimana terdapat banyak aktivitas transportasi dan industri.

2.1.12 Politik

2.1.12.1 Kehidupan Berpolitik

Pemilihan umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2007 dan pemilihan legislatif tahun 2009 secara langsung di Kota Cimahi, telah berjalan dengan cukup demokratis, aman, dan adil sehingga berhasil membentuk lembaga suprastruktur politik daerah yang legitimate (DPRD dan Walikota/Wakil Walikota). Capaian politik ini merupakan modal penting dalam memperkuat proses konsolidasi demokrasi. Terpeliharanya suasana yang cukup kondusif selama ini memberikan kontribusi bagi kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi

tersebut. Kelancaran penyelenggaraan pemilu tersebut tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat keamanan, jajaran pemerintah, penyelenggara pemilu serta masyarakat luas. Terjaganya netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Pemerintah Kota Cimahi terhadap politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menjadi catatan tersendiri yang bermuatan positif bagi upaya peningkatan profesionalisme aparatur dalam bingkai pembangunan politik di daerah.

Penerapan mekanisme *checks and balances* yang adil serta kebebasan dalam melaksanakan hak-hak sipil dan politik warga menjadi isu politik yang hangat sejalan dengan semakin bergulirnya arus demokratisasi. Perkembangan visi dan misi partai politik ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan kesadaran dan dinamika kehidupan sosial politik masyarakat dan tuntutan demokratisasi.

Dalam konteks hubungan Pusat-Daerah, format desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai permasalahan, antara lain disebabkan kurangnya koordinasi Pusat-Daerah dan masih belum konsistennya sejumlah peraturan perundangan yang ada.

2.1.12.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat Kota Cimahi cukup tinggi yang ditandai dengan keikutsertaan hak politik masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2007 sebesar 73,60 %, pemilu DPR/DPRD pada tahun 2009 sebesar 71 % dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2009 sebesar 86 %. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu tersebut memberi andil yang besar, tidak saja terhadap suksesnya Pemilu melainkan juga dalam memperkuat legitimasi figur-figur terpilih untuk mengemban amanat rakyat. Fenomena politik ini mencerminkan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran politik telah mendorong dalam menumbuhkembangkan partisipasi politik warga. Namun demikian secara substansial, partisipasi politik warga belum mandiri, tingkat rasionalitas politik warga belum berkembang sebagaimana mestinya sehingga terkadang yang muncul ke permukaan adalah emosi politik dan terabaikannya etika demokrasi.

2.1.13 Hukum dan HAM

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya sebagai tempat pijakan bagi seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya-upaya konkret dalam penegakan supremasi hukum sebagai manifestasi pemulihan kepercayaan masyarakat di Kota Cimahi telah ditempuh melalui penyusunan dan penerbitan produk-produk hukum daerah yang aspiratif sesuai kebutuhan daerah serta mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya tersebut ditunjang pula dengan peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan serta aparatur hukum dan penyediaan sarana prasarana hukum yang memadai.

Pembinaan hukum sampai dengan tahun 2007 berpedoman pada kebijakan umum bidang hukum sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kota Cimahi Tahun 2003-2007. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat yang berdasarkan atas azas ketaatan pada hukum di Kota Cimahi sampai dengan tahun 2009 antara lain telah ditetapkan berbagai Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota, penyelenggaraan sosialisasi perda, penyuluhan hukum, dan forum supremasi hukum, pelayanan bantuan hukum untuk membantu penyelesaian kasus Tata Usaha Negara, Kasus Perdata, dan Kasus Pidana, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum (pengadilan, kehakiman, Kejaksaan dan kepolisian), untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan hukum bagi semua penegak hukum yang ada di Kota Cimahi, yaitu melalui jalur-jalur yang efektif serta mengacu kepada tugas dan fungsinya masing-masing.

2.1.14 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2.1.14.1 Stabilitas keamanan dan ketertiban

Dalam rangka mendukung program pembangunan Kota Cimahi yang berkesinambungan, diperlukan suasana dan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara aktif. Selama ini, situasi keamanan dan ketertiban Kota Cimahi dinilai cukup kondusif sehingga dapat menjadi kekuatan dalam melaksanakan praktek

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Keberlangsungan dan kelancaran segala kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Cimahi beserta jajarannya sudah tentu tidak akan terlepas berkat dukungan suasana kehidupan sosial, ekonomi, politik kemasyarakatan yang kondusif. Harmonisasi antar warga dalam interaksi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang telah berjalan selama ini sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya yang dilakukan guna menciptakan dan mengembangkan tenggang rasa, toleransi, hormat menghormati, dan kesetiakawanan sosial antar berbagai unsur yang ada.

Kondisi keamanan dan ketertiban yang menjamin rasa aman khususnya bagi masyarakat kota Cimahi tersebut, pada umumnya akan mendorong pertumbuhan investasi secara positif, dan lingkungan sosial kemasyarakatan yang kondusif. Upaya penegakan ketertiban dan keamanan terus diupayakan secara sinergi dan simultan melalui beberapa program dan kegiatan sehingga dapat menciptakan dan menegakkan situasi dan kondisi yang mendukung kelancaran bagi seluruh aktivitas kegiatan masyarakat. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan keamanan di wilayah Kota Cimahi antara lain pengamanan Pemilu, pengamanan unjuk rasa, penertiban miras, pembongkaran bangunan liar, pemberantasan penyakit masyarakat dan penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi di bidang perizinan, operasi penegakan perda melalui sidang tipiring dan gerakan disiplin daerah.

Dalam rangka perlindungan masyarakat telah diupayakan pendayagunaan anggota perlindungan masyarakat di setiap kelurahan dan kecamatan dalam penanganan bencana; pelatihan kapasitas para anggota linmas; dan operasi unit pemadam kebakaran. Sedangkan untuk memantapkan kesatuan bangsa telah dilaksanakan forum wawasan kebangsaan dan monitoring kondisi sosial politik.

Hal yang membanggakan bagi Kota Cimahi adalah meskipun tingkat pluralistik masyarakatnya cukup tinggi, dan juga merupakan daerah perlintasan Bandung Area Metropolitan, namun terjadinya gejolak ataupun konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal sampai saat ini masih dapat ditekan serendah mungkin. Walaupun tingkat kriminalitas, pelanggaran hukum, sikap ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum masih tetap ada tetapi tidak menimbulkan gangguan yang cukup berarti bagi keberlangsungan proses pembangunan dan pemerintahan. Secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya perwujudan ketentraman dan ketertiban cukup baik sehingga kondisi yang

favourable ini merupakan prestasi dan prestise yang layak untuk selalu dijaga dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat Kota Cimahi.

2.1.14.2 Antisipatif dan Preventif

Secara empirik, gangguan keamanan dan ketertiban yang selama ini muncul dan berpotensi berkembang di Kota Cimahi adalah apabila terjadi konflik antara buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan UMK (upah minimum kota); perilaku tidak tertib kalangan sektor informal pedagang kaki lima dan gepeng; unjuk rasa; perkelahian/perselisihan antar kelompok dan tawuran; dan pelanggaran norma sosial. Adanya kerawanan dan masalah sosial tersebut akan berdampak negatif dan berpotensi melahirkan berbagai penyakit masyarakat seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian, pelacuran, premanisme, dan perilaku sosial yang menyimpang lainnya.

Selain itu tidak boleh dilupakan juga kemungkinan ancaman bahaya yang lebih besar yaitu terorisme, konflik yang bersifat SARA, dan gerakan radikalisme yang seringkali bersifat laten serta memiliki jaringan dan daya destruktif yang lebih luas. Potensi terjadinya riak-riak kecil gesekan sosial pun masih tetap ada dan harus senantiasa diwaspadai bersama. Upaya antisipatif dan preventif dalam memperkuat jalinan kohesi sosial adalah dengan memupuk dan menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan yang telah dibangun selama ini di kota Cimahi sehingga pada akhirnya diharapkan benar-benar dapat menjadi karakter dan budaya masyarakat Cimahi.

2.1.14.3 Peran Aparat dan Partisipasi Masyarakat

Terjadinya pelanggaran dan ketidaknyamanan lingkungan akibat gangguan keamanan pada satu sisi disebabkan oleh lemahnya kesiap-siagaan dan kewaspadaan aparat keamanan, dan juga karena kurangnya dukungan masyarakat dalam menjaga kondusifitas lingkungan sekitar melalui sistem keamanan lingkungan yang berbasiskan rakyat semesta. Oleh karena itu aparat keamanan di kota Cimahi telah dilatih dan dibina secara berkelanjutan, komponen-komponen masyarakat juga telah disiapkan dalam konteks cegah dan deteksi dini terhadap semua gejala yang diindikasikan mempunyai kecenderungan membuat suasana tidak aman dan tidak tertib.

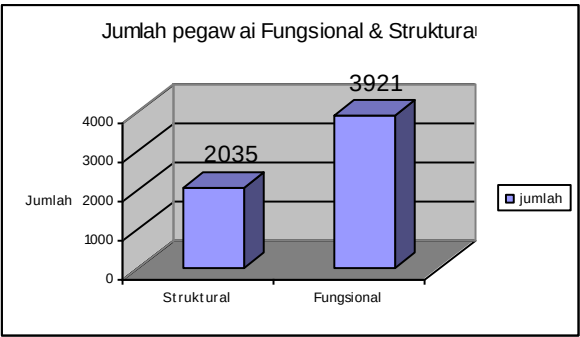
Perlu pula dicatat bahwa pada tataran masyarakat sipil, melalui fasilitasi Pemerintah Kota Cimahi, telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Komunikasi Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) di

Kota Cimahi yang diharapkan dapat menjadi pilar dalam memperkuat dan menggalang solidaritas, toleransi, kerukunan, dan tenggang rasa antar umat yang memiliki perbedaan baik suku bangsa/etnis maupun agama yang dipeluknya. Intensitas komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar warga dengan latar belakang perbedaan suku dan agama ini sangat diperlukan untuk mempererat dan memperkokoh semangat persaudaraan dan kebersamaan. Pengembangan dan pemupukkan wawasan serta semangat kebangsaan ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, disampaikan secara berulang-ulang (repetitif), dan disertai keteladanan yang nyata dari para pemimpinnya guna kian menumbuhkembangkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air pada semua lapisan masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda.

2.1.15 Aparatur

Sumber Daya Aparatur Pemerintah di Kota Cimahi sangat beragam baik berdasarkan latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, golongan dan gender. Secara kuantitas aparatur pemerintah Kota Cimahi Tahun 2009 adalah berjumlah 5.956 orang, yang terbagi menjadi PNS fungsional sebanyak 3.921 orang, PNS Struktural 2.035 orang. Dimana dari 3.021 orang tenaga fungsional tersebut mayoritas adalah guru dan tenaga kesehatan.

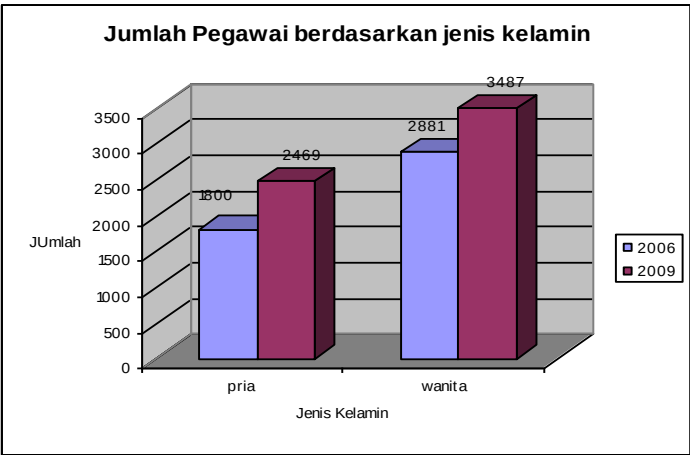
Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Fungsional dan Struktural



Sumber: Kantor Kepegawaian Daerah 2010

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai wanita berjumlah 3.487 orang, sedangkan pegawai pria hanya 2.881 orang. Pada tahun 2006 jumlah PNS hanya 4.681 orang, sehingga terjadi kenaikan sebesar 27,24%.

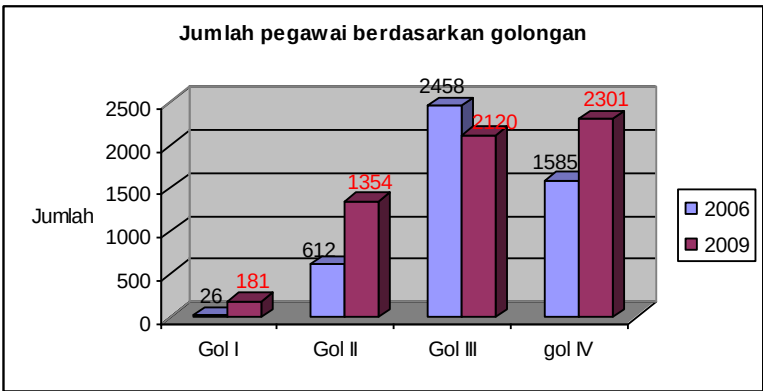
Gambar 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Kantor Kepegawaian Daerah 2010

Seluruh aparatur pemerintah Kota Cimahi terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, seperti ditampilkan pada grafik berikut.

Gambar 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Kantor Kepegawaian Daerah 2010

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas pegawai Kota Cimahi pada tahun 2009 adalah PNS golongan IV yaitu 38,63% (2.301 orang). Pada tahun 2006 mayoritas pegawai adalah PNS III sebesar 52,51% (2.458 orang) sedangkan PNS Golongan I berjumlah paling sedikit, yaitu pada tahun 2009 sebanyak 181 orang (3,04%.) sedangkan tahun 2005 hanya 26 orang (0,56%).

Berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2009 pegawai Pemerintah Kota Cimahi mayoritas berpendidikan setara S1 yaitu sebanyak 2.832 orang atau sekitar 47,5%. Sedangkan pegawai yang berpendidikan setara SD berjumlah paling sedikit yaitu hanya 102 orang atau sekitar 1,87 %. Sementara pada tahun 2006 pegawai mayoritas berpendidikan setara D4, sebanyak 1.268 orang atau sekitar 27.09%. Perubahan ini terjadi karena selama kurun waktu tersebut terjadi peningkatan pendidikan formal dari D3, D2, D1 dan SLTA yang melanjutkan sekolah ke jenjang S1, terutama para tenaga fungsional guru dan perawat. Rincian lebih lengkapnya diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Tingkat Pendidikan Pegawai

Tingkat Pendidikan	2006		2009	
	Σ	%	Σ	%
S3	0	0.00%	0	0.0%
S2	87	1.86%	199	3.3%
S1	586	12.52%	2832	47.5%
D4	1268	27.09%	26	0.4%
D3	535	11.43%	656	11.0%
D2	1158	24.74%	903	15.2%
D1	79	1.69%	29	0.5%
SLTA	830	17.73%	1078	18.1%
SLTP	55	1.17%	131	2.2%
SD	83	1.77%	102	1.7%
Jumlah	4681	100%	5956	100%

Sumber: Kantor Kepegawaian Daerah 2010

Berdasarkan kelompok usia, ternyata pada tahun 2009 mayoritas aparatur berusia antara 46 – 50 tahun yaitu berjumlah 1.481 orang, (24,87%), sedangkan pada tahun 2006 mayoritas pegawai berada pada kelompok usia 41-45 tahun sebanyak 1.256 orang (26,83%). Sementara itu kelompok usia pegawai yang paling sedikit adalah usia 19 – 25 tahun sebanyak 129 orang (2,17%) di tahun 2009 dan 87 orang (1,86%) di tahun 2006.

Tabel 2.9
Pegawai Pemerintah Kota Cimahi Berdasarkan Usia

USIA	2006		2009	
	Σ	%	Σ	%
19 – 25	87	1.86%	129	2.17%
26-30	198	4.23%	574	9.64%
31-35	219	4.68%	698	11.72%
36-40	517	11.04%	757	12.71%
41-45	1256	26.83%	1155	19.40%
46-50	1252	26.75%	1481	24.87%
51-55	833	17.80%	875	14.69%
56-60	319	6.81%	286	4.80%
Jumlah	4681	100%	5955	100%

Sumber: Kantor Kepegawaian Daerah 2010

2.1.16 Keuangan Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Penerapan prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Selain itu, adanya dana perimbangan merupakan peluang yang harus betul-betul dapat dimanfaatkan yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan konsultasi serta sinergisitas program pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

2.2 TANTANGAN

2.2.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan perlu ditingkatkan agar mencapai dimensi kualitatif sumber daya manusia yang memiliki keterampilan berdasarkan proses akademisnya dan penguasaan iptek serta moralitas, kondisi tersebut merupakan pondasi yang harus dibangun sebelumnya. Sementara itu tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan pendidikan adalah bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi setara Wajib Dikdas 15 tahun serta menjadikan bidang pendidikan menjadi salah satu daya tarik kota, menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antar penduduk kaya dan miskin, antar penduduk di wilayah maju dan tertinggal, serta antar laki-laki dan perempuan. Pada tingkat pendidikan dasar dan terutama tingkat menengah kualitas lulusan harus menjadi perhatian utama karena semakin tinggi persaingan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan berkembangnya teknologi informasi perlu dilakukan antisipasi sejak dini yaitu dengan mengembangkan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan sarana dan prasarana yang lebih mengarah pada teknologi, serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai akhlak, kecerdasan dan kearifan budaya lokal serta dengan memperbanyak sekolah Kejuruan. Disamping itu dengan

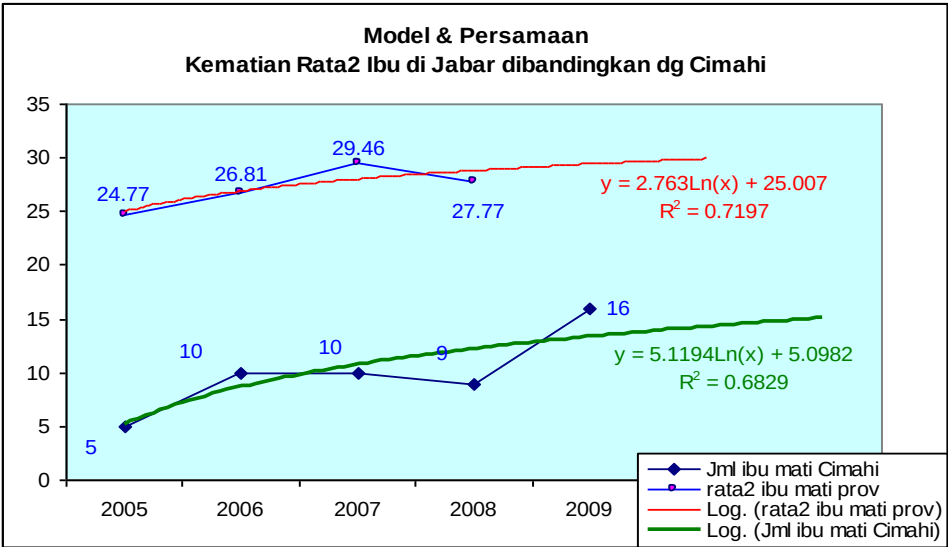
mempertimbangan globalisasi juga dapat memberikan pengaruh negative, juga harus dikembangkan lptek dan lmtaq untuk anak didik sehingga dapat dicapai lulusan yang berbudi pekerti luhur yang mempunyai wawasan iptek, serta yang menjadi tantangan berat adalah kompetensi pendidik harus menggunakan standar nasional karena pendidik mempunyai tanggung jawab yang penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.2.2 Kesehatan

Dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi Kota Cimahi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, Kota Cimahi mengalami beberapa permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Padatnya jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah berpengaruh terhadap daya dukung dan kualitas lingkungan pada beberapa lokasi kepadatan tersebut sangat tinggi dan cenderung menjadi kumuh dengan kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik. Kondisi ini menyebabkan belum meratanya pelaksanaan PHBS di masyarakat , terutama di lingkungan yang padat serta cenderung kumuh. Walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat juga kelompok masyarakat ekonomi menengah atas yang belum menerapkan PHBS dengan baik.

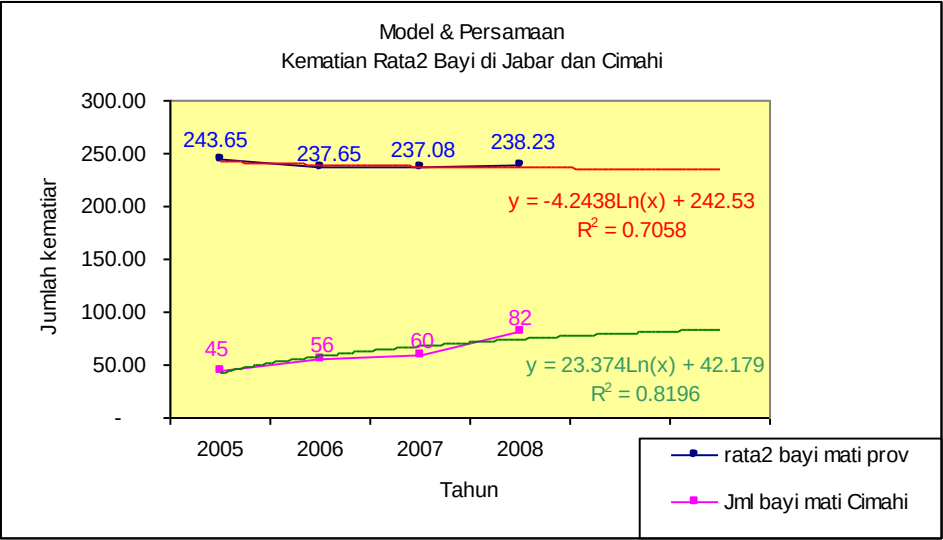
Permasalahan lainnya adalah masalah KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), khususnya yang berkaitan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB). Kasus kematian ibu dan bayi di Kota Cimahi tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Gambar 2.5
Model dan Persamaan Kematian Rata-rata Ibu
di Provinsi Jawa Barat Dibandingkan dengan Kota Cimahi



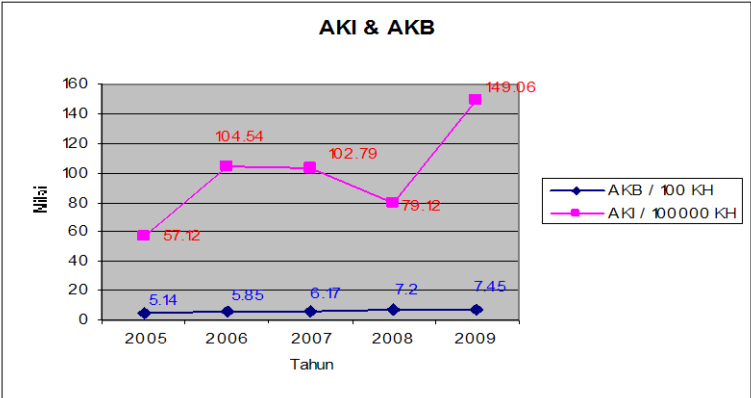
Gambar 2.6

Model dan Persamaan Kematian Rata-rata Bayi di Provinsi Jawa Barat Dibandingkan dengan Kota Cimahi



Walaupun jumlah kematian bayi dan ibu di Kota Cimahi masih dibawah rata-rata jumlah kematian bayi dan ibu di Jawa Barat , akan tetapi hal tersebut tetap harus diwaspadai dan ditangani.

Gambar 2.7
AKI dan AKB Kota Cimahi Tahun 2005 – 2009



Sumber : Dinkes Kota Cimahi 2010

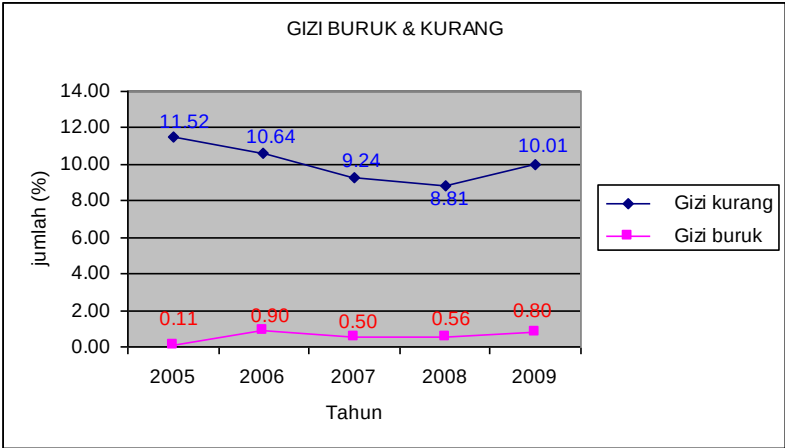
Dari grafik di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun 2005 s/d 2009, sementara untuk AKI walaupun dari tahun 2006 s/d 2008 memiliki kecenderungan menurun, tapi pada tahun 2009 melonjak cukup tinggi mencapai 149,06/100.000 KH sehingga penanggulangan Kematian Ibu dan bayi perlu mendapat prioritas. Pada dasarnya pelayanan KIA di Puskesmas sudah cukup baik, hanya saja tingginya AKI tersebut dipengaruhi oleh Jumlah kematian di Bidan praktek swasta/ klinik swasta yang pada akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit. Penyebab lainnya adalah masih terdapat

masyarakat/bumil yang belum sepenuhnya mengerti tentang perawatan kesehatan kehamilan, Ibu dan anak. Tingginya AKI juga dikarenakan sistem pencatatan dan pelaporan KIA yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga tidak terjadi *under reported*. Selain itu dengan bertambahnya tenaga kesehatan (bidan) menyebabkan kegiatan kunjungan lapangan atau pelacakan kasus kesakitan dan kematian ibu dan bayi juga meningkat.

Penyebab kematian ibu dan bayi disebabkan oleh penyebab langsung dan penyebab tak langsung. Penyebab langsung kematian ibu dan bayi di Wilayah Kota Cimahi dari Tahun 2004 sampai Tahun 2008, umumnya adalah karena pendarahan dan eklamsi dan penyebab lainnya seperti adanya penyakit penyerta pada ibu, yaitu Decompensatio Cordis, Gagal Ginjal, KP, dan Dehidrasi Berat, dan sebagainya. Penyebab langsung kematian bayi paling banyak adalah karena Asfiksia dan komplikasi BBLR. Selain itu juga oleh karena Prematuritas dan Icterus serta penyebab lain (Kelainan Kongenital, Aspirasi, Diare Dehidrasi, Meningitis). Sedangkan tidak langsung yaitu karena adanya faktor 3 Terlambat (3T) dan 4 Terlalu.

Tantangan lainnya adalah masih terdapat masalah dalam status gizi masyarakat khususnya untuk balita dimana terjadi kenaikan dari tahun 2008 ke dua 2009 dimana pada tahun 2009 sebesar 0,24% untuk balita gizi buruk dan kenaikan untuk balita gizi kurang sebesar 1,24% dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.8
Kasus Gizi Buruk dan Kurang di Kota Cimahi Tahun 2005 – 2009



Sumber : Dinkes Kota Cimahi tahun 2010

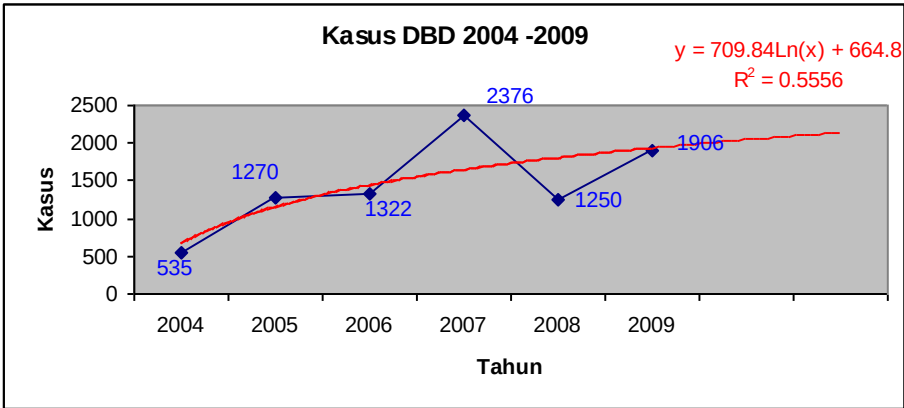
Kondisi Kota Cimahi yang diapit oleh tiga Kota/Kabupaten menyebabkan munculnya permasalahan kesehatan yang disebabkan aspek demografi tersebut. Tidak sedikit warga dari luar Kota Cimahi berobat di Kota Cimahi, dan kondisi

seperti ini juga mempengaruhi penyebaran berbagai penyakit yang berjangkit di kota sekitar Cimahi.

Pada saat ini jumlah keluarga miskin di Kota Cimahi relatif masih banyak. Pada tahun 2009 sebanyak 85.178 jiwa yang tercover Jamkesmas, dan 16.086 jiwa belum tercover Jamkesmas, sementara pada tahun 2005 sebanyak 42.262 KK tercover oleh Askeskin. Di lain pihak kondisi ekonomi suatu keluarga berpengaruh pada kondisi kesehatan keluarga tersebut. Semakin baik kondisi ekonomi seseorang (keluarga) biasanya memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu maka perlu dipikirkan bagaimana memberikan akses pelayanan kesehatan yang baik (kesehatan dasar dan rujukan) bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi keluarga miskin.

Untuk penyakit tertentu Kota Cimahi merupakan Daerah Endemis, misalnya untuk kasus demam berdarah Kota Cimahi Merupakan daerah tertinggi di Jawa Barat, bahkan berstatus KLB. Jumlah kasus terbesar terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 2.376 kasus.

Gambar 2.9
Kasus DBD Kota Cimahi Tahun 2004 – 2009



Sumber : Dinkes Kota Cimahi tahun 2010

Dari grafik di atas terlihat bahwa Jumlah kasus demam berdarah memiliki kecenderungan meningkat di Kota Cimahi dari tahun 2005 sampai dengan 2009, walaupun pada tahun 2008 berhasil diturunkan tapi kembali terjadi kenaikan di tahun 2009 oleh karena itu berbagai upaya perlu dilakukan untuk menurunkan jumlah kasus dimas mendatang.

Pemerintah menyadari tidak mungkin membangun dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu menjadi salah satu tantangan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan

peran serta masyarakat dalam berbagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat Kota Cimahi melalui Posyandu, Posbindu, Kota Siaga, dan Kota Sehat.

Pada dasarnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbagi dua yaitu pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik. Untuk pelayanan kesehatan dasar dilayani oleh Puskesmas, sementara pelayanan kesehatan rujukan dilayani oleh Rumah Sakit. Walaupun pada saat ini Kota Cimahi telah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan sudah cukup baik dengan 13 puskesmas dan satu Rumah Sakit pemerintah tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kota Cimahi, seperti belum tersedianya *Labkesda*, fasilitas *NICU* dan beberapa fasilitas medis lainnya.

Kualitas pelayanan di Puskesmas umumnya sudah relatif baik, akan tetapi tetap perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas pelayan kesehatan rujukan/spesialistik juga perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan secara prima, yang kemudian mewujudkan *customer satisfaction* (kepuasan pasien) dan *Customer loyalty* (loyalitas pasien) pada RSUD milik pemerintah.

Khusus untuk rumah sakit, selain masalah sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan sebagai rumah sakit rujukan keberadaan tenaga dokter spesialis dan tenaga medis lainnya perlu dilakukan peningkatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Walaupun secara umum telah terjadi peningkatan SDM di bidang kesehatan pada Puskesmas/Dinkes dan RSUD Cibabat akan tetapi secara kuantitas masih belum memadai, sehingga perlu dilakukan upaya penambahan jumlah tenaga kesehatan guna meningkatkan pelayanan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Secara kualitas SDM tersebut perlu terus ditingkatkan kemampuan medisnya dan kemampuan non medis (*soft skill*) seperti kemampuan pelayanan prima, kemampuan manajerial dan kemampuan penanganan pasien.

Pemerintah menyadari tidak mungkin membangun dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa peran serta aktif dari masyarakat. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat Kota Cimahi melalui Posyandu, Posbindu, Kota Siaga, dan Kota Sehat.

2.2.3 Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial

Pada tahun 2025 jika memakai asumsi laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2005 sampai 2009 yang sebesar 4,15%, jumlah penduduk Kota Cimahi akan

meningkat menjadi 1.148.055 jiwa. Jumlah ini sangat besar jika mengingat luas wilayah Kota Cimahi yang kecil dan sangat sedikit potensi perkembangannya. Jumlah penduduk yang sangat besar ini pada gilirannya akan menciptakan berbagai permasalahan baik fisik, sosial maupun ekonomi. Karena itulah maka pengendalian jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya perlu diperhatikan untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing dan kesejahteraannya. Selain itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara wilayah-wilayah di Kota Cimahi dapat dikurangi.

Terkait dengan pembangunan yang diwujudkan bersama dengan masyarakat, pembangunan sektor agama mesti didorong untuk menciptakan kondisi terbaik bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, pengkajian dan aplikasi ajaran agama, pengembangan seluruh potensi umat dalam menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional, pengelolaan sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut merupakan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang keagamaan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sosial adalah akan terus tumbuhnya permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial sebagai eksekusi dari perkembangan Kota Cimahi. Upaya yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penggalian dan pendayagunaan potensi yang dimiliki dalam upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan yang semakin kondusif dan berdaya guna.

Tantangan ketenagakerjaan yang tetap akan bersifat klasik adalah masih tidak seimbangnya antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan inilah yang pada akhirnya akan menciptakan pengangguran. Di luar masalah klasik itu, tantangan lain yang lebih spesifik antara lain adalah masih terbatasnya kemampuan keterampilan dan pengetahuan pencari kerja dan juga belum adanya fasilitasi yang baik dalam hal peluang kerja di luar negeri. Dalam hubungan industrial, selalu adanya perbedaan penafsiran antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja mengenai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga akan menjadi tantangan tersendiri ke depannya.

Untuk itulah maka diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dalam usaha mengatasi tantangan-tantangan ketenagakerjaan tersebut.

2.2.4 Keagamaan

Pembangunan disektor agama didorong untuk menciptakan kondisi terbaik dalam pengamalan nilai-nilai agama dilingkungan komunitas terkecil yaitu keluarga. Bersamaan dengan itu keluarga merupakan awal dari pendidikan agama hal ini dibuktikan dengan semakin banyak arus informasi dan budaya asing yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Disamping itu tantangan pembangunan di Kota Cimahi yaitu belum terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai, belum dilakukannya kajian dan aplikasi ajaran agama, belum optimalnya kerukunan intern antar umat beragama secara fungsional dan proporsional serta sumber dana umat yang belum dikelola dengan baik.

2.2.5 Pemuda dan Olah Raga

Tantangan pembangunan di bidang kepemudaan adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, menstabilkan kondisi perkembangan psikologis pemuda, dan melemahnya sandaran nilai dan norma, banyaknya kompetisi yang diakibatkan karena arus globalisasi, serta pelestarian karakter, idealisme dan budaya bangsa. Tantangan pembangunan dibidang olah raga adalah belum bisa dirasakannya pembinaan keolahragaan yang komprehensif dan berkesinambungan agar seluruh potensi olah raga dapat dikembangkan secara baik, penguatan peran dan tanggung jawab masyarakat beserta pemangku pembangunan untuk mengembangkan sarana dan prasarana keolahragaan misalnya dengan melalui pembangunan Gelanggang Olah Raga yang terpadu dan representatif. Di samping itu, harus ditumbuhkembangkan manajemen peningkatan kualitas atlit secara komprehensif, terpadu dan standar internasional.

2.2.6 Kebudayaan

Kondisi pembangunan selama beberapa tahun terakhir mengalami berbagai perubahan. Hal ini merupakan pengaruh global dunia yang sekaligus menjadi tantangan bagi terwujudnya pembangunan seni budaya pada tahun 2025. Tantangan pembangunan seni dan budaya selama 20 tahun ke depan adalah harus adanya upaya konkrit yang berkesinambungan dalam pelestarian nilai-nilai

tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman. Pada masa yang akan datang perkembangan ke 4 aspek tersebut semakin bertentangan dengan arus perkembangan teknologi informasi dan era komputerisasi. Tantangan tersebut harus dihadapi dengan upaya yang konkrit dan berkesinambungan terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa dan budaya daerah diantaranya melalui pendidikan dengan menyusun, mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang menunjang pelestarian seni dan budaya. Selain itu diperlukan upaya revitalisasi terhadap lembaga/organisasi kesenian yang didukung sepenuhnya oleh seluruh pemangku pembangunan yang terdiri dari Pemerintah selaku fasilitator, Pelaku/Pengusaha Industri Pariwisata dan Masyarakat sendiri, juga upaya pelestarian cagar budaya dan pembuatan Pasar Wisata serta revitalisasi kawasan Cireundeu.

2.2.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tantangan di bidang pembangunan perempuan adalah meningkatkan kualitas gender di berbagai bidang sebagaimana yang tercantum dalam MDGS (Milenium Development Goals), yaitu peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, penurunan tindak kekerasan, penurunan eksploitasi, penurunan trafficking, serta menurunkan tindak diskriminasi perempuan dalam dunia usaha dan politik melalui penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat khusus perempuan, dan jaringan kemitraan pengarusutamaan gender.

2.2.8 Ekonomi

Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin terus berkurang.

Pembangunan ekonomi Kota Cimahi dua puluh tahun mendatang dihadapkan pada tantangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cimahi tahun 2005–2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,56% sampai 5,96%. Struktur ekonomi Kota Cimahi ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor Jasa, industri, perdagangan, dan pertanian. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi Daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi Kota Cimahi. Penguatan ekonomi lokal yang ditopang oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis inovasi daerah dalam teknologi dan pasar.

Tantangan peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur kota, ketersediaan lahan, perburuhan dan masalah lainnya termasuk proses perizinan pembangunan. Pemecahan masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investor agar dapat menanamkan modalnya di Kota Cimahi. Upaya promosi investasi juga menjadi faktor penentu untuk menarik investasi baru.

2.2.8.1 Sektor Pertanian

Dengan melihat bahwa pernah terjadinya pertumbuhan negatif pada tahun 2005-2006 dan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil pada tahun 2008 bila dibandingkan pada tahun 2001, mengindikasikan secara langsung bahwa produksi di sektor ini menunjukkan kecenderungan yang menurun sehingga pemenuhan kebutuhan primer penduduk Kota Cimahi dipasok (diimpor) dari luar daerah Kota Cimahi. Oleh karenanya, perubahan harga bahan-bahan kebutuhan pokok perlu diawasi mengingat ketergantungan yang besar terhadap daerah-daerah pertanian di sekitar Kota Cimahi. Kebijakan *supply side* yaitu cadangan pangan (*buffer stock*) dan operasi pasar terhadap harga-harga kebutuhan-kebutuhan sandang harus dilakukan secara lebih baik karena hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Kota Cimahi. Jalur distribusi produk pertanian dan barang-barang kebutuhan pokok juga harus diperhatikan karena hal ini akan mempengaruhi harga-harga secara umum.

Menurunnya tingkat pertumbuhan sektor ekonomi juga memiliki korelasi terhadap tingginya angka kemiskinan di Kota Cimahi. Hipotesa ini harus dibuktikan lebih lanjut mengingat adanya indikasi usaha pertanian yang dilakukan selama ini bersifat subsisten. Pertanian ini secara umum hanya berorientasi untuk

pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani tanpa menghasilkan surplus yang lebih lanjut untuk di jual baik di dalam maupun ke luar daerah Kota Cimahi.

Tantangan utama dalam pengembangan pertanian di Kota Cimahi ini adalah ketersediaan lahan yang sangat kecil, namun demikian produktivitas diharapkan terus meningkat dari sektor pertanian. Untuk itu Kota Cimahi berusaha untuk mengadakan program pemanfaatan lahan tidur yang tersebar disela-sela pemukiman atau pabrik industri dengan harapan lahan tersebut menjadi lebih produktif. Selain itu rendahnya sumberdaya manusia di sektor pertanian akibat berkurangnya minat dan ketersediaan sekolah kejuruan serta pendidikan dan latihan (diklat) di bidang pertanian, rendahnya skala usaha tani, dan rendahnya penghargaan terhadap petani serta lemahnya akses petani terhadap teknologi baru, permodalan, informasi, dan pasar. Pada sisi lain pengembangan sarana dan prasarana yang ada relatif belum dapat memperbaiki kinerja pertanian, peningkatan kesempatan kerja maupun pengurangan kemiskinan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar subsistem dalam sistem pertanian, serta menumbuhkembangkan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan dan budaya pertanian.

Hal ini berdasarkan perkiraan bahwa tingkat kebutuhan konsumsi pangan di masa yang akan datang untuk beberapa komoditi relatif akan meningkat secara perlahan. Peningkatan ini berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan penduduk serta proyeksi tingkat konsumsi per kapita per tahun.

Selain itu bisnis perikanan di masa mendatang akan dihadapkan pada Pengembangan pemasaran melalui Pasar Benih Ikan untuk pemenuhan kebutuhan wilayah regional melalui pengembangan usaha budidaya perikanan.

Dengan demikian pengembangan pertanian sebaiknya diarahkan kepada aktifitas usaha pertanian yang memberi nilai tambah seperti usaha Ikan hias, sayuran holtikultura, sayuran organik dengan menerapkan model pertanian *off farm*, seperti penggunaan *poly-bags* pada lahan yang terbatas. Pengembangan sektor pertanian dalam jangka panjang juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kota dan mendukung perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi sekunder kepada struktur ekonomi tersier.

2.2.8.2 Pertambangan dan Penggalan

Sampai saat ini belum ditemukan potensi bahan tambang/galian di wilayah Kota Cimahi.

2.2.8.3 Industri Pengolahan

Nilai rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan relatif terus bertahan secara stabil. Meskipun ada perusahaan-perusahaan yang tutup, namun banyak juga perusahaan-perusahaan yang bertahan dengan melakukan upaya efisiensi produksi atau dengan menambah investasi modal kerja sehingga masih tetap terus memproduksi. Ini terjadi karena industri di Kota Cimahi telah menunjukkan adanya aglomerasi ekonomis. Akan tetapi kelangsungan industri ini dipertanyakan mengingat daya tampung lingkungan (*environment yield*) yang terus berkurang, adanya eksternalitas negatif dari pencemaran serta terus bertambahnya jumlah penduduk, semakin terbatasnya ruang (lahan) di Kota Cimahi dan terbatasnya sumberdaya air bawah tanah.

Dengan demikian upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan penguasaan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian diharapkan sektor industri tetap menjadi penggerak utama perekonomian Kota Cimahi dengan struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar domestik dan internasional. Selain itu pengembangan kegiatan industri yang lebih ramah lingkungan hendaknya menjadi perhatian dalam jangka panjang ke depan.

Dari data jangka panjang juga diketahui bahwa industri pengolahan di Kota Cimahi telah mencapai titik optimumnya dan hal ini harus diantisipasi dari berlakunya hukum pertambahan nilai yang menurun (*law of diminishing return*) di mana penambahan salah satu faktor produksi justru akan menyebabkan pertambahan produksi yang terus menurun. Oleh karenanya perlu dikembangkan sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan seperti sektor perdagangan, jasa-jasa, dan keuangan, persewaan dan perusahaan, listrik, air dan gas. Sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi riil Kota Cimahi selama tahun 2000 hingga tahun 2008.

2.2.8.4 Listrik, Gas dan Air Bersih

Seiring terus bertambahnya jumlah penduduk di Kota Cimahi maka kebutuhan akan listrik, gas dan air bersih pun akan semakin meningkat sehingga pemenuhan akan kebutuhan tersebut perlu mendapat perhatian penting.

Walaupun demikian diharapkan pertumbuhan kebutuhan akan listrik, gas dan air bersih dapat ditekan melalui pemakaian yang efektif dan efisien.

2.2.8.5 Bangunan / Konstruksi

Rendahnya laju pertumbuhan sektor bangunan dan konstruksi diduga memiliki korelasi dengan terbatasnya ruang di Kota Cimahi. Pembangunan yang dilakukan secara vertikal diharapkan dapat mendongkrak pembangunan konstruksi/bangunan yang dilakukan di Kota Cimahi. Selain itu perlu di buat terobosan baru untuk mengatasi keterbatasan ruang dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi. Dengan membangun pusat pertumbuhan dan pusat pembangunan baru sehingga dapat memberikan pemerataan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan peruntukan ruang kota.

Melihat perkembangan perekonomian di CBD (*central business district*) yang ada sekarang maka pengembangan ruang di Kota Cimahi sebaiknya mengikuti pola pemanfaatan ruang *multiple-nuclei* dimana terdapat lebih dari satu pusat komersial (*commercial centers or satellite communities*) yang tersebar di dalam kota. Menurunnya daya tampung lingkungan sebagai akibat dari aktifitas industri yang banyak menggunakan sumber daya air telah mendorong usaha agar kawasan sekitar Cimahi Selatan dapat dikembangkan menjadi pusat pembangunan baru dan salah satu lokasi yang paling dimungkinkan untuk dikembangkan adalah pada daerah sekitar pintu keluar-masuk tol Cimahi. Dengan pola campuran (*mixed-use*) pemanfaatan ruang, sebagai pusat kegiatan pengembangan industri berbasis teknologi dan industri kreatif, maka kawasan *new central business district* yang akan dibangun di daerah Baros ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi.

2.2.8.6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pertumbuhan dua dari tiga sub sektor, yakni sub sektor perdagangan dan sub sektor restoran, berada di atas pertumbuhan ekonomi kota. Sementara itu untuk sub sektor hotel walaupun secara rata-rata masih di bawah pertumbuhan rata-rata ekonomi kota tetapi pada tahun 2008 telah tumbuh mencapai hampir tiga kali lipat dari pertumbuhan kota. Sehingga sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan dan mendongkrak sumber pendanaan pembangunan dari daerah sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun tantangan ke depan untuk pengembangan perdagangan di Kota Cimahi adalah difokuskan peningkatan akses pasar ekspor diiringi dengan peningkatan kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan

ekspor. Selain itu, untuk penguatan perdagangan ditujukan untuk peningkatan sarana distribusi barang, penguatan pasar domestik, menggalakkan pemberdayaan produk lokal dan peningkatan perlindungan konsumen.

Dengan demikian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota yang lebih besar lagi maka sektor-sektor yang memberikan nilai tambah lebih (*added value*) seperti sektor perdagangan dan jasa perlu didorong mengingat kemampuan sektor industri pengolahan telah berada pada titik stagnan (titik optimum penggunaan faktor produksi). Oleh karena itu, penataan ruang dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan harus dilakukan secara terpadu sehingga sektor perdagangan dapat tumbuh lebih besar lagi.

2.2.8.7 Pengangkutan dan Komunikasi

Dengan jumlah penduduk yang besar sektor ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan terutama untuk angkutan jalan raya dan komunikasi.

2.2.8.8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Lebih cepatnya pertumbuhan sektor lembaga keuangan lainnya dibandingkan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi riil Kota Cimahi dapat dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan perkoperasian di Kota Cimahi. Tetapi dengan melihat tingginya angka pertumbuhan sektor perbankan yang ternyata tidak diikuti oleh besarnya kontribusi terhadap PDRB maka terdapat kecenderungan bahwa usaha yang dilakukan perbankan di Kota Cimahi hanya berupa simpan-pinjam dalam jumlah yang relatif kecil. Diharapkan keberadaan perbankan di Kota Cimahi hendaknya juga digunakan oleh para exportir dan importir dalam mengurus LC (*letter of credit*) ataupun fasilitas keuangan lainnya untuk mendukung aktifitas perdagangan internasional (ekspor-impor) yang dilakukan oleh perusahaan industri, terutama industri tekstil yang ada di Kota Cimahi dan kawasan cekungan Bandung dan Priangan.

Selain hal tersebut, sangat cepatnya pertumbuhan ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Cimahi telah menjadi cenderung konsumtif dan perkiraan ini harus dibuktikan dengan mengetahui pola pengeluaran konsumsi penduduk Kota Cimahi. Bila terbukti benar demikian, perlu kiranya mendapat perhatian dan penekanan ke arah produktivitas.

2.2.8.9 Jasa – Jasa

Peluang untuk mengembangkan jasa hiburan dan rekreasi sangat besar mengingat jumlah potensi sumber daya manusia dan jumlah pangsa pasar yang cukup besar di sekitar Kota Cimahi. Pengembangan sektor jasa dan perdagangan tampaknya menjadi pilihan untuk mendorong pembangunan Kota Cimahi dari struktur sekunder ke struktur tersier. Akan tetapi, perubahan struktur perekonomian akan memakan waktu yang lama dan tidak hanya memerlukan kebijakan penataan ekonomi kota tetapi juga *social engineering* agar masyarakat siap terhadap perubahan struktur ekonomi tersebut.

Tantangan pengembangan pariwisata dua puluh tahun mendatang adalah mewujudkan Kota Cimahi sebagai daerah kunjungan wisata. Potensi wisata Kota Cimahi cukup banyak dengan objek wisata yang variatif. Guna mendukung pertumbuhan wisatawan ke Kota Cimahi, maka pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata yang berakar pada potensi Kota Cimahi yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata.

Pengembangan *Baros Information and Technology Centre BITC* (BITC) diharapkan dapat memicu bangkitnya aktifitas ekonomi kota. Selain itu, pengembangan kawasan ini diharapkan dapat menjadi *brand image* bagi identitas lokal kota. Juga bersamaan dengan pembangunan pusat kawasan wisata lainnya tampaknya sudah menjadi pilihan yang tepat mengingat industri berbasis kreatif ini ramah lingkungan, mampu menggali potensi kreatifitas penduduk, memberikan dampak yang besar bagi bangkitnya sektor perekonomian lainnya seperti UMKM, perdagangan, sub-sektor komunikasi, hotel dan restoran.

Analisa naratif di atas akan diuji secara empiris dengan cara membangun sebuah persamaan ekonometrika sehingga dapat tergambarkan secara umum struktur ekonomi Kota Cimahi.

Sektor primer terdiri atas sub-sektor Pertanian dan Pertambangan, sementara Sektor Sekunder terdiri atas sub-sektor Industri, Listrik gas dan Air, serta bangunan, dan Sektor Tersier terdiri dari sub-sektor perdagangan, pengangkutan, lembaga keuangan, dan jasa-jasa.

Dari hasil regresi diketahui bahwa pada persamaan tersebut terdapat *multicolinearity* sehingga variable KST_t harus dikeluarkan dari persamaan tersebut dan berdasarkan persamaan tersebut selama kurun waktu 2000-2008 diketahui bahwa kenaikan 1% kontribusi Sektor Primer akan menyebabkan *perlambatan* terhadap pertumbuhan ekonomi kota sebesar 0.166%. Hal ini terjadi karena:

- 1) Pertanian yang dilakukan di Kota Cimahi sangat tergantung kepada lahan. Mengingat keterbatasan lahan di Kota Cimahi maka perluasan areal tanam

(ekstensifikasi lahan) justru akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan perekonomian kota.

- 2) Model pertanian yang dilakukan selama ini kurang memberikan nilai tambah dan cenderung bersifat subsisten karena sebagian besar petani yang mengolah lahan pertanian adalah buruh tani penggarap sawah.
- 3) Mengingat pentingnya sektor pertanian bagi penyediaan kebutuhan makanan penduduk kota maka jika pertanian hendak dikembangkan model pertanian yang lebih tepat adalah model pertanian yang berorientasi kepada pasar dengan menerapkan model pertanian agribisnis, agronomi, hortikultura ataupun model *off farm* lainnya. Selain itu, untuk melindungi cagar budaya setempat masih tetap dilanjutkan pola pertanian primer yang telah ada.

Sementara itu, dari hasil regresi dapat informasi bahwa pengaruh kontribusi Sektor Tersier terhadap pertumbuhan ekonomi kota adalah signifikan dan peningkatan 1% kontribusi Sektor Tersier akan menyebabkan naiknya pertumbuhan ekonomi kota sebesar 0.777%, variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).

Untuk sektor sekunder diketahui bahwa pengaruh kenaikan kontribusi sektor ini adalah cukup signifikan dengan hubungan yang berbanding terbalik. Kenaikan 1% kontribusi Sektor Sekunder akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi kota sebesar 0.917%. Walaupun kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi kota cukup signifikan sebesar 72,8% ternyata sektor ini telah menunjukkan terjadinya *hukum pertambahan yang semakin berkurang*.

Mengingat besarnya penduduk Kota Cimahi yang sangat tergantung terhadap sektor manufaktur maka kebijakan peningkatan produktifitas Sektor Sekunder sangat perlu diantaranya:

- 1) Hubungan industrial termasuk didalamnya adalah masalah perburuhan dan penetapan upah minimum kota.
- 2) Identifikasi peran sektor kreatif terutama yang berkaitan dengan industri manufaktur terutama industri garmen yang ada di Kota Cimahi dan pengaruhnya terhadap perekonomian kota.
- 3) Distribusi pendapatan karena masih tingginya kinerja ekspor industri manufaktur ternyata tidak diikuti oleh membaiknya kemampuan daya beli penduduk Kota Cimahi, hal ini juga ditunjukkan oleh tidak bekerjanya variabel-variabel penentu aggregate demand jika variabel dependent yang digunakan adalah rata-rata pendapatan perkapita riil.

- 4) Monitoring terhadap kegiatan ekspor-impor yang dilakukan perusahaan-perusahaan manufaktur.
- 5) Masalah hubungan industrial terutama sebagai akibat dari perubahan perekonomian global dan diberlakukannya China-Asean Free Trade.

Dari hasil analisa model ekonometrika pengaruh kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi kota secara umum dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Sektor Primer tidak secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan oleh karenanya model pembangunan pertanian di Kota Cimahi harus dirubah dengan mengembangkan model pertanian yang lebih memberikan nilai tambah seperti model pertanian agronomi, hortikultura, model-model pertanian *off farm* ataupun pertanian organik dengan pangsa pasar konsumen dengan pendapatan menengah ke atas. Pengembangan sektor pertanian ini sebaiknya difokuskan pada bagian utara kota sebagai kawasan Bandung utara (KBU) bersamaan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) terutama di kawasan Cimahi Tengah.
- 2) Industri manufaktur menampung/memberikan lapangan pekerjaan yang besar bagi penduduk Kota Cimahi sehingga hal-hal yang berkaitan dengan sektor ini akan berdampak besar dan memberikan pengaruh besar terhadap sebagian besar penduduk kota. Hubungan industrial menjadi perhatian yang besar.
- 3) Jumlah ekspor industri manufaktur yang besar ternyata tidak diikuti oleh meratanya distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi dengan demikian CSR (*Corporate social responsibility*) harus digalakkan secara lebih signifikan karena dengan demikian akan memperbaiki gap pendapatan di Kota Cimahi.
- 4) Melihat struktur ekonomi kota, maka pengembangan industri kreatif tampaknya menjadi pilihan yang tepat. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sektor-sektor dan potensi lokal yang telah ada dan mengemasnya dalam sebuah industri yang berbasis IT (*Internet and technology*). Identifikasi terhadap kontribusi sektor-sektor kreatif terhadap perekonomian kota juga harus dilakukan karena dengan demikian Badan Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi dapat menetapkan target dan sasaran pembangunan yang terukur yang hendak dicapai untuk selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan kota.
- 5) Perubahan struktur ekonomi akan memakan waktu yang panjang dan hal ini memiliki dampak yang lebih luas karena tidak hanya berpengaruh terhadap

perekonomian kota saja tetapi terhadap perubahan sosial dan budaya penduduk kota.

2.2.9 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Dalam rangka peningkatan kemampuan iptek pada 20 tahun mendatang tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan kemampuan penguasaan iptek yang ditunjang oleh peningkatan SDM yang berkualitas serta sinergisitas antara pemerintah, swasta, masyarakat, sarana prasarana dan pembiayaannya, pengembangan budaya iptek dikalangan masyarakat, meningkatkan komitmen terhadap pengembangan iptek, mengatasi degradasi fungsi lingkungan, mengantisipasi dan mengurangi dampak akibat bencana alam dalam kerangka menghadapi perkembangan global menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, oleh karena itu pembangunan iptek dalam 20 tahun mendatang harus didasari oleh nilai-nilai luhur yaitu akuntabilitas, inovatif dan visioner.

Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa. Tantangan lainnya adalah konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral.

2.2.10 Sarana dan Prasarana

Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah pengembangan sistem transportasi kota yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung

pembangunan ekonomi sosial dan budaya. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi kota adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air menjadi tantangan utama dalam menghadapi masalah banjir dan kekeringan. Tantangan lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku perlu didukung oleh pengembangan infrastruktur pengolahan sumber air baku yang dapat dikelola bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju daya rusak air, sedimentasi dan pencemaran air sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali, pengolahan dan pengelolaan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi.

Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah tidak adanya sumber daya alam, sehingga harus melakukan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk cadangan energi.

Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman serta masalah permukiman kumuh perkotaan adalah :

- 1) Meningkatkan penyediaan perumahan sederhana dan sehat secara vertikal terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 2) Mendorong peremajaan rumah tidak layak huni maupun kawasan permukiman kumuh perkotaan, menjadi hunian yang layak, sehat, dan tertata rapi;

- 3) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar air bersih, air limbah, persampahan dan drainase, yang dikelola secara komunal dan terintegrasi pada skala kawasan, perkotaan maupun regional;
- 4) Mendukung mekanisme regulasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat akan perumahan antara lain :
 - (a) Memberikan kemudahan dan insentif berkaitan dengan perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga terjangkau ;
 - (b) Menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah;
 - (c) Mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan
 - (d) Melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan keterbatasan sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana dasar masyarakat, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial, dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat. Peran aktif swadaya masyarakat untuk mendorong adanya rasa memiliki harus terus ditingkatkan agar hasil pembangunan yang dicapai merupakan suatu kebutuhan yang harus dipelihara bersama. Selain itu untuk mengatasi pembiayaan pembangunan di luar jangkauan batas kemampuan Pemerintah Daerah, perlu terus membuka peluang kerja sama dengan badan usaha terutama swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tidak menutup kemungkinan pembiayaan Cost Sharing antara Pemerintah - Swasta dan bentuk Investasi lainnya harus terus ditingkatkan, terutama untuk pembangunan yang memerlukan biaya tinggi dan perlu penyelesaian dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

2.2.11 Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasan kemampuan lahan, termasuk didalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan, (d) upaya terus menerus untuk membangun Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas kota sesuai dengan ketentuan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang serasi, dalam arti tidak saling bertabrakan antarsektor, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.

Tantangan yang dihadapi di masa depan untuk lingkungan hidup adalah bagaimana menyeimbangkan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, agar didorong penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk menginventarisir ekoregion Kota Cimahi. Program-program yang akan dilaksanakan harus dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan sudah menjadi isu global dan program pengendalian kerusakan lingkungan juga menjadi prioritas utama dunia.

Untuk pengendalian kerusakan lingkungan, tantangan utama yang dihadapi adalah penegakan hukum lingkungan. Perangkat hukum lingkungan harus diperkuat baik dari segi peraturan maupun pelaksanaan. Selain itu kerjasama antar daerah dalam pengendalian kerusakan lingkungan harus ditingkatkan, mengingat masalah lingkungan bukan hanya masalah bagi suatu daerah, tapi saling terkait antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Konservasi sumber daya alam juga menjadi tantangan utama bagi sektor lingkungan hidup. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu cara dalam konservasi sumber daya alam, dimana pemanfaatan sumber daya alam direncanakan dengan baik dan disertai dengan upaya-upaya pemulihan sumber daya alam tersebut.

2.2.12 Politik

2.2.12.1 Kehidupan Berpolitik

Tantangan terbesar dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik di Kota Cimahi adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah mengefektifkan struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.

Tantangan demokrasi lainnya adalah masih belum kuatnya kemampuan masyarakat (*civil society*), baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar serta saling berinteraksi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pasar untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Kemandirian asosiasi sosial kemasyarakatan dan kelompok kepentingan untuk berperan baik sebagai *counterpart* pemerintah ataupun mediator dan advokator masyarakat diperlukan untuk mendorong akselerasi proses konsolidasi demokrasi sesuai dengan mekanisme fungsi kontrol dalam hubungan kekuasaan yang seimbang.

Bersamaan dengan itu, tantangan dalam menjaga proses konsolidasi demokrasi juga muncul dalam hal mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan secara profesional.

Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi di tingkat daerah. Adanya kebebasan pers/media massa akan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi.

2.2.12.2 Partisipasi Politik

Proses penyelenggaraan konsolidasi demokrasi akan memerlukan dukungan seluruh masyarakat. Melalui keleluasaan dalam menggerakkan dan mengolah segenap sumber daya yang dimiliki, Kota Cimahi mempunyai kesempatan, peluang, dan tantangan untuk saling bersaing dan atau berkolaborasi dengan kabupaten/kota lainnya baik dalam skala regional, nasional maupun internasional. Ini semua memerlukan kebijakan pemerintah yang reformis dan visioner dengan dukungan aparat birokrasi (lembaga eksekutif) yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas, dan mandiri serta mengedepankan prinsip-prinsip *good governance and clean government* serta bebas KKN. Peningkatan kualitas kinerja aparat pemerintah sebagai pelayan publik (*public servicer*) sekaligus fasilitator dan mediator bagi lembaga-lembaga demokrasi dibutuhkan guna mendukung proses konsolidasi demokrasi yang tengah berlangsung.

Tantangan lainnya adalah meningkatkan peran dan fungsi lembaga legislatif yang meliputi legislasi, *budgeting*, dan pengawasan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaannya (*institution capacity building*) sesuai dengan lingkungan strategis yang melingkupinya. Dengan begitu daya respon dan daya tanggap terhadap tuntutan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat menjadi meningkat sehingga tingkat keterwakilan/representasi politik dan kredibilitasnya akan semakin tinggi pula. Sebagai bentuk akuntabilitas publik maka kontrak-kontrak politik dengan konstituen yang telah terbangun benar-benar diakomodasikan, diartikulasikan, dan diimplementasikan melalui inisiatif dan diskresi yang dimilikinya untuk diformulasikan dalam suatu kebijakan publik yang memihak rakyat.

2.2.13 Hukum dan HAM

Tantangan ke depan dalam pembangunan hukum di daerah adalah dalam mewujudkan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. Proses formulasi peraturan daerah merupakan kebijakan publik di tingkat lokal yang dalam penyelenggaraannya akan menghadapi tantangan-tantangan antara lain:

- 1) Perlunya upaya peningkatan kualitas baik dari sisi formal dan materil produk kebijakan publik di daerah.
- 2) Perlunya optimalisasi uji publik terhadap raperda sebagai bahan daftar inventaris masalah karena keterlibatan masyarakat dalam proses

penyusunan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat banyak terkadang masih berjalan sekedar formalitas.

- 3) Perlu adanya peningkatan kemudahan akses dan perluasan daya jangkau diseminasi kebijakan publik bagi masyarakat terhadap keluaran Peraturan Daerah disamping wahana sosialisasi yang telah dilaksanakan selama ini.
- 4) Penetapan skala prioritas pembahasan selain mengacu kepada agenda pemerintah, sebaiknya juga mengakomodasikan masalah-masalah publik yang urgen dan menyangkut hajat kepentingan masyarakat luas serta merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang membutuhkan payung hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pembangunan Bidang Hukum dan HAM di daerah diarahkan pada harmonisasi produk hukum untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, penegakan hukum dan hak asasi manusia. Namun, dengan adanya demokrasi mendorong pergantian berbagai aturan perundang-undangan mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah dan pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan sering berubah-ubahnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala. Peraturan perundang-undangan yang baru selain ada yang saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut membuat daerah menjadi sulit untuk menindaklanjutinya menjadi peraturan daerah. Sampai dengan tahun 2009 masih terdapat peraturan daerah yang belum dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kondisi demikian akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan sangat berpengaruh pada kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu tantangan ke depan dalam pembangunan hukum di daerah adalah mewujudkan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran melalui proses penyusunan produk hukum yang aspiratif dan partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman sehingga dapat meningkatkan kualitas legislatif daerah. Proses penetapan kebijakan publik juga harus dilakukan secara transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme para penegak hukum yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika, dan moral yang tinggi; perlakuan yang sama bagi semua orang di depan hukum; konsistensi perlindungan HAM bagi mereka yang berperkara; serta tingginya kesadaran hukum masyarakat.

Namun demikian, dalam konteks penegakan supremasi hukum positif yang berlaku secara nasional (di luar Peraturan Daerah) dalam prakteknya sangat

ditentukan oleh adanya koordinasi, kerjasama, dan pelibatan aparat penegak hukum yang note bene merupakan instansi vertikal di daerah dimana pengaturan kewenangan dan kelembagaannya merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pada tataran ini tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan intensitas dan ekstensitas pelaksanaan koordinasi, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelanggaran hukum dan ancaman atau gangguan terhadap integrasi dan stabilitas daerah.

2.2.14 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2.2.14.1 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Tantangan utama keamanan dan ketertiban di Kota Cimahi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah mempertahankan stabilitas daerah yang telah tercipta selama ini agar disesuaikan dengan perkembangan tingkat kecanggihan metode dan alat teknologi yang diperkirakan akan semakin meningkat pada masa mendatang. Potensi dan ancaman tersebut adalah kejahatan narkoba, terorisme, konflik dan kerawanan sosial yang menjurus kepada kekerasan dan anarkisme, serta berkembangnya kualitas dan kuantitas tindak kriminalitas.

Tantangan lain dalam pembangunan keamanan dan ketertiban adalah meningkatkan profesionalisme aparat keamanan agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas. Selain itu, juga perlu membangun kapabilitas lembaga intelejen dan konstraintelejen tingkat daerah dalam kerangka penciptaan keamanan nasional.

2.2.14.2 Antisipatif dan preventif

Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, termasuk pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) adalah dengan melakukan intensifikasi upaya pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam konteks ini, diperlukan langkah guna meningkatkan profesionalisme serta menyatupadukan komitmen untuk membangun pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari SDM aparat kamtibmas, linmas, dan aparat pendukung lainnya dengan disertai peningkatan kelengkapan dan kualitas

peralatan kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Tantangan lainnya adalah melakukan penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan pola *bottom-up*, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat operasionalisasi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, termasuk didalamnya adalah penyiapan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Dalam kerangka menciptakan kepastian dan tertib hukum, upaya preventif melalui antisipasi dini dan cegah tangkal menjadi tantangan tersendiri yang harus diposisikan sebagai prioritas utama disamping penindakan melalui jalur hukum bagi kasus-kasus kriminalitas dan gangguan keamanan yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Terhadap masalah-masalah yang bersifat pelanggaran ketertiban dan ketidakdisiplinan harus diambil tindakan penegakan hukum dan operasi yustisi (penertiban) secara rutin dan periodik yang disertai dengan langkah-langkah alternatif pemecahan masalah lewat pembinaan dan pemberdayaan secara konstruktif dengan melibatkan berbagai unsur dan lembaga terkait.

Pada prinsipnya, semua tindakan yang diambil baik yang bersifat preventif, represif, dan kuratif itu tetap harus mengacu serta berpedoman kepada prinsip bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perlakuannya di depan hukum. Ini semua perlu ditempuh sebagai salah satu langkah dalam upaya menegakkan supremasi hukum di Kota Cimahi.

2.2.14.3 Peran Aparat dan Partisipasi Masyarakat

Pada sisi yang lain, terjadinya degradasi pemahaman wawasan kebangsaan menjadi tantangan yang serius dalam waktu mendatang. Dekadensi dan krisis terhadap nilai-nilai nasionalisme dan spirit kebangsaan harus dieliminasi atau setidaknya direduksi melalui perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa serta penanaman nilai-nilai luhur bangsa yang bersendikan ideologi Pancasila dan UUD 1945 secara substansial. Metode yang dilakukan haruslah dikemas dalam suasana dialogis, edukatif, atraktif, derivatif, dan variatif sehingga dimungkinkan munculnya diskresi, pencerdasan, dan pencerahan dalam memahami nilai-nilai ideologi bangsa sehingga tidak terkesan monoton dan bersifat indoktrinasi.

Tantangan lainnya adalah perlunya penyelenggaraan pendidikan multikultural dalam semua jalur pendidikan yang disertai dengan perkuatan nilai-nilai wawasan kebangsaan secara berkelanjutan (*sustainable*) sekaligus didukung adanya fasilitasi dan mediasi berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Dalam perspektif yang lebih

luas, tantangan dalam pembangunan keamanan dan ketertiban adalah mengurangi kesenjangan (gap) sosial ekonomi dalam masyarakat yang acap kali menjadi sumber perselisihan dan konflik sosial yang bersifat horizontal. Disamping itu juga mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Pada prakteknya upaya ini akan melibatkan banyak unsur dari berbagai sektor terkait.

Selain itu perlu dilakukan pula langkah penggalian dan revitalisasi budaya kearifan lokal sebagai nilai-nilai instrumental yang bisa dijadikan motor penggerak bermasyarakat dan berbangsa, seperti kejujuran, kerukunan, gotong royong, produktif, dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan dapat tumbuh dan berkembang budaya warga yang bermoral, sopan, taat hukum, serta bisa membangkitkan dan menggerakkan potensi kekuatan spiritual dan etos kerja masyarakat yang berbudaya dan beretika tinggi.

2.2.15 Aparatur

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kinerja sumber daya aparturnya. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat berbagai tantangan di bidang aparatur diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan pegawai yang kompeten bagi masing-masing SKPD dilakukan tiap tahun melalui jalur penerimaan TKK dan dari umum. Dalam mekanisme ini walaupun telah dilakukan sistem seleksi akan tetapi dengan sistem seleksi masal dan global tidak dapat menseleksi secara kompetensi personal secara spesifik, sesuai dengan karakter kompetensi yang dibutuhkan oleh SKPD. Oleh karena itu kondisi ini perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas SDA melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan, peningkatan pendidikan formal melalui tugas belajar, pembinaan kedisiplinan pegawai, peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan melalui berbagai diklat substantif, fungsional maupun struktural. Namun dengan adanya keterbatasan waktu, dana, dan kesempatan maka hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap. Walaupun upaya peningkatan kinerja dan kuantitas serta kualitas SDM telah dilakukan tetapi hal tersebut masih perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

Tantangan lainnya adalah pada saat ini sebagian masyarakat masih menilai etos kerja, budaya organisasi, profesionalisme dan pelayanan aparatur masih belum sesuai harapan, sehingga menimbulkan citra (*image*) aparatur masih belum baik. Kondisi seperti itu tidak hanya disebabkan dari aspek sumber daya aparatur saja (etos kerja, budaya organisasi, kinerja SDM) tetapi terkait dengan berbagai kebijakan di bidang aparatur, kelengkapan sarana prasarana dan

pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Peningkatan kinerja juga tidak lepas dari motivasi aparatur yang berkaitan dengan adanya *carrier path*, *reward & punishment* dan salah satunya indikasinya akan berdampak pada kesejahteraan pegawai.

Untuk itu perlu adanya upaya untuk memperbaiki citra tersebut diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur melalui berbagai kebijakan revitalisasi di bidang aparatur serta pengembangan sarana dalam upaya mewujudkan profesionalisme aparatur dalam rangka terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.16 Keuangan Daerah

Masih rendahnya rasio kemandirian daerah Kota Cimahi, ditunjukkan melalui capaian pendapatan daerah yang baru mencapai 74 milyar dari total belanja yang mencapai 600 milyar. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan anggaran daerah Kota Cimahi masih banyak tergantung pada Pusat, untuk itu diperlukan peningkatan sumber dana yang dapat dilakukan dengan optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi yang ada dengan tidak membebankan terhadap masyarakat.

2.3 MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain :

- 1) Karakteristik masyarakat Kota Cimahi yang beragam dan religius mendorong terciptanya kondisi yang kondusif dan juga merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pelaksanaan pembangunan;
- 2) Posisi geografis Kota Cimahi yang berbatasan dengan ibukota Provinsi Jawa Barat menjadikan Kota Cimahi sebagai penyangga dan menjadi lintasan utama arus regional penumpang dan barang Bandung – Jakarta, merupakan dasar dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah di berbagai aspek;
- 3) Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalam peningkatan investasi di Kota Cimahi;

- 4) Jumlah penduduk yang memiliki struktur umur produktif yang tinggi merupakan faktor positif yang perlu diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Cimahi.
- 5) Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kota Cimahi yang berada di atas rata-rata kualitas pendidikan dan kesehatan di Jawa Barat (berdasarkan komponen indeks pendidikan dan indeks kesehatan dari IPM).
- 6) Ketersediaan sumber daya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investor dan mempercepat proses pembangunan daerah;
- 7) Sumberdaya pariwisata yang cukup memadai sebagai modal untuk memberdayakan masyarakat;
- 8) Waktu perjalanan yang relatif singkat untuk mencapai Pusat Pemerintahan dari pelosok Kota Cimahi ataupun sebaliknya

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah telah mencapai kemajuan pada berbagai bidang. Namun demikian, masih ditemui berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun mendatang.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.1 Pendidikan

Permasalahan di bidang pendidikan menyangkut peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, mencakup; pengelolaan pendidikan dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah, peningkatan kualitas kurikulum dan relevansi pendidikan serta pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan peranserta masyarakat/lingkungan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud pembangunan pendidikan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi.

3.1.2 Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang kesehatan di Kota Cimahi lebih ditekankan kepada permasalahan dalam upaya-upaya preventif, maka dari itu permasalahan yang mengemuka adalah belum meratanya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat. Dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi Kota Cimahi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, Kota Cimahi mengalami beberapa permasalahan berkaitan dengan kesehatan lingkungan. dimana pada beberapa lokasi kepadatan tersebut sangat tinggi dan cenderung

menjadi kumuh dengan kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik kondisi ini menyebabkan belum meratanya pelaksanaan PHBS di masyarakat, terutama di lingkungan yang padat serta cenderung kumuh. walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat juga kelompok masyarakat ekonomi menengah atas yang belum menerapkan PHBS dengan baik.

Permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan pengetahuan masyarakat dan juga sumber daya manusia di bidang kesehatan yang belum merata dimana masih perlu ada peningkatan pengetahuan masyarakat dan SDM kesehatan di dalam proses mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, sehingga dalam pelayanan kesehatan yang diberikan tidak terjadi kesalahan-kesalahan penanganan yang dapat berakibat negatif.

Akses terhadap pelayanan kesehatan juga akan tetap menjadi permasalahan mengingat masih banyaknya penduduk yang hidup di dalam kemiskinan. Faktor ekonomi tetap akan menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh akses kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3.1.3 Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang kependudukan di Kota Cimahi adalah berkaitan dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Pada tahun 2025 jika memakai asumsi laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2005 sampai 2009 yang sebesar 4,15%, jumlah penduduk Kota Cimahi akan meningkat menjadi 1.148.055 jiwa. Jumlah ini sangat besar jika mengingat luas wilayah Kota Cimahi yang kecil dan sangat sedikit potensi perkembangannya. Jumlah penduduk yang sangat besar ini pada gilirannya akan menciptakan berbagai permasalahan baik fisik, sosial maupun ekonomi.

Di bidang sosial akan terjadi pertumbuhan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial sebagai eksese dari perkembangan Kota Cimahi.

Sementara permasalahan di bidang ketenagakerjaan tetap bersifat klasik dimana masih tidak seimbangnya antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Ketidakeimbangan inilah yang pada akhirnya akan menciptakan pengangguran. Di luar masalah klasik itu permasalahan lain yang lebih spesifik antara lain adalah masih terbatasnya kemampuan keterampilan dan pengetahuan pencari kerja dan juga belum adanya fasilitasi yang baik dalam hal peluang kerja di luar negeri. Dalam hubungan industrial, selalu adanya perbedaan penafsiran antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja mengenai peraturan perundangan-

undangan ketenagakerjaan juga akan menjadi permasalahan tersendiri ke depannya.

3.1.4 Keagamaan

Permasalahan di bidang keagamaan adalah menyangkut mewujudkan kerukunan antar umat beragama, disamping itu peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, pengkajian dan aplikasi ajaran agama, pengelolaan sumber dana keumatan yang dikelola berdasarkan ajaran agama, serta memberika rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan, sehingga tercapai suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

3.1.5 Pemuda dan Olah Raga

Permasalahan dalam bidang pemuda dan olahraga adalah menyangkut peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan baik ekonomi, social budaya, iptek dan politik serta peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Masih terbatasnya penyediaan ruang gerak untuk mengekspresikan idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik. Pembangunan keolahragaan saat ini belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlit yang menjadi tulang punggung Jawa Barat dalam pentas kompetisi olahraga nasional.

3.1.6 Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan terkait dengan adanya imbas perubahan global yang berpotensi menimbulkan pertentangan antara nilai-nilai tradisional dengan pengaruh global. Hal ini dapat mengancam kelestarian peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman. Permasalahan lainnya adalah lemahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi keragaman budaya yang dapat menimbulkan krisis jati diri dan berakibat timbulnya konflik sosial dan disintegrasi.

3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah mendasar yang dihadapi terkait isu gender dalam pembangunan adalah masih adanya kerancuan dalam memahami konsep gender, diabaikannya konteks dan dinamika serta isu gender dalam peran dan status gender serta dalam memformulasi kebijakan, perencanaan program kegiatan, dan penganggaran. Akibatnya adalah kebijakan yang disusun tidak responsif gender dan capaian pembangunan di berbagai bidang masih terlihat senjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peningkatan kelembagaan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sistem yaitu ketersediaan/pemutahiran *data base* yang terpilah menurut jenis kelamin; strategi PUG; *focal point*; dan kebijakan internal yang mendukung) serta jejaring yang efektif dari semua pelaku pembangunan.

Terkait tumbuh kembang anak, tujuan perkembangan manusia dalam proses normal adalah adanya integrasi antara anak dengan sistem keluarga dan lingkungannya (sistem sekolah, kehidupan kerja, peranan reproduktif/berkeluarga dan bermasyarakat). Terganggunya tumbuh kembang anak akan berimplikasi pada generasi mendatang. Untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dilakukan melalui pemenuhan hak-hak dasar anak, yaitu bertahan hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan, antara lain melalui belajar dan bermain, pemenuhan gizi, pengasuhan dengan kasih sayang, rasa hormat dan penghargaan terhadap anak, serta penciptaan rasa aman dan lingkungan tumbuh kembang yang aman.

3.1.8 Ekonomi

Terbatasnya ruang dan lahan serta tidak dimilikinya Sumber Daya Alam, menjadikan perekonomian Kota Cimahi harus berbasis pada ekonomi kreatif yang tidak terlalu mengandalkan faktor Sumber Daya Alam.

Disamping itu, perekonomian kota Cimahi tidak terlepas dari pengaruh /perkembangan perekonomian global, baik itu yang bersifat regional maupun internasional. Diantara isu-isu strategis dunia yang ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya kota Cimahi diantaranya :

- Serbuan produk-produk asing, khususnya produk China akibat dibukanya CAFTA (*China-ASEAN Free Trade Area*) bisa mengancam keberadaan industri dan produk-produk lokal.

- Anomali cuaca yang tidak menentu sebagai akibat dari fenomena *global warming* turut serta berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian, khususnya sektor pertanian yang akan berdampak pada sektor-sektor lainnya.
- Fluktuasi harga minyak dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi perekonomian kota Cimahi, khususnya sektor transportasi, industri, dan perdagangan.

3.1.8.1 Pertanian

Permasalahan pertanian jangka panjang di kota Cimahi adalah :

- Adanya keterbatasan lahan pertanian di Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan inovasi-inovasi teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada seoptimal mungkin untuk menghasilkan produksi pertanian yang maksimal menuju ketahanan pangan.
- Penanganan kasus atau wabah penyakit hewan di kota Cimahi merupakan salah satu permasalahan yang perlu dicermati, seperti kasus flu burung, rabies/anjing gila, flu babi dan lain-lain. Hal ini terjadi karena semakin bertambahnya penduduk Kota Cimahi , maka minat masyarakat untuk memelihara ternak-ternak *fancy* dan konsumsi terhadap daging akan semakin meningkat. Keberhasilan penanganan permasalahan ini bukan hanya karena dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah, namun dukungan dan kesadaran masyarakat yang kontinu melalui pembinaan yang intensif akan sangat membantu seperti kesadaran untuk memvaksinasi ternaknya dan membiasakan PHBS.
- Di bidang perikanan, permasalahan yang muncul adalah ketersediaan bibit ikan untuk wilayah kota Cimahi yang belum terpenuhi. Untuk jangka panjang, diupayakan Kota Cimahi dapat memanfaatkan keberadaan BBIAT dan PBI untuk produksi benih ikan.

3.1.8.2 Industri Pengolahan

Subsektor industri pengolahan seperti makanan, minuman, dan tembakau berdasarkan data PDRB riil kota Cimahi kurun waktu 2000-2008 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,32%. Hal ini disebabkan pada tahun 2004-2005 subsektor tersebut mengalami penurunan produksi yang sangat tinggi sebesar 86,1%. Disamping itu, adanya serbuan produk-produk asing, khususnya dari China menjadikan produk-produk industri lokal menjadi kalah berkompetisi. Hal ini perlu disikapi dengan modernisasi teknologi dan efisiensi produksi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah.

3.1.8.3 Pertambangan dan Penggalian

Kota Cimahi tidak mempunyai Sumber Daya Mineral sehingga sektor ini tidak berkembang.

3.1.8.4 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Pada sektor ini, khususnya sektor perbankan yang kontribusinya terhadap PDRB Kota relatif kecil (0,75%), terdapat kecenderungan bahwa usaha yang dilakukan perbankan di Kota Cimahi hanya berupa simpan-pinjam saja dalam jumlah yang relatif kecil. Disamping itu kalau dilihat dari laju pertumbuhan kredit pada perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya di Kota Cimahi, laju pertumbuhan kredit untuk konsumsi bertambah sangat cepat dengan rata-rata sekitar 41,9% pada tahun 2000-2005, jauh diatas laju pertumbuhan kredit untuk modal kerja yang hanya tumbuh sekitar 7,4%.

3.1.8.5 Listrik, Gas dan Air Bersih

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Kota Cimahi, maka semakin besar pula tuntutan akan ketersediaan Sumber Daya Air dan Listrik. Disamping itu program konversi minyak tanah ke gas, masih terhambat oleh beberapa hal antara lain kebocoran tabung gas dan budaya masyarakat yang belum siap sepenuhnya beralih ke penggunaan gas.

3.1.8.6 Bangunan / Konstruksi

Karena keterbatasan lahan, sektor bangunan/konstruksi di Kota Cimahi harus diarahkan pada pembangunan vertikal (rusunami, rusanawa)

3.1.8.7 Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pada sektor ini, perlu dikembangkan CBD baru selain Ganda Wijaya, sehingga kedepan sektor ini bisa lebih berkembang dan berkontribusi pada perekonomian Kota Cimahi.

3.1.8.8 Pengangkutan dan Komunikasi

Pada sektor ini, rasio jumlah jaringan jalan dan kendaraan bermotor yang semakin lama semakin tidak seimbang, menuntut pemerintah Kota menyediakan sarana transportasi massal yang murah, nyaman, dan efisien.

3.1.8.9 Jasa - Jasa

Pada sektor ini, dimasa yang akan datang peran pengeluaran pemerintah berupa APBD yang merupakan aktifitas Pemerintah Kota Cimahi yang berbentuk belanja jasa/barang seperti jasa percetakan, belanja barang modal, atau jasa pihak ketiga lainnya hendaknya bisa lebih ditangkap atau dikelola oleh perusahaan-perusahaan/instansi penyedia jasa/barang lokal di Kota Cimahi sehingga akan memberikan efek multifier kepada perekonomian Kota Cimahi secara keseluruhan.

3.1.9 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Permasalahan di bidang Iptek menyangkut Kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan IPTEK masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing, yang mencakup sumber daya IPTEK masih terbatas, mekanisme intermediasi yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia IPTEK dengan kebutuhan pengguna belum efektif, sinergi kebijakan yang lemah menyebabkan kegiatan IPTEK belum sanggup memberikan hasil yang signifikan, dan budaya pemanfaatan IPTEK belum berkembang serta belum terkaitnya hasil kajian dengan kebutuhan riil masyarakat.

3.1.10 Sarana dan Prasarana

Infrastruktur kota terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, sarana dan prasarana permukiman, sarana dan prasarana pelayanan publik.

a. Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi terdiri dari jalan dan perhubungan. Salah satu indikator keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah tingkat kemantapan jalan. Jaringan jalan di Kota Cimahi sepanjang 304 km, terdiri dari Jalan Tol 17 Km, Jalan Nasional/Provinsi 13,68 Km, Jalan Kota 127,456 Km dan jalan perumahan dan permukiman berupa gang 145,864 km. Sedangkan sampai dengan tahun 2008, tingkat kemantapan khususnya jalan kota sepanjang 127,456 Km telah mencapai 83, 45 % (kondisi baik dan sedang). Dengan tingkat kemantapan tersebut, 16,55% berada pada kondisi rusak dan rusak berat, yang

disebabkan beberapa faktor antara lain oleh beban lalu lintas yang melebihi standar muatan sumbu terberat, tingginya frekwensi curah hujan yang menyebabkan terjadinya penggerusan air ke badan jalan, serta belum optimalnya penanganan jalan kota.

Pola jaringan jalan di Kota Cimahi membentuk pola tulang ikan (*fish bone*), karena memiliki jaringan jalan yang memusat ke Jalan Raya Cimahi / Nasional Kota Cimahi sebagai jalan utama. Jalan ini harus menampung muara pergerakan internal / lokal dan juga pergerakan menerus. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan beban penggunaan jalan di jalan protokol tersebut terutama pada jam puncak.

Infrastruktur perhubungan di Kota Cimahi hanya melayani perhubungan darat. Pada infrastruktur perhubungan darat, terminal yang ada merupakan terminal tipe C yang sedikitnya melayani 35 trayek, baik itu trayek internal dalam Kota Cimahi yaitu sebanyak 4 (empat) trayek yang beroperasi, selebihnya adalah trayek yang melintas dan trayek yang hanya asal dan tujuannya di Kota Cimahi. Menumpuknya trayek-trayek tersebut di Kota Cimahi, menyebabkan ketidakteraturan transportasi Kota Cimahi. Ditambah dengan budaya dan kebiasaan pengemudi angkutan penumpang umum yang berhenti di sembarang tempat, bahkan menjadikan perempatan jalan sebagai terminal bayangan, hal ini jelas menambah masalah transportasi kota. Demikian pula halnya dengan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pagar pengaman jalan, terminal itu sendiri sebagai pertukaran moda juga belum optimal, sehingga menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban dan keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas.

Kondisi perparkiran di Kota Cimahi masih didominasi dengan parkir di badan jalan (*on street*) dengan pengelolaan yang dikerjasamakan dengan institusi non pemerintah. Hal ini jelas sangat mengganggu kelancaran lalu lintas secara umum, karena kapasitas jalan berkurang karena dipakai areal parkir. Permasalahan perhubungan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui pelaksanaan program-program pembangunan di bidang perhubungan. Pelaksanaan program-program pembangunan di bidang perhubungan ini dapat dikatakan cukup berhasil, dengan diraihnya penghargaan Wahana Tata Nugraha pada awal tahun 2009.

b. Infrastruktur Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur sumber daya air di Kota Cimahi, jaringan irigasi yang ada mempunyai dua fungsi, yaitu selain sebagai saluran pembawa air bagi pertanian juga berfungsi sebagai saluran pelimpas air hujan dan penggelontor. Jaringan drainase dan beberapa sungai yang melintas di Kota Cimahi menjadi

media tampungan air permukaan baik yang bersumber dari hulu sungai, mata air, hujan, dan buangan air domestik. Namun demikian secara sistem, jaringan drainase dan sungai yang ada belum mampu menampung dan berfungsi secara optimal manakala debit air maksimum melimpas pada saat tingginya intensitas curah hujan. Selain itu limpasan air hujan dari wilayah sekitar (Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung) juga menambah volume limpasan air hujan ke wilayah Kota Cimahi. Di sisi lain, kondisi saluran drainase yang ada tidak terpelihara, dimana terdapat banyak tumpukan sampah dan lumpur di dalam saluran drainase dan terdapatnya bangunan liar di atas saluran drainase dan badan sungai. Hal ini yang menyebabkan terjadinya genangan air dan bahkan banjir di beberapa titik kawasan. Sulitnya penyediaan lahan dalam mengembangkan pembangunan embung sebagai salah satu infrastruktur sumber daya air alternatif yang diharapkan dapat menampung air limpasan dan sekaligus berfungsi sebagai kantung air baku cadangan.

c. Infrastruktur Listrik dan Energi

Pada Infrastruktur listrik dan energi, pada tahun 2007 kebutuhan listrik bagi industri maupun rumah tangga di Kota Cimahi semakin terus meningkat, tercatat bahwa jumlah rumah tangga yang telah menikmati aliran listrik dari penerangan PLN sebanyak 134.748 rumah tangga atau sebesar 98,50 % dari 136.800 rumah tangga yang ada. Namun masih pula terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan jaringan listrik, karena ketidakmampuan finansial mereka. Untuk itu sampai tahun 2008, Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan kegiatan Penyediaan Listrik Pedesaan bagi 165 KK yang termasuk keluarga miskin. Pada tahun 2009, target pelayanan listrik pedesaan adalah sebesar kurang lebih 50 KK, sehingga sampai tahun 2009, Pemerintah Kota Cimahi telah menyediakan pelayanan listrik pedesaan bagi 215 keluarga miskin. Selain itu ketergantungan yang besar pada penggunaan bahan bakar minyak saat ini menjadi dilema. Di satu sisi daya beli masyarakat Kota Cimahi yang baru mencapai Rp 622.970,- hasil proyeksi tahun 2007, mendorong masyarakat lebih memilih BBM yang dianggap lebih murah. Namun di sisi lain BBM dalam skala nasional sudah mulai dikurangi untuk selanjutnya dialihkan pada penggunaan energi lain seperti gas. Hal ini terjadi karena sumber minyak bumi semakin berkurang sedangkan gas belum dimanfaatkan secara optimal.

d. Infrastruktur Telekomunikasi

Peranan Telekomunikasi dalam struktur perekonomian Kota Cimahi pun cukup dominan. Tanpa adanya kontribusi telekomunikasi, dunia usaha di kota ini

tidak akan maju seperti sekarang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan/efisiensi dan keandalan dalam memberikan jasa telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas telepon terpasang dan fasilitas telepon yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Jumlah rumahtangga yang telah memiliki telepon di Kota Cimahi sebanyak 49.389 rumahtangga, sedangkan fasilitas telepon lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat terdiri dari 3.355 wartel/Warnet dan telepon umum kartu/koin sebanyak 661 buah (Kota Cimahi Dalam Angka, 2008).

Jumlah pengguna telepon seluler di Kota Cimahi cukup banyak dan operator penyedia jasa telepon seluler pun beragam. Hal ini berdampak pada banyaknya menara-menara BTS yang tersebar di seluruh penjuru kota dan belum tertata dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Cimahi sejak tahun 2007 telah melakukan upaya penataan dan penertiban menara BTS, dan pada tahun 2009 telah ada rencana untuk menerapkan konsep pembangunan menara BTS yang dapat digunakan oleh seluruh operator.

e. Sarana Prasarana Permukiman

Air bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat, sehingga patut mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Cimahi. Berdasarkan data dari PDAM tahun 2007, jumlah sambungan langganan sebanyak 11.448 sambungan langsung atau baru mencapai $\pm 14,35$ % dari jumlah penduduk Kota Cimahi saat ini. Penduduk dan kalangan industri yang belum bisa mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM, memanfaatkan pompa/sumur bor/artesis untuk pengadaan air bersih. Menurut data tahun 2007 sebanyak 50.958 rumah tangga atau sekitar 37,25 % dari 136.800 rumah tangga yang ada, sumber pompa merupakan penggunaan terbesar untuk mendapatkan air bersih. Pengambilan air tanah oleh masyarakat ini tercatat pada tahun 2007 diperkirakan sampai 46.491,97 m³/hari. Kondisi ini dinilai sudah merupakan eksploitasi yang berlebihan, terlebih lagi dengan adanya kegiatan industri yang setiap harinya menggunakan air sebesar 35.000 m³/hari. Oleh karena itu, muka air tanah di Kota Cimahi semakin menurun dan masyarakat semakin sulit memperoleh air bersih terutama di musim kemarau.

Pada aspek persampahan, sistem yang digunakan adalah pengelolaan sampah dari sumber sampah, ditampung di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan selanjutnya diangkut oleh petugas ke fasilitas pengolahan sampah antara (Intermediate Treatment Facilities) sebelum diangkut ke tempat pengolahan dan pemrosesan sampah akhir (TPPSA). Kota Cimahi masih mengandalkan Tempat Pengolahan Kompos Sarimukti (lokasi di Kabupaten Bandung Barat) yang akan berakhir masa kontrak sampai dengan tahun 2015. Volume sampah di Kota

Cimahi diperkirakan sekitar 1.381,28 m³/hari, sedangkan kapasitas angkut hanya 200 m³/hari atau sekitar 14,5% (UPTD Kebersihan Kota Cimahi, 2007).

Sistem pengelolaan air limbah yang digunakan di wilayah Kota Cimahi masih menggunakan sistem setempat. Limbah rumah tangga berupa kotoran manusia (faekal) menggunakan sistem pembuangan dengan sistem cubluk dan septik tank pada masing-masing rumah atau bangunan. Persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebesar 68%. Jumlah tangki septik yang ada di Kota Cimahi 48.675 unit dan jumlah cubluk adalah 11.087 unit. Sedangkan jumlah rumah tangga yang belum menggunakan tangki septik sebanyak 28.432 rumah tangga. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Cimahi telah membangun tangki AG yang berfungsi sebagai septik tank komunal di Kelurahan Cigugur Tengah pada tahun 2004. Namun kondisi Tangki AG pada saat ini kurang terpelihara, sehingga pelayanan air limbah tidak berjalan secara optimal.

Pada aspek perumahan, kondisi perumahan yang ada di Kota Cimahi terdiri dari perumahan teratur dan perumahan yang tidak teratur. Perumahan teratur yaitu perumahan yang dibangun pada suatu lingkungan permukiman/kawasan permukiman yang direncanakan berikut sarana dan prasarananya, sedangkan perumahan yang tidak teratur yaitu perumahan yang tumbuh dan terbangun secara alami tanpa mengindahkan suatu perencanaan dan tata ruang baik hunian maupun lingkungan pada satu kawasan permukiman. Secara umum perumahan yang tidak teratur selalu identik dengan kepadatan dan kekumuhan, sehingga sering dijumpai rumah atau lingkungan/kawasan yang tidak layak huni. Berdasarkan hasil suseda tahun 2006 jumlah rumah yang tidak layak huni di Kota Cimahi sebanyak 1.568, jumlah bangunan kumuh sebanyak 4.628 rumah, dan keluarga yang menempati bangunan kumuh tersebut sebanyak 6.201 rumah tangga yang tersebar di 15 (lima belas) kelurahan. Jumlah rumah tangga yang mendiami rumah tidak layak huni paling besar berada di Kecamatan Cimahi Selatan. Disisi lain kondisi sarana dan prasarana permukiman di Kota Cimahi saat ini dari segi aksesibilitas, kualitas ataupun cakupan pelayanannya masih belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya kualitas lingkungan permukiman. Pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang sangat tinggi, mempunyai konsekuensi langsung terhadap peningkatan kebutuhan akan perumahan sementara lahan yang ada terbatas. Sehingga mengakibatkan terbentuknya kawasan yang padat dan tidak teratur, yang berkesan kumuh. Berdasarkan data (Dinas Tata Kota Cimahi, 2008) jumlah kawasan kumuh di Kota Cimahi adalah 6 buah dengan total luas kawasan kumuh sebesar 200 hektar. Program pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat secara vertikal (Rusunawa dan Rusunami) menjadi fokus utama, untuk

menghadapi masalah ini. Dengan tujuan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, peningkatan efisiensi penggunaan tanah sesuai peruntukan dan tata ruang, serta dapat meningkatkan daya tampung, lingkungan, mobilitas, produktivitas, dan daya saing kota.

f. Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Sarana dan prasarana pelayanan publik pada saat ini cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan. Untuk sarana perdagangan, sampai tahun 2008 telah dilaksanakan penataan pasar-pasar tradisional serta pembangunan Pasar Atas Baru. Tahun 2009, penataan pasar tradisional masih dilaksanakan dan Pembangunan Pasar Atas Baru memasuki tahap penyempurnaan. Selain itu pada tahun 2009 dimulai pembangunan Bandung-Cimahi Junction (BCJ) di Kelurahan Cibeureum. Untuk gedung pemerintahan, sampai tahun 2008 telah dilaksanakan penataan halaman Kantor Pemerintah Kota Cimahi dan rehabilitasi Kantor Kelurahan sebanyak 3 Kelurahan dan Rehabilitasi 3 Kantor Kecamatan. Namun rehabilitasi Kantor Kelurahan dan Kecamatan belum selesai, sehingga perlu dilanjutkan pada tahun anggaran selanjutnya. Sementara itu, untuk mendukung perwujudan *Cimahi Cyber Creative City*, Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan pembangunan Gedung *Baros Information Technology Creative* (BITC) yang akan menampung kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan IT dan industri kreatif. Sampai tahun 2011, pembangunan gedung C3 sudah mencapai 90%, dan secara bertahap pengoperasian gedung baru mencapai 25% dan akan meningkat sesuai dengan kesiapan pengguna dari pihak luar, direncanakan pada tahun 2013 dapat beroperasi penuh.

3.1.11 Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

a. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Kondisi lahan kritis, berdasarkan data tahun 2007 luas lahan kritis di Kota Cimahi adalah 609 hektar. Rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis). Sampai dengan tahun 2008, pencapaian reboisasi di Kota Cimahi adalah sekitar 84,4% dengan luas lahan yang direboisasi seluas 514 hektar dan jumlah tanaman sebanyak 205.600 pohon.

Kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan, menunjukkan bahwa pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan air yang terjadi di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cibabat masih belum menunjukkan perbaikan hingga tahun 2008. Secara umum kualitas air di lima sungai menunjukkan besarnya pengaruh kegiatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan industri dan rumah tangga. Kecenderungannya, semua parameter kualitas air di sungai-sungai tersebut menunjukkan konsentrasi yang meningkat dan melebihi baku mutu dari hulu ke hilir dan dari tahun ke tahun. Pencemaran air di Kota Cimahi dihasilkan terutama oleh limbah cair dari kawasan industri yang dibuang ke sungai terdekat sebagai badan air penerima buangan limbah industri. Kawasan industri sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Cimahi Selatan, sehingga dominasi pencemaran akibat limbah cair industri terletak di hilir aliran Sungai Cimahi dan Sungai Cisangkan, yang selanjutnya bermuara menjadi effluent ke Sungai Citarum. Pencemaran udara di Kota Cimahi berasal dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Pencemaran yang diakibatkan oleh sumber bergerak lebih banyak terjadi di Wilayah Kota Cimahi bagian Utara, terutama di sepanjang jalur yang menghubungkan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sementara pencemaran udara yang diakibatkan oleh sumber tidak bergerak banyak terjadi di wilayah Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah, dimana terdapat banyak aktivitas transportasi dan industri.

b. Tata ruang dan pengembangan wilayah

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi 2003-2012, kinerja penataan ruang terutama dalam aspek pemanfaatan dan pengendalian ruang kurang optimal, dimana masih terdapat beberapa ketidaksesuaian baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis.

Pengembangan struktur dan ruang kota dengan membuka jaringan prasarana baru terkendala oleh beberapa hambatan teknis dan geografis, yaitu:

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi, yaitu 1446,59 Ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin

pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna.

- Berdasarkan hasil Kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi Geologi Lingkungan Metropolitan Bandung yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Kota Cimahi termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gunung api I, yaitu kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan hujan abu, serta tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas, aliran lava dan lontaran batu (pijar) apabila terjadi letusan besar Gunung Tangkubanperahu. Selain itu, di Kota Cimahi juga terdapat patahan Lembang yang berarah timur-barat, merupakan bagian dari segmen bagian Utara dari patahan Cimandiri yang berarah barat daya-timur laut. Patahan Lembang perlu mendapat perhatian dan diwaspadai terutama keaktifannya dalam kaitannya dengan Cekungan Bandung. Melihat posisi patahan Lembang yang berdekatan dengan Gunung Tangkubanperahu yang tergolong masih aktif, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gempa-gempa yang akan terjadi di sepanjang jalur patahan yang merupakan petunjuk keaktifan suatu patahan.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. 49/2000 menetapkan sebagian wilayah Kota Cimahi (20% luas) termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Lapangan Udara Husen Sastranegara. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pembangunan vertikal di beberapa kawasan di Kota Cimahi.
- Keterbatasan lahan pengembangan (lahan cadangan) juga merupakan hambatan bagi pembangunan jaringan prasarana baru. Komposisi antara lahan yang terbangun sebesar 2507,84 Ha (62% dari luas kota) dan lahan belum terbangun sebesar 1566,46 Ha (38% dari luas kota) menyebabkan pembebasan lahan menjadi faktor penghambat investasi prasarana kota yang baru karena harga lahan yang cukup tinggi.
- Hambatan lain yang berupa hambatan fisik dan geografis dalam pengembangan Kota Cimahi adalah terdapatnya lembah-lembah sungai di kawasan Cimahi bagian Utara, jalan tol dan jalan kereta api mengakibatkan kota Cimahi terpecah menjadi beberapa kawasan yang sulit berinteraksi. Hal tersebut disebabkan belum memadainya infrastruktur untuk mengintegrasikan kawasan-kawasan tersebut sehingga pemanfaatan ruang Kota Cimahi menjadi terbatas.

Keterbatasan-keterbatasan dalam pengembangan struktur dan ruang kota disikapi dengan upaya penyusunan instrumen-instrumen perencanaan dan pengendalian ruang. Pada tahun 2008 telah dilaksanakan penyusunan dokumen

program pemanfaatan ruang koridor SUTT, penyusunan RTBL Kawasan Industri, serta penyusunan Rencana RTH Cimahi Utara. Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang adalah pembahasan persetujuan pemanfaatan ruang (TKPRD).

3.1.12 Politik

Salah satu tujuan akhir dari pembangunan Kota Cimahi adalah menuju Cimahi sebagai kota cerdas, akan tetapi sebelum sampai kesana maka perlu diupayakan serangkaian kegiatan pembangunan serta penyiapan Prana Pendukung Pembangunan, dimana hal ini mengandung makna bahwa diluar aspek teknis yang merupakan pelayanan dasar terdapat kondisi yang harus disiapkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Salah satu diantaranya adalah penyelesaian permasalahan pembangunan Bidang Politik sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan.

Terdapat beberapa permasalahan di bidang politik yang umum terjadi di Indonesia seperti halnya di Kota Cimahi yaitu belum menguatnya kelembagaan politik sebagai lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi. Di masyarakat berbagai lembaga kemasyarakatan telah tumbuh dengan cepat akan tetapi pertumbuhan tersebut hanya sebatas kuantitas, belum menyangkut pada kualitas. Berbagai LSM dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk pemerintah, seperti LPM, kader-kader pembangunan, LSM dan sebagainya bermunculan akan tetapi pendidikan politik bagi mereka dan peran serta mereka dalam peningkatan pembangunan dan kehidupan politik masih harus ditingkatkan.

Disamping permasalahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus, diantaranya adalah belum berkembangnya demokrasi politik dan ekonomi. Pemahaman demokrasi di masyarakat melalui berbagai media atau proses komunikasi perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat memahami nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman demokratis dan politis yang parsial akan berpotensi menjadi sebuah ancaman terhadap komitmen persatuan dan kesatuan; Berbagai permasalahan yang timbul dikarenakan permasalahan politik berpengaruh pada kondisi politik di masyarakat pada khususnya, dan Kota Cimahi pada umumnya sehingga pada akhirnya berpengaruh pada kinerja sistem penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu perlu ditangani secara sistemik dan berkelanjutan.

3.1.13 Hukum dan HAM

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum pemerintah Kota Cimahi memiliki beberapa permasalahan diantaranya:

- Masih terdapat sebagian besar masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti berbagai Perda yang ada di Kota Cimahi
- Masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta mentalitas masyarakat yang belum mendukung ke arah tertib hukum, seperti masih adanya pelanggaran pemanfaatan tanah, pemanfaatan air bawah tanah tanpa ijin, penyalahgunaan ruang publik untuk kepentingan individu, pembuangan sampah secara liar
- Masih lemahnya Implementasi dan penegakan supremasi hukum
- Masih adanya produk hukum pusat / provinsi yang bertentangan dengan kepentingan Kota Cimahi .
- Masih adanya praktek diskriminasi, inkonsistensi dan belum terlaksananya dengan baik transparansi hukum.
- Belum optimalnya produk-produk hukum yang mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta rasa keadilan kepada masyarakat.

3.1.14 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban masih dihadapkan pada berbagai persoalan masalah sosial dan penyakit sosial masyarakat (PSM) yang dapat menjadi faktor pencetus tindakan kriminal serta menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Selain itu permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga berpotensi menjadi permasalahan ketertiban umum. Namun demikian PKL disadari menjadi katup pengaman penyediaan lapangan kerja informal sehingga diperlukan ruang yang cukup untuk menampung kegiatannya agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Dengan berbagai macam persoalan ketentraman dan ketertiban yang ada di Kota Cimahi serta sulitnya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta aparat Kecamatan/Kelurahan harus lebih antisipatif terhadap gangguan ketertiban sejak dini serta lebih intensif lagi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat agar lingkungan lebih kondusif, aman dan tertib.

3.1.15 Aparatur

Permasalahan di bidang aparatur adalah menyangkut mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, bebas KKN, bertanggungjawab, mempunyai kompetensi untuk mendukung pembangunan daerah. Disamping itu masalah lain adalah Reformasi birokrasi yang menginginkan perubahan kultur birokrasi yang mengarah pada profesionalisme, beretika, impersonal, dan taat aturan. Transisi dalam reformasi birokrasi masih mengalami kendala dalam mewujudkan birokrasi yang ideal. Jumlah aparatur yang secara kuantitas mencukupi, tetapi aspek kualitasnya masih rendah dalam arti dari sisi kedisiplinan, profesionalisme dan etika. Hal tersebut mempengaruhi kinerja aparatur secara umum dan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.16 Keuangan Daerah

Permasalahan di bidang keuangan menyangkut peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektifitas pemanfaatan. Sehingga pembiayaan pemerintah daerah untuk pembangunan dapat meningkatkan pelayanan publik baik dalam penyediaan pelayanan dasar, sarana dan prasarana fisik, peningkatan ekonomi masyarakat serta mendukung peningkatan daya saing ekonomi Kota Cimahi.

3.2 ISU STRATEGIS

Melihat permasalahan di atas maka isu strategis yang perlu diatasi secara bertahap dan berkesinambungan dalam dua puluh tahun mendatang di Kota Cimahi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan
4. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

6. Perekonomian kota yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, dan inovatif
7. Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah
8. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur kota;
9. Pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat;
10. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
11. Pembangunan yang tanggap gender
12. Pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI

TAHUN 2005–2025

4.1 VISI

Berdasarkan kondisi Kota Cimahi saat ini, tantangan yang dihadapi dalam masa 20 tahun mendatang serta mempertimbangkan modal dasar potensinya, maka Visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 adalah :

CIMAHI KOTA CERDAS

Dengan penjelasan sebagai berikut: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya pada masa depan dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, cerdas bersinonim dengan pandai, pintar, cerdik, yaitu memiliki kemampuan untuk mengatasi segala tantangan dan ancaman yang timbul. Sebagai kota yang relatif sempit serta ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas sifat CERDAS harus dimiliki Kota Cimahi agar menjadi kota yang lebih baik dan dapat menyokong kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Sejalan dengan itu CERDAS dapat diartikan pula sebagai singkatan dari **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi CIMAHI KOTA CERDAS adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan

keaktivitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian, indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 ditandai dengan :

1) Aspek Sumberdaya manusia

Ditunjukkan dengan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing dan memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2) Aspek Ekonomi

Ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, kemitraan yang saling menguntungkan baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional, serta kontribusi sektor industri, jasa dan perdagangan yang semakin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

3) Aspek Pemerintahan

Ditunjukkan dengan kondisi demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial, penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang telah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4) Aspek Sosial Budaya

Ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis.

5) Aspek lingkungan hidup

Ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya

dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestarnya pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar generasi.

4.2 MISI

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih

banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.

Misi Empat : Mewujudkan Kerasian Pembangunan yang Berkeadilan

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

Misi Lima : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada : *pertama*, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; *kedua*, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta *ketiga*, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi
Kota CERDAS dalam aspek Sumber Daya Manusia	Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul. Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih

Visi	Misi
	keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik
Kota CERDAS dalam Aspek Pemerintahan	Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.
Kota CERDAS dalam Aspek Ekonomi	Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi

Visi	Misi
	dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.
Kota Cerdas dalam Aspek Sosial dan Budaya	Misi Empat : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.
Kota Cerdas dalam Aspek Lingkungan Hidup	Misi Lima : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga

Visi	Misi
	fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada : <i>pertama</i>, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; <i>kedua</i>, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta <i>ketiga</i>, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Cimahi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi tahun 2005 – 2025 tersebut dibutuhkan :

- 1) Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi serta partisipasi segenap masyarakat kota;
- 2) Komitmen bersama antara Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi melalui kepemimpinan Gubernur dan Walikota melalui prinsip–prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu pemeliharaan dan peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan komunikasi yang sehat (*health of communication*);
- 3) Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2005–2025

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005–2025 adalah mewujudkan visi CIMAHI KOTA CERDAS sebagai bagian dari pencapaian masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dalam sistem penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Sasaran-sasaran pokok untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan 5 misi sebagai berikut :

5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- a. Misi Satu : Terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, berbudaya, menguasai ilmu dan teknologi, produktif dan unggul.**

1. Sasaran Pokok Misi Satu adalah :

Bidang Pendidikan

- 1) Meningkatnya mutu pendidikan di Kota Cimahi yang dilakukan melalui pelaksanaan manajemen pendidikan yang berstandar nasional agar tercapai efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pendidikan,
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan dan kompetensi yang dilakukan melalui peningkatan kualitas peserta didik dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik serta tenaga kependidikan lainnya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan formal dan non formal serta tersedianya fasilitas pendidikan yang modern, lengkap secara merata serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

- 4) Terpenuhinya kebutuhan jenjang pendidikan tinggi dengan mendorong berdirinya Perguruan Tinggi Negeri baru yang dapat menjadi salah satu daya tarik kota di bidang pendidikan tinggi yang bermuara pada meningkatnya citra kota secara keseluruhan.
- 5) Meningkatnya kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan keagamaan berbasis kompetensi dan kearifan budaya lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- 6) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan bidang pendidikan di Kota Cimahi.

Bidang Kesehatan

- 7) Meningkatnya kesadaran dan pelaksanaan PHBS dalam upaya mewujudkan budaya hidup sehat.
- 8) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terpadu (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) serta meningkatnya kualitas pelayanan medis dasar dan rujukan/spesialistik, serta terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- 9) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- 10) Menurunnya AKI/AKB.

Bidang Kependudukan , Ketenagaakerjaan dan Sosial

- 11) Terkendalinya pertumbuhan penduduk secara alamiah maupun penduduk migrasi.
- 12) Semakin rendah dan terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk yang diimbangi oleh meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta berdaya saing tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat Kota Cimahi.
- 13) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja.
- 14) Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja.
- 15) Meningkatnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.
- 16) Meningkatnya kesempatan kerja yang mengarah pada kewirausahaan.
- 17) Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial.
- 18) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Keagamaan

- 19) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta berdaya saing tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat Kota Cimahi.
- 20) Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan agama, ditandai dengan adanya kerukunan hidup umat beragama.
- 21) Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat.
- 22) Meningkatnya kualitas kerukunan hidup antar dan inter umat beragama.

Bidang Pemuda dan Olahraga

- 23) Meningkatnya mutu dan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya kewirausahaan pemuda melalui pengembangan karya, kreasi, karsa dan apresiasinya dalam berbagai bidang.

Bidang Kebudayaan

- 24) Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah.
- 25) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan seni dan budaya daerah.
- 26) Berperannya kesenian dan kebudayaan daerah sebagai salah satu kekayaan daerah untuk promosi pariwisata dan budaya daerah.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 27) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan.
- 28) Penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 29) Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- 30) Meningkatnya pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan maupun kegiatan masyarakat.

2. Arah Kebijakan Misi Satu adalah :

Dilaksanakan melalui pengembangan dan pembangunan SDM yang memiliki kualifikasi IMTAQ dan IPTEK guna mencapai SDM yang beriman,

bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, beretika dan bermoral serta SDM yang menguasai dan memanfaatkan IPTEK secara handal dan berkelanjutan. Terbentuknya SDM yang profesional, kreatif, inovatif, inventif, dan bertanggung jawab sehingga dapat menjadi teladan bagi individu, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia pada Tahun 2025 dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain tanpa mengesampingkan budaya dan kepribadian nasional yang didukung pula oleh pertumbuhan penduduk yang seimbang, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang beruntung untuk dapat meningkatkan kualitasnya.

Bidang Pendidikan

- 1) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur dengan peningkatan manajemen pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana di semua jalur, jenjang dan satuan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai IPTEK, unggul dalam persaingan serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar;
- 2) Mewujudkan Keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi dengan menerapkan sistem inovasi daerah, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensi, emosional, dan spiritual;
- 3) Pembangunan Pendidikan diselenggarakan dengan pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat melayani keragaman peserta didik dari semua jenis dan jalur pendidikan dengan memperhatikan kearifan budaya lokal untuk kebutuhan pasar kerja;
- 4) Mewujudkan pendidikan menengah kejuruan berbasis IT, agro industri, kepariwisataan, industri manufaktur dan industri jasa;
- 5) Peningkatan minat baca masyarakat yang ditunjang oleh keberadaan perpustakaan baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta;
- 6) Pengelolaan pendidikan dilaksanakan melalui pengembangan manajemen pendidikan berbasis sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang memenuhi dan sudah terakreditasi sesuai standar nasional.

Bidang Kesehatan

- 7) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan.
- 8) Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.
- 9) Menurunnya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit berbasis lingkungan.
- 10) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan promotif, preventif dan kuratif untuk berbagai kelompok umur dan lapisan masyarakat.
- 11) Peningkatan kualitas pelayanan medis baik pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- 12) Mengurangi disparitas pelayanan kesehatan dari aspek kewilayahan.
- 13) Peningkatan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau.
- 14) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi penduduk miskin.
- 15) Peningkatan kualitas sarana prasarana dan SDM di bidang kesehatan.
- 16) Menurunnya berbagai angka kesakitan.
- 17) Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik.
- 18) Terciptanya jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat.
- 19) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- 20) Peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan PONEK dan PONEK.

Bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial

- 21) Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya untuk menjaga daya tampung suatu wilayah dalam suatu kesatuan ruang. Untuk itu, pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk alami maupun arus migrasi terutama urbanisasi menjadi perhatian utama. Pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang terkendali ditujukan agar mampu memberi dampak positif terhadap daya dukung maupun daya tampung suatu wilayah, terutama dari sisi permintaan dan kebutuhan terhadap sumber daya alam, bahan pangan, infrastruktur kota, lahan dan permukiman, bahkan dari sisi jumlah limbah atau bahan buangan yang dihasilkan.

- 22) Peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja untuk pasar tenaga kerja di Cimahi, Jawa Barat, di luar Jawa Barat maupun di luar negeri.
- 23) Peningkatan keterampilan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan, dan jasa.
- 24) Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja pada sektor formal.
- 25) Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha.
- 26) Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.
- 27) Peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Bidang Keagamaan

- 28) Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercapai suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
- 29) Pembangunan SDM untuk lebih mengutamakan peran agama sebagai landasan moral dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk mewujudkan SDM yang berakarakter, beretika dan berbudaya bangsa Indonesia.
- 30) Peningkatan pemahaman ajaran agama di kalangan umat beragama melalui pendidikan agama dan dakwah agar kesadaran dan keyakinan keagamaan umat semakin meningkat.
- 31) Peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh baik tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan individual dan kesalehan sosial sebagai pangkal modal sosial.
- 32) Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama.
- 33) Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan.
- 34) Peningkatan pelayanan keagamaan dan partisipasi antar umat beragama pada proses pembangunan.

Bidang Pemuda dan Olahraga

- 35) Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Sedangkan pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Bidang Kebudayaan

- 36) Meningkatkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah serta memperkaya khasanah budaya daerah.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 37) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, adanya perlindungan anak melalui upaya-upaya penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan jaminan perlindungan anak baik bersifat preventif, kuratif, dan remediatif yang berbasis masyarakat, serta dukungan prasarana dan sarana kota layak anak.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- 38) Peningkatan *human investment* melalui peningkatan pendidikan dimulai sejak usia dini sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi agar terbentuk anak, remaja dan masyarakat Cimahi yang unggul dan berwawasan luas dengan penguasaan teknologi informasi dan Bahasa Asing serta pemanfaatan dan pengembangan sistem inovasi daerah di berbagai bidang menuju masyarakat yang berbudaya dan produktif tanpa adanya diskriminasi.

b. Misi Dua : Terwujudnya tata pemerintahan yang baik :

1. Sasaran Pokok Misi Dua

Bidang Politik

- 1) Meningkatnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik berbasiskan kematangan emosional dan dukungan rasional sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, terciptanya birokrat yang profesional, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi mandiri.

Bidang Hukum dan HAM

- 2) Terwujudnya supremasi hukum dan tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan keadilan, kebenaran, akomodatif dan aspiratif.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- 3) Terwujudnya kota Cimahi yang tertib, aman, tentram dan teratur serta stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pelaksanaan aktivitas seluruh elemen masyarakat serta pengamanan hasil-hasil pembangunan.

Bidang Aparatur

- 4) Berfungsinya sistem administrasi pemerintahan dan manajemen pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional yang dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasiskan kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang Keuangan Daerah

- 5) Memantapkan desentralisasi keuangan daerah melalui penataan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang professional, efisien, transparan dan bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan penerimaan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendapatan daerah.
- 7) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, optimalisasi dan penguatan kapasitas serta kinerja SKPD/aparatur, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik serta peningkatan peranan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Arah Kebijakan Misi Dua, adalah :

Perwujudan tata pemerintahan yang baik memerlukan dukungan kondisi dan situasi daerah yang kondusif, pembangunan politik yang terarah menuju penguatan demokrasi berbasiskan etika dan nilai-nilai budaya daerah yang didukung dengan penegakan supremasi hukum secara konsisten, serta diperkuat pula oleh perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi oleh peningkatan profesionalisme, penerapan sistem ketatalaksanaan dan kelembagaan organisasi sesuai dengan kebutuhan, serta sistem karier yang jelas yang mendukung motivasi perubahan perilaku aparatur berlandaskan etika dan etos kerja yang tinggi.

Selain itu sistem administrasi pemerintahan dan manajemen pembangunan sebagai motor *good governance* akan berfungsi apabila tercipta kualitas perencanaan yang integral berdasarkan isu permasalahan, serta dukungan data dan informasi yang valid dan akurat, terciptanya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, terwujudnya sistem pengawasan yang efektif, dan terbentuknya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umum.

Pelaksanaan *good governance* dalam aspek perizinan antara lain dengan :

- 1) Mewujudkan pelayanan perizinan dan iklim investasi yang kondusif di Kota Cimahi dengan penyederhanaan sistem perizinan terpadu; dan
- 2) Mewujudkan kepastian hukum bagi pemohon perizinan di Kota Cimahi agar lebih transparan dan akuntabel.

Bidang Politik

Untuk mencapai sasaran pembangunan politik dalam meningkatkan konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik berbasiskan kematangan emosional dan dukungan rasional maka kebijakannya diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kompetensi lembaga politik serta membangun komunikasi dan sosialisasi politik;
- 2) Peningkatan kemapanan suprastruktur dan infrastruktur politik;
- 3) Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi melalui penguatan sistem dan institusi demokrasi;
- 4) Penguatan peran aktif masyarakat madani dalam mendukung kapasitas dan kapabilitas sistem politik yang demokratis;
- 5) Peningkatan aksesibilitas partisipasi publik yang menjunjung etika dan prinsip-prinsip demokrasi;
- 6) Pengembangan penataan hubungan antar lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik menuju kemitraan yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.

Bidang Hukum dan HAM

Pembangunan hukum ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik melalui proses penyusunan produk hukum yang aspiratif dan partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan upaya penegakan hukum tersebut secara berkelanjutan dan konsisten, didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan kesadaran

hukum masyarakat yang tinggi sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan penegakan supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan produk hukum daerah yang memihak kepada kepentingan masyarakat; Meningkatkan penegakan hukum dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia; Menciptakan mekanisme dan proses legislasi daerah untuk memperkuat kelembagaan demokrasi dan partisipasi masyarakat; serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pembangunan ketentraman dan ketertiban diarahkan pada peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemantapan koordinasi antar institusi penyelenggara ketentraman dan ketertiban, optimalisasi sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat, peningkatan kualitas penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mitigasi bencana.

Bidang Aparatur

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur yang mantap dan terintegrasi. Oleh karena itu peningkatan pada aspek sumber daya manusia menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan yang mencakup pemenuhan sumber daya aparatur yang kompeten pada setiap SKPD, peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang handal dan profesional serta bebas dari KKN, serta adanya pengembangan berbagai kebijakan pada bidang aparatur, peningkatan etos kerja, terwujudnya budaya organisasi yang mendukung pada profesionalisme aparatur. Aspek lainnya adalah perlu adanya pengembangan dalam hal sarana dan prasarana, teknologi informasi dan sistem informasi di bidang pemerintahan yang terintegrasi sebagai kelengkapan dalam mewujudkan pelaksanaan *e-government* dalam upaya pelaksanaan sistem administrasi dan kepegawaian yang akuntabel dan transparan serta mendukung dalam peningkatan pelayanan publik. Selain itu peningkatan profesionalisme aparatur perlu didukung pula dengan peningkatan kesejahteraan aparatur.

Bidang Keuangan Daerah

Perbaikan pengelolaan keuangan diarahkan pada perwujudan sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan. Pembiayaan pemerintah diutamakan untuk pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik dalam penyediaan pelayanan dasar maupun dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas masyarakat. Sedangkan pengelolaan pendapatan daerah menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan daerah serta digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Perlu diperhatikan pula peningkatan aspek kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah dengan menggali potensi sumber-sumber pendanaan yang ada di Kota Cimahi. Peningkatan sumber dana dilakukan dengan optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi yang ada.

c. Misi Tiga Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.

1. Sasaran Pokok Misi Ketiga, adalah :

- 1) Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya optimalisasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi;
- 3) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan investasi di daerah;
- 4) Stabilitas pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Cimahi;
- 5) Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas (netizen), Industri IT, Industri Kreatif, jaringan distribusi yang efektif dan efisien;
- 6) Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kota Cimahi.
- 7) Meningkatkan pelayanan perizinan dan iklim investasi yang kondusif di Kota Cimahi;

- 8) Meningkatkan kepastian hukum bagi pemohon perizinan di Kota Cimahi;
- 9) Meningkatnya pelayanan pembayaran pajak bagi setiap wajib pajak di Kota Cimahi;

Bidang Industri dan Perdagangan

- 10) Meningkatnya pertumbuhan Industri serta sarana dan prasarana perdagangan untuk mendorong kluster industri melalui pembangunan kelembagaan dan infrastruktur industri dan perdagangan, peningkatan kualitas sumber daya industri dan pemberdayaan produk, penguatan potensi industri dan perluasan jaringan perdagangan dalam negeri dan luar negeri sehingga tercipta penguatan jaringan industri dan kerjasama perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Bidang Pertanian

- 11) Pengembangan agribisnis perkotaan untuk peningkatan ketahanan dan keamanan pangan dengan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani dan pemantapan mutu hasil pertanian melalui teknologi pertanian dan penerapan pertanian terpadu sehingga tercipta penguasaan jaringan bisnis yang luas melalui agribisnis dan perikanan komersial yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.

Bidang Kepariwisata

- 12) Mengembangkan daya tarik wisata dan sumber daya kepariwisataan melalui pengembangan paket wisata unggulan dan penciptaan destinasi wisata dengan didukung oleh pemantapan kinerja stakeholders dan kelembagaan pariwisata sehingga tercipta kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bidang KUMKM

- 13) Peningkatan pengembangan dan pemberdayaan KUMKM melalui penyiapan pranata KUMKM, peningkatan kualitas dan keandalan KUMKM, serta pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM melalui pola kemitraan yang bersinergi sehingga tercipta kemantapan KUMKM yang dicirikan dengan pengembangan struktur ekonomi KUMKM, peningkatan daya saing KUMKM serta penyerapan tenaga kerja dan investasi.

Bidang Investasi

- 14) Meningkatnya pembangunan sarana prasarana, kelembagaan pelayanan investasi untuk mendorong pengembangan promosi dan kerjasama investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pemantapan regulasi di bidang investasi dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi sebagai daerah tujuan investasi.

2. Arah Kebijakan Misi Ketiga, adalah :

Arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi secara adil dan proporsional dengan didukung oleh iklim usaha yang berdaya saing sehat. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi daerah melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi Kota Cimahi tahun 2005-2025 diarahkan kepada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan pertanian, perikanan, industri manufaktur, jasa dan perdagangan, serta pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur daerah dan keuangan daerah.

Bidang Industri

- 1) Penguatan hubungan kemitraan antar industri dan pendudukan infrastruktur industri;
- 2) Pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi yang potensial;
- 3) Pengembangan industri kreatif berbasis pada komunitas;
- 4) Penguatan kapasitas dan teknologi sistem produksi;
- 5) Pengembangan industri kecil, menengah dan rumah tangga yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional.

Bidang Perdagangan

- 6) Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
- 7) Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien;
- 8) Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri;
- 9) Penguatan akses dan jaringan perdagangan nasional dan internasional

Bidang Pertanian

- 10) Pengembangan pertanian organik dengan pemanfaatan lahan pekarangan agar menjadi produktif.
- 11) Peningkatan produksi pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan pola budidaya pertanian yang tepat (*Good Farming Practice*).
- 12) Memantapkan kelembagaan dan manajemen pertanian terpadu untuk mencapai skala ekonomi dan standar kualitas produk.
- 13) Membentuk jaringan pemasaran produk pertanian bekerja sama dan bermitra dengan dunia usaha (BUMN dan swasta).
- 14) Pengembangan pemasaran benih ikan air tawar untuk pemenuhan kebutuhan wilayah regional melalui pengembangan usaha budidaya perikanan.
- 15) Penerapan teknologi peternakan serta perlindungan terhadap wabah penyakit ternak.

Bidang Kepariwisata

- 16) Mengembangkan pariwisata unggulan sebagai daerah tujuan wisata diarahkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bidang KUMKM

- 17) Pengembangan Pusat Informasi UKM dengan membangun data base produk unggulan UMKM sebagai sarana promosi Kota Cimahi.
- 18) Pengembangan Rumah UKM (*Trading House*) sebagai sarana pemasaran produk UMKM yang bersifat *captive*.
- 19) Perbaikan kualitas produk dan jasa serta SDM, perbaikan kemasan (Rumah Desain Kemasan Cimahi), peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan permodalan melalui koperasi.
- 20) Penguatan dan pembentukan kemitraan antar pelaku usaha setempat dan kerja sama pelaku usaha antar daerah.
- 21) Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas yang didukung hasil inovasi teknologi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat.

Bidang Investasi

- 22) Menjaga citra pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel, agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
- 23) Perwujudan iklim investasi yang menarik melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada investor dalam bentuk penyediaan sarana dan

prasarana, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian izin usaha.

- 24) Menjadikan gedung BITC sebagai pusat pengembangan industri IT dan industri kreatif

d. Misi Empat, Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan.

1. Sasaran Pokok Misi Keempat, adalah :

Bidang Infrastruktur Kota (Sarana dan Prasarana)

- 1) Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang merata di seluruh Kota Cimahi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh;
- 3) Terlaksananya peningkatan akses dan cakupan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana dasar kota, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

1. Arah Kebijakan Misi Keempat, adalah :

Pembangunan yang berkeadilan diartikan sebagai penyediaan kesempatan yang sama dalam pembangunan untuk semua. Intervensi pemihakan pemerintah diperlukan untuk perlindungan kehidupan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, sumber daya air, telekomunikasi, dan sarana prasarana permukiman. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan keserasian serta daya dukung lingkungan.

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi ditujukan untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan kota secara efektif dan efisien, untuk menampung pergerakan orang dan barang. Peningkatan kualitas pelayanannya dilaksanakan melalui manajemen transportasi antarmoda, penyediaan angkutan massal, dan peningkatan kapasitas jalan antar pusat-pusat kegiatan kota.

- 2) Prasarana pengendalian banjir dilaksanakan dengan membangun embung-embung, perbaikan drainase serta penataan sungai bekerjasama dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana dasar di lingkungan pemukiman diarahkan pada pengembangan sistem komunal. Pembangunan prasarana pengelolaan sampah, pengolahan air bersih, dan pengolahan air limbah dilaksanakan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat.
- 4) Pengembangan perumahan diarahkan pada pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk. Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya dilakukan melalui penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi, dengan prioritas pengembangan pada wilayah yang memiliki teledensitas rendah.

e. Misi Lima, Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

1. Sasaran Pokok Misi Kelima, adalah :

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- 1) Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan upaya konservasi dalam kerangka pembangunan yang ramah lingkungan;
- 3) Terpeliharanya daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat;
- 4) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peran serta aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan;
- 5) Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau, konservasi bentang alam, permukiman bersih dan ramah lingkungan.

2. Arah Kebijakan Misi Kelima, adalah :

Lingkungan hidup merupakan modal utama bagi kehidupan yang akan meningkatkan kualitas hidup manusia, oleh karena itu daya dukung lingkungan memegang peran penting dalam proses pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

1. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatannya, menciptakan kemandirian, serta peningkatan nilai tambahnya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Upaya mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab.
2. Pemeliharaan daya dukung lingkungan dilakukan melalui pemulihan kualitas lingkungan yang diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan kritis baik melalui pola vegetasi maupun sipil teknis, penataan daerah resiko tinggi bencana (gerakan tanah dan banjir), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan air, serta pemulihan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah. Pola kemitraan perlu dibangun dengan masyarakat untuk lebih memacu pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan. Pelestarian fungsi kawasan lindung diarahkan pada pemulihan kondisi dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem kawasan, kestabilan iklim baik mikro maupun makro, manfaat ekologis dan menjaga sumber daya ekonomi kawasan. Selain itu kawasan lindung berpotensi dapat dimanfaatkan secara ekonomi dari sisi jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, atau sumber daya air. Oleh karena itu, setiap pemanfaatannya harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah konservasi.
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada upaya peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan serta kontrol terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Demikian pula upaya meningkatkan penyediaan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, baik berupa instalasi pengolahan limbah bersama, sanitasi komunal atau tempat pemrosesan akhir sampah terpadu, penerapan pola 3R (*recycle*/daur ulang, *reduce*/pengurangan, *reuse*/pemakaian ulang). Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pengembangan instrumen atau upaya nonstruktur dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kegiatan ekolabel, sertifikasi pengelola lingkungan, penegakan hukum lingkungan, maupun pola insentif dan disinsentif. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan merupakan aspek penting dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk memperoleh kualitas lingkungan yang layak. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat lebih diarahkan melalui peningkatan pendidikan lingkungan sejak dini, sosialisasi, komunikasi

dan informasi lingkungan, serta memperkenalkan berbagai kearifan lokal kepada seluruh lapisan masyarakat.

4. Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan untuk mengendalikan perkembangan Kota Cimahi sehingga menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi masal yang efisien dan ramah lingkungan.

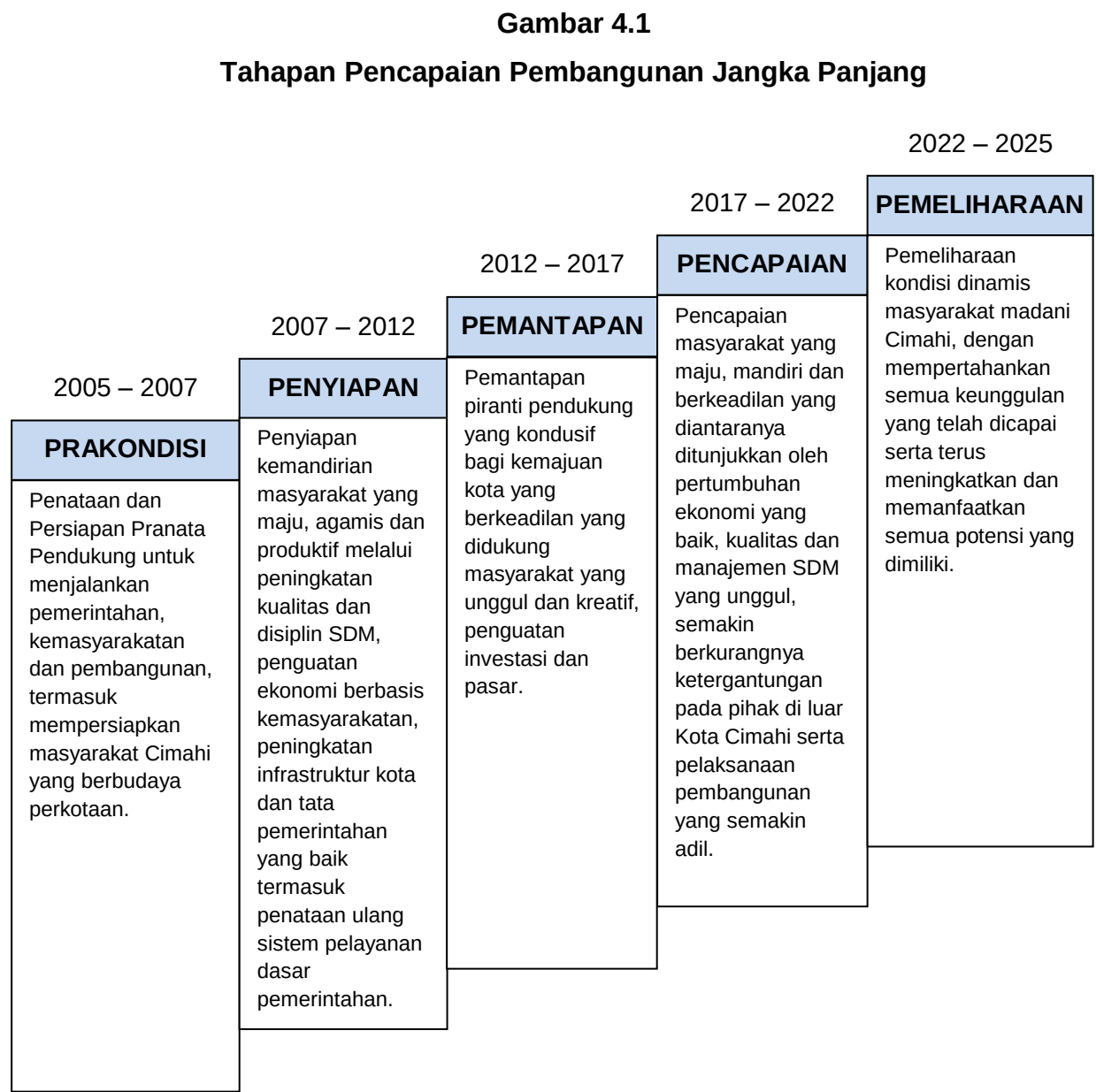
5.2 TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Cimahi juga turut mendukung pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat yang salah satu diantaranya adalah mengenai peningkatan kualitas manusia dengan menggunakan IPM sebagai indikator, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IPM Jawa Barat diproyeksikan mencapai kategori tinggi (IPM = 80,0) pada tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama dalam perwujudannya antara pemerintahan Provinsi Jawa Barat, pemerintahan kabupaten/kota se-Jawa Barat, peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat serta dukungan yang kuat dari pemerintah. Bentuk komitmen tersebut selanjutnya diimplementasikan ke dalam kerangka anggaran (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Non APBN/APBD serta dana masyarakat/dunia usaha) dan kerangka regulasi.

Dalam pelaksanaannya, perwujudan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas tertentu yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan pokok yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karenanya, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun semua urgensi saling terkait secara utuh dan bersifat berkesinambungan dari

tahapan ke tahapan berikutnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Cimahi 2025.

Secara garis besar capaian utama dalam setiap tahapan dapat dilihat pada gambar berikut :



Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.1 RPJM Daerah Pertama (2005 – 2007)

Penataan dan Persiapan Pranata Pendukung untuk menjalankan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, termasuk mempersiapkan masyarakat Cimahi yang berbudaya perkotaan.

Pada tahapan pertama Tahun 2005-2007, pembangunan di Kota Cimahi dilaksanakan melalui Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2003-2007. Pembangunan tahapan pertama tersebut dilaksanakan guna mendukung pencapaian visi "**Cimahi Kota Cerdas**".

Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan dengan upaya implementasi dalam pembangunan yang meliputi:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta laju perkembangan pembangunan;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Menjadikan Kota Cimahi sebagai kota yang cerdas (*intelligent city*);
- 4) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik, hukum dan hak azasi manusia seluruh masyarakat;
- 5) Membangun Kota Cimahi dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga menjadi daerah yang menarik untuk berusaha dan berinvestasi;
- 6) Menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Membangun Kota Cimahi sesuai dengan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- 8) Meningkatkan pengamalan ajaran agama guna mengokohkan jati diri dalam menangkal penyakit masyarakat serta terciptanya rasa persaudaraan dan keharmonisan antar umat beragama;
- 9) Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya daerah sehingga menjadi kekayaan daerah yang terpelihara dan potensial untuk pembangunan;
- 10) Mewujudkan warga kota yang santun, ramah, saling menghargai dan memahami berbagai latar belakang yang ada sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Kebijaksanaan pembangunan Kota Cimahi dicerminkan melalui trilogi pembangunan yang mencakup (a) Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); (b) Pemerataan hasil pembangunan yang adil bagi masyarakat; dan (c) Pembangunan yang mengarah pada terciptanya masyarakat madani. Kebijakan pembangunan Kota Cimahi yang dijadikan prioritas awal pembangunan daerah, diarahkan pada pembangunan prasarana dan sarana dasar

berikut penyiapan dan penyediaan perangkatnya untuk menjamin kesinambungan pembangunan di Kota Cimahi, yaitu :

- 1) Meningkatkan dan memperbaiki prasarana transportasi;
- 2) Meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 4) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat;
- 5) Menyiapkan pranata pendukung pembangunan; dan
- 6) Mengatasi masalah kependudukan dan tenaga kerja.

Selanjutnya Propeda berfungsi sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi selama kurun waktu lima tahun didasarkan pada prioritas program pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Jawa Barat, aspirasi masyarakat, serta tuntutan dan tantangan pembangunan daerah, yang dituangkan lebih rinci ke dalam Rencana strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sejalan dengan azas desentralisasi dan kewenangan otonomi daerah.

Dengan demikian, pada kurun waktu 2005–2007 secara kebijakan perencanaan masih berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kota Cimahi tahun 2003 – 2007 sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 – 2007, dengan upaya pencapaian visi yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pemerintahan sebagai berikut :

Pertama Mewujudkan Tatahan Pemerintahan Yang Mantap (*good governance*) dengan prioritas sasaran sebagai berikut :

- Mewujudkan pemerintahan yang memahami dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kinerja pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran : Meningkatkan fungsi kelembagaan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah; Menjalin hubungan kerjasama antara pemerintahan daerah dengan berbagai pihak.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan, dengan harapan sasaran yang dapat tercapai yaitu : Berfungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan; Berfungsinya Forum Konsultasi dan Komunikasi Pembangunan dan forum musyawarah masyarakat lainnya; Meningkatkan

sistem pengawasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan.

Kedua Mewujudkan Aparatur Yang Handal dan Profesional, dengan prioritas sasaran pada upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dari aspek kedisiplinan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Selain itu pula adanya peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur.

Ketiga Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertakwa, Sehat, Cerdas, dan Berbudaya.

Keempat Mewujudkan Kota Yang Aman, Tertib, Nyaman dan Layak Huni.

Kelima Memantapkan Perekonomian Daerah Berlandaskan Sistem Ekonomi Kemasyarakatan. Adapun faktor keberhasilan dalam mewujudkan misi ini adalah terwujudnya sistem perekonomian yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat serta terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga tumbuh dan berkembang kreativitas dan produktivitas masyarakat.

Keenam Meningkatkan Kesadaran Politik dan Hukum, dengan prioritas sasaran untuk meningkatkan stabilitas dan kehidupan politik; Meningkatkan penegakan dan supremasi hukum melalui penyediaan peraturan daerah dan penegakan hukum daerah serta perwujudan penegakan hukum dan hak azasi manusia.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi yang ditempuh yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan dan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah-langkah yang ditempuh yaitu :

Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan suprastruktur dan infrastruktur pendidikan dengan meningkatkan manajemen pendidikan, mutu tenaga pendidik, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan

Upaya yang dilakukan pada tahap ini antara lain :

- 1) Rekrutment tenaga pendidik dan kependidikan
- 2) perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- 3) penyelenggaraan pendidikan non formal
- 4) penyelenggaraan PAUD
- 5) mendorong partisipasi masyarakat pada pendidikan
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan masyarakat;

Bidang Kesehatan

Pada tahap ini pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan pada penanganan masalah kesehatan yang berulang dan perintisan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Upaya yang dilakukan diantaranya :

- 1) Optimalisasi sarana pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat;
- 2) Penanggulangan masalah penyakit menular;
- 3) Penurunan AKI/AKB ;
- 4) Peningkatan kualitas gizi balita dan anak;
- 5) Peningkatan promosi kesehatan;
- 6) Evaluasi pembangunan bidang kesehatan.

Bidang Kependudukan, Ketenagaakerjaan dan Sosial

1) Kependudukan

Pembangunan bidang kependudukan di Kota Cimahi diarahkan pada penyiapan sistem administrasi kependudukan, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan upaya pemerataan penyebaran penduduk. Untuk mewujudkan prioritas pembangunan kependudukan tersebut, dilakukan langkah dan upaya sebagai berikut :

- a) Penyiapan sistem administrasi kependudukan yang aplikatif, efektif, dan efisien.
- b) Penyiapan pelaksanaan program keluarga berencana yang berkualitas dan komprehensif.
- c) Perumusan kebijakan pembatasan penduduk melalui pengetatan dokumentasi kependudukan dan catatan sipil.
- d) Penyiapan program transmigrasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan
- e) Pengendalian pertumbuhan penduduk
- f) penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana
- g) Pembangunan sistem administrasi kependudukan
- h) Peningkatan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Kota Cimahi.

2) Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Cimahi diprioritaskan pada Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang berbasis peluang kerja, potensi lokal dan kewirausahaan serta perumusan pola hubungan industrial yang baik.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan tersebut, dilakukan langkah dan upaya sebagai berikut :

- a) peningkatan kompetensi dan daya saing,
- b) Peningkatan hubungan industrial untuk menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja.
- c) Penyiapan sarana, prasarana, dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja, potensi lokal dan kewirausahaan.
- d) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja, potensi lokal dan kewirausahaan
- e) Perumusan pola hubungan industrial yang baik antara pekerja dengan dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja

3) Sosial

Pembangunan bidang sosial diprioritaskan pada penyiapan sistem pelayanan sosial yang berkualitas dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang bersifat darurat.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan tersebut, dilakukan langkah dan upaya sebagai berikut :

- a) Penyiapan sarana, prasarana, dan SDM pelayanan sosial.
- b) Perumusan kebijakan pelayanan sosial
- c) Pendataan dan pemetaan masalah-masalah kesejahteraan social
- d) Penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang bersifat darurat.
- e) Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat
- f) Peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Bidang Keagamaan

Pembangunan di bidang keagamaan memprioritaskan pada terwujudnya kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama dan peningkatan

pemahaman dan pengamalan agama upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, dilakukan langkah dan upaya sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kerukunan hidup baik interumat maupun antar umat beragama;
- 2) Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara optimal,
- 4) Fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan
- 5) Pemberdayaan ulama dan tokoh masyarakat dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan etika, budaya dan aturan hukum yang berlaku ;
- 6) Pelaksanaan dialog-dialog secara berkesinambungan baik antar maupun interumat beragama dalam suasana tenggang rasa dan toleransi
- 7) Fasilitasi kepada lembaga-lembaga sosial dan pendidikan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan sosial

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga pada tahap ini diprioritaskan pada upaya untuk menumbuhkan budaya olahraga masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga dan kampanye semangat berolahraga.

Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada tahap ini difokuskan pada mengembangkan seni dan budaya daerah melalui penumbuhan minat masyarakat dalam pelestarian budaya daerah sekaligus sebagai sarana promosi pariwisata daerah.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan serta mutu hidup perempuan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat, adanya sumberdaya aparatur yang memadai untuk pemberdayaan perempuan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam permasalahan perempuan dan anak.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pembangunan Bidang Iptek pada tahap ini diarahkan untuk meningkatkan riset dan pengembangan teknologi tepat guna melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi

Bidang Politik

Pembangunan bidang politik pada tahap ini diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan stabilitas dan kehidupan politik.

Bidang Hukum dan HAM

Pembangunan bidang Hukum dan HAM pada tahap ini diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan penegakan dan supremasi hukum melalui penyediaan peraturan daerah dan penegakan hukum daerah, serta perwujudan penegakan hukum dan hak azasi manusia.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pada tahap pertama ini pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban diprioritaskan pada perwujudan kota yang aman, tertib, nyaman dan layak huni.

Bidang Aparatur

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan dalam upaya mewujudkan tatanan pemerintahan yang mantap (*good governance*) serta aparatur yang handal dan profesional dengan prioritas sasaran sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah yang amanah;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur;
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang memahami dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kinerja pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran : Meningkatkan fungsi kelembagaan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah; Menjalin hubungan kerjasama antara pemerintahan daerah dengan berbagai pihak;
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan, dengan harapan sasaran yang dapat tercapai yaitu :

Berfungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan; Berfungsinya Forum Konsultasi dan Komunikasi Pembangunan dan forum musyawarah masyarakat lainnya; Meningkatkan sistem pengawasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan;

- 5) Meningkatkan kualitas aparatur dari aspek kedisiplinan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Selain itu pula adanya peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur.

Bidang Keuangan Daerah

Perluasan dan peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendapatan daerah serta memantapkan desentralisasi keuangan daerah melalui penataan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Bidang Industri dan Perdagangan

Pembangunan industri dan perdagangan di Kota Cimahi diarahkan untuk peningkatan kemitraan usaha antara UKM yang dikelola masyarakat dengan perusahaan, industri dan usaha skala besar, meningkatkan kreatifitas, partisipasi pemuda dan generasi muda dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, pengembangan lembaga perdagangan untuk memberikan peluang investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Bidang Pertanian

Pengembangan pertanian sebagai salah satu Potensi ekonomi Kota Cimahi diarahkan kepada pengembangan agribisnis perkotaan untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat

Bidang Kepariwisata

Pengembangan daya tarik wisata melalui pengembangan kesenian dan kebudayaan tradisional daerah sebagai wahana promosi pariwisata dan daerah tujuan wisata, serta pengembangan sumberdaya kepariwisataan.

Bidang KUMKM

Penyiapan pranata KUMKM melalui pengembangan kapasitas SDM KUMKM, pengembangan dan penguatan modal KUMKM

Bidang Investasi

Peningkatan penanaman modal melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi kewenangan penanaman modal serta pemberian insentif bagi kegiatan investasi daerah

Bidang Infrastruktur Kota (Sarana dan Prasarana)

Untuk Bidang Infrastruktur Kota (Sarana dan Prasarana) diprioritaskan pada Akselerasi Penyiapan Pranata Infrastruktur Kota.

Pada tahapan ini pengembangan infrastruktur kota diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota dengan arah pengembangan pada penyiapan pranata pendukung pembangunan infrastruktur yang antara lain berupa kajian-kajian teknis, perencanaan kebijakan sektoral dan perencanaan strategis, pengembangan sistem kelembagaan pengelolaan infrastruktur, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan seluruh stakeholdernya: masyarakat dan swasta.

Indikasi pengembangan kebijakan pada tahap pertama ini adalah terlaksananya revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur kota eksisting, dan penyiapan pengembangan infrastruktur kota, yang meliputi antara lain: Jalan lingkaran, jalan kota serta jalan lingkungan, fasilitas pendukung perumahan dan permukiman di tingkat Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan Pusat Lingkungan, sarana angkutan masal (Mass Transport), Terminal, Jaringan Sumber daya air (drainase, saluran, sungai), embung, jaringan air baku, jaringan telekomunikasi dan informasi, air bersih, persampahan, air limbah, dan perumahan vertikal.

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1. Tata Ruang

Pada Bidang Tata Ruang diprioritaskan pada Pengkondisian Penataan Ruang yang Berwawasan Lingkungan.

Dengan kondisi perkotaan yang sangat *urbanised* dan memiliki lahan cadangan yang terbatas serta persentase tutupan lahan terbangun yang tinggi disertai dengan jumlah penduduk yang juga sangat tinggi, pada

tahap awal Pembangunan Jangka Panjang ini pelaksanaan pembangunan Penataan Ruang Kota Cimahi diarahkan untuk mengkondisikan arahan persiapan pembangunan penataan ruang kota untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi serta peningkatan relatif daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Arah pengembangan kebijakannya adalah mempertahankan dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau yang ada dan guna lahan eksisting, serta penyusunan dan penyiapan kebijakan pengembangan struktur ruang kota, yang terdiri dari penyiapan arah pengembangan kebijakan untuk mendukung fungsi Kota Cimahi bersama Kota Bandung sebagai Kota inti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung, pengembangan dan optimalisasi Pusat dan Sub Pusat pelayanan serta pusat lingkungan, serta pengembangan infrastruktur kota strategis.

2. Lingkungan Hidup

Pada Bidang Lingkungan Hidup diarahkan pada Pengkondisian Pranata Lingkungan Hidup. Upaya meningkatkan daya dukung lingkungan Kota Cimahi dilakukan melalui perbaikan dan pengkondisian kepranataan bidang lingkungan hidup, pengendalian pertumbuhan penduduk yang saat ini sudah sangat tinggi dan padat, penataan ruang yang mantap, dan integrasi serta sinergitas penataan ruang regional. Arahan kebijakan lingkungan hidup antara lain juga dengan penerapan pengetahuan dan pendidikan tentang lingkungan hidup di sekolah-sekolah, tersedianya berbagai pedoman, petunjuk pelaksanaan, baku mutu, tolok ukur, sistem pemantauan dan pengelolaan, pentapan kriteria lingkungan dan peraturan yang memadai disertai dengan penegakkan hukum lingkungan

5.2.2 RPJM Daerah Kedua (2007 – 2012)

Pada tahap RPJM Daerah kedua ini diarahkan untuk *penyiapan kemandirian masyarakat yang maju, agamis dan produktif melalui peningkatan kualitas dan disiplin SDM, penguatan ekonomi berbasis kemasyarakatan, peningkatan infrastruktur kota dan tata pemerintahan yang baik termasuk penataan ulang sistem pelayanan dasar pemerintahan.*

Pada tahap ini, Penyiapan ekonomi dilakukan dalam segala bidang melalui daya saing kompetitif ekonomi kecil dan industri olahan, berlandaskan keunggulan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan pemanfaatan ilmu dan teknologi yang sesuai dengan karakter Kota Cimahi. Pada masa ini dilakukan penyiapan piranti pendukung pemerintah berbasis IPTEK untuk memudahkan upaya pengendalian pembangunan maupun pendapatan daerah sehingga masyarakat dilayani secara mudah, transparan dan akuntabel yang menciptakan kondusif yang fair, dan saling berbagi (*share*) dan peduli (*care*) pada golongan yang perlu dibantu. Pemantapan kemajuan juga menjadi prasyarat untuk tercapainya kemajuan nyata.

Dorongan terhadap percepatan peningkatan ekonomi kota ditujukan untuk peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Indikasi utama pertumbuhan pembangunan Kota Cimahi dapat dilihat dari kinerja perekonomian Kota Cimahi sampai dengan tahun 2008 yang ditandai dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,77%. Kendati demikian secara makro pertumbuhan ekonomi kota yang hanya sebagian saja yang bersumber dari dorongan investasi, sebagian besar dipicu oleh konsumsi domestik. Selain itu, berdasarkan analisis indeks pembangunan manusia, indikasi keberhasilan pembangunan ditandai pula dengan meningkatnya indeks kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kinerja pembangunan terutama di dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat Kota Cimahi. Oleh karena itu kinerja pembangunan 2007-2012 diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja ekonomi. Dengan demikian kegiatan program seluruhnya diarahkan pada dorongan kegiatan ekonomi makro dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi mikro.

RPJM Daerah kedua ditujukan untuk lebih memantapkan pada :

Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan pada tahap ini dititik beratkan pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien serta mensinergikan antara pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar pelayanan nasional (SPN).

Upaya yang dilakukan pada tahap ini antara lain :

- 1) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) penyelenggaraan akreditasi sekolah
- 3) perluasan akses pendidikan pada jalur non formal
- 4) penyelenggaraan sekolah berbasis keunggulan lokal
- 5) pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran
- 6) pendanaan biaya operasional sekolah

- 7) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- 8) perluasan akses sekolah inklusif
- 9) perluasan akses paud
- 10) perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu
- 11) peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/SM terpadu, SLB
- 12) penataan regulasi pengelolaan pendidikan.

Bidang Kesehatan

Pada tahap ini pembangunan di bidang kesehatan diprioritaskan pada penyiapan berbagai prasyarat untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta antisipasi terhadap *new emerging diseases* dan *reemerging diseases*.

Dalam upaya kesinambungan pembangunan di bidang kesehatan, perlu adanya peningkatan manajemen dan sumber daya kesehatan yang meliputi penyusunan berbagai regulasi dan kebijakan di bidang kesehatan, peningkatan berbagai sarana prasarana kesehatan, peningkatan SDM di bidang kesehatan baik medis dan non medis, serta peningkatan promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam PHBS. Dalam upaya lebih mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu dibangun Pustu, Puskesmas dan rintisan Puskesmas Spesialistik khususnya Puskesmas PONED sebagai upaya untuk penurunan AKI/AKB, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar perlu juga dilakukan Peningkatan sarana prasarana kesehatan rujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain itu yang perlu dilakukan yaitu peningkatan kewaspadaan dini terhadap munculnya berbagai penyakit, Penanggulangan Berbagai Penyakit dan Penurunan Angka Kesakitan baik penyakit endemis/epidemis, serta adanya antisipasi dan penanganan terhadap berbagai penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*) dan terhadap kemunculannya kembali berbagai penyakit yang sudah hilang (*re-emerging diseases*).

Bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial

1) Kependudukan

Pembangunan bidang kependudukan diarahkan pada penataan sistem administrasi kependudukan, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan upaya pemerataan penyebaran penduduk.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kependudukan tersebut, antara lain dengan :

- a) Penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan yang aplikatif, efektif, dan efisien
- b) Penataan program keluarga berencana yang berkualitas dan komprehensif
- c) Penguatan kebijakan pembatasan penduduk melalui pengetatan dokumentasi kependudukan dan catatan sipil dengan penekanan pada pengawasan dan penindakan
- d) Pemantapan program transmigrasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan

2) Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dilakukan dengan penekanan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang berbasis peluang dan penempatan kerja, potensi lokal dan kewirausahaan serta penataan pola hubungan industrial yang baik.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan tersebut, antara lain dengan :

- a) Penataan sarana, prasarana, dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja, potensi lokal dan kewirausahaan
- b) Pemantapan pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja, potensi lokal dan kewirausahaan.
- c) Penataan pola hubungan industrial yang baik antara pekerja dengan dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.
- d) Rintisan kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk penjaminan penempatan tenaga kerja.

3) Sosial

Pembangunan bidang sosial diarahkan pada penataan sistem pelayanan sosial yang berkualitas dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial secara umum.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan sosial tersebut, antara lain dengan :

- a) Penataan sarana, prasarana, dan SDM pelayanan sosial
- b) Penguatan kebijakan pelayanan sosial
- c) Pemantapan pendataan dan pemetaan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

- d) Pemantapan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang bersifat darurat dan non darurat.

Bidang Keagamaan

Fokus pembangunan bidang keagamaan diprioritaskan pada peningkatan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan :

- 1) Membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
- 2) Fasilitasi kepada lembaga-lembaga sosial dan pendidikan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan sosial.

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembangunan bidang Olahraga diprioritaskan pada penataan sarana dan prasarana olahraga yang ada dan diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas olahraga masyarakat dan sebagai salah satu upaya untuk mendorong prestasi olahraga Kota Cimahi. Adapun pembangunan bidang pemuda diupayakan melalui peningkatan kualitas pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan.

Pada tahap ini dilakukan upaya peningkatan dukungan akses pada kawasan Contong – Padasuka – Sangkuriang. Strategis sosial budaya di kawasan tersebut sebagai pusat sarana dan prasarana olahraga yang diharapkan mampu menjadi daya tarik berbagai aktivitas olahraga berskala regional ataupun nasional. Sedangkan untuk pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan difokuskan pada melestarikan nilai dan budaya tradisional khas Kota Cimahi khususnya dan budaya Jawa Barat serta **nusantara** umumnya. Upaya yang dilakukan adalah pelestarian nilai dan budaya tradisional dengan menginternalisasikannya kepada generasi muda sehingga jati

dirinya sebagai bagian dari budaya sunda tidak tergerus oleh perkembangan global.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, trafficking dan eksploitasi.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pada tahap ini, bidang IPTEK diarahkan untuk pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam menunjang fokus dan pembangunan industri kreatif, pengembangan SDM yang berdaya saing serta berbudaya ilmu dan teknologi.

Bidang Politik

Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada penguatan kehidupan demokrasi, semangat kebangsaan, dan penguatan peran serta fungsi partai politik masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan kehidupan politik berbasiskan penerapan prinsip persamaan, kebersamaan dan anti diskriminasi, peningkatan komunikasi politik yang sehat dan saling membangun kepercayaan diantara eksekutif dan legislatif serta dengan masyarakat, peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, pengembangan kelembagaan demokrasi lokal.

Bidang Hukum dan HAM

Pembangunan bidang hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya hukum serta pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Selain itu dalam penegakan HAM perlu penataan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara dengan terwujudnya rasa aman dan damai.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilakukan dengan peningkatan fungsi lembaga yang menangani bidang ketentraman dan ketertiban, peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan melalui pemberdayaan perlindungan masyarakat sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan masyarakat.

Bidang Aparatur

Dalam upaya menindaklanjuti RPJMD sebelumnya maka perlu dilakukan peningkatan akuntabilitas kinerja aparaturnya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan penyiapan berbagai kebijakan di bidang aparatur yang menekankan pada :

- 1) Peningkatan kemampuan manajerial dan teknis aparatur
- 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja aparaturnya
- 3) Pembangunan Sistem Informasi untuk menunjang penyediaan data yang akurat
- 4) Peningkatan kuantitas pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan unit organisasi
- 5) Pembentukan kebijakan-kebijakan bidang aparatur yang berpihak pada publik
- 6) Peningkatan kualitas sistem manajemen kepegawaian

Bidang Keuangan Daerah

Pembangunan bidang keuangan daerah diarahkan pada Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan pada wajib pajak dan retribusi serta optimalisasi kinerja SKPD penghasil yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan penerapan sistem operasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Bidang Industri dan Perdagangan

Bidang industri dan perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas teknologi sistem produksi, melalui peningkatan tumbuhnya industri kecil, menengah dan rumah tangga, mendorong pembentukan jaringan klaster industri, mendorong pertumbuhan dan perkembangan Industri Kreatif, meningkatkan sarana dan prasarana industri kecil serta pola-pola kemitraan antara industri kecil,

rumah tangga dan industri berskala menengah dan besar, menyediakan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, dan meningkatkan kegiatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Bidang Pertanian

Pembangunan pertanian diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, meningkatkan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan), meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, mencegah dan menanggulangi wabah penyakit ternak, meningkatkan produksi hasil peternakan, perikanan dan pertanian kearah produksi benih dan bibit, meningkatnya penerapan teknologi peternakan dan meningkatkan budidaya perikanan.

Bidang Kepariwisata

Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada mengembangkan obyek daerah dan mendorong pertumbuhan wisata unggulan berbasis kepada kearifan lokal dan pengembangan kepariwisataan.

Bidang KUMKM

Pembangunan KUMKM diarahkan kepada meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan KUMKM, meningkatnya produktivitas dan pengelolaan KUMKM.

Bidang Investasi

Upaya peningkatan investasi yang dilakukan pada tahap ini adalah meningkatnya promosi dan kerjasama investasi serta meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi.

Bidang Infrastruktur Kota (Sarana dan prasarana)

Pada tahap ini, pembangunan bidang infrastruktur kota (sarana dan prasarana) diprioritaskan pada penyiapan dan pembangunan pranata infrastruktur kota.

Pengembangan infrastruktur kota diarahkan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur kota yang strategis yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahap sebelumnya, mengembangkan dan memelihara serta

memantapkan infrastruktur yang telah ada. Perencanaan penataan drainase kota yang terintegrasi melalui pendekatan regional yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengembangan sistem pelayanan air minum skala kecil atau lokal antara lain dengan penguatan kelembagaan masyarakat pengelola pemanfaat air. Selain itu juga dilakukan perencanaan dan pengembangan terminal C di titik kawasan tertentu.

Pada tahap ini ditandai dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan lebih kurang 130 % (2004: 63.842, 2009:144.423) dan peningkatan Level of Service jalan-jalan di Kota Cimahi yang mencapai angka cukup kritis. Oleh karenanya Pengembangan jalan lingkar sebagai alternatif pergerakan jalan utama kota akan terus dikembangkan dan disiapkan.

Pengembangan infrastruktur transportasi jalan kereta api ditandai dengan penataan kawasan stasiun dan penataan jalur sempadan sepanjang jalan kereta api serta penataan perlintasan sebidang paling tidak di dua titik perlintasan sebidang, yaitu: Kebonsari dan Padasuka untuk membuka dan memperlancar akses pergerakan utara-selatan.

Dalam hal pembangunan sumber daya air, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, dilakukan melalui pembangunan, 6 buah embung sebagai pengendalian bencana banjir dan kekeringan, serta peningkatan layanan air baku.

Sistem pengelolaan persampahan diarahkan untuk mengembangkan inovasi teknologi alternatif mendampingi pengembangan sanitary landfill yang bisa memiliki potensi nilai tambah ekonomi kota.

Pengembangan infrastruktur kota lainnya, dilakukan antara lain melalui peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi yang ditandai dengan peningkatan cakupan pelayanan jaringan telepon dan broadband skala regional dengan pusat di kawasan Baros (*Baros IT creative*) dalam rangka mendukung konsep Jabar Cyber Province, peningkatan ketersediaan air minum, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perumahan padat dan kawasan eks lahan industri. Sementara untuk infrastruktur air limbah dikembangkan konsep pengelolaan terpadu dan terintegrasi.

Pada tahap ini juga diarahkan infrastruktur perkotaan yg berwawasan lingkungan dan *community/citizen friendly*, melalui antara lain pengembangan infrastruktur yang sangat layak bagi pedestrian dan taman-taman kota.

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1) Tata Ruang

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan pada persiapan pengembangan dan pemanfaatan pola ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan pembangunan penataan ruang Kota Cimahi diharapkan semakin baik dengan ditetapkannya Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan setiap daerah (Pripinsi dan kota/kabupaten) merevisi Rencana Tata Ruang nya menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang baru. Oleh karenanya pada tahap ini pengembangan kebijakan Penataan Ruang Kota Cimahi diarahkan pada penyiapan kajian teknis dan penyiapan kebijakan penataan ruang, antara lain Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Kawasan-kawasan Strategis Kota, serta pemutakhiran alat dan pranata perencanaan tata ruang lainnya.

Arah pengembangan tata ruang pada tahap ini juga diarahkan untuk menyiapkan pengembangan pola ruang yang seimbang dan berkelanjutan dengan prioritas mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat, preservasi dan konservasi kawasan yang termasuk Kawasan Bandung Utara (KBU), mewujudkan revitalisasi dan preservasi kawasan tertentu seperti kawasan industri dan eks kawasan industri, dan kawasan pendidikan militer TNI AD.

Hal tersebut diikuti dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antara provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan Struktur Ruang Kota pada tahap ini ditandai dengan penyiapan dan pembentukan kawasan strategis kota yang potensial dan prospektif, seperti kawasan strategis kota (KSK) Baros, KSK Cireundeu – Ciseupan, Contong – Sangkuriang. Indikasi lainnya adalah persiapan perwujudan reformulasi sistem Pusat, Sub Pusat dan Pusat Lingkungan sejalan dengan pengembangan kawasan-kawasan potensial dan strategis kota dan rencana pemekaran administratif.

Selain itu pengembangan Tata Ruang Kota Cimahi mulai diarahkan pada persiapan pengembangan perwujudan ruang kreatif untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif kota. Pelaksanaan penataan ruang kota perlu diiringi dengan ketersediaan data spasial kota melalui pengembangan

infrastruktur data spasial yang operasional dan terintegrasi dengan jaringan data spasial propinsi dan nasional (IDSD prop dan IDSN).

2) Lingkungan Hidup

Pembangunan pada tahap ini diprioritaskan pada Penyiapan dan Penataan Pranata Lingkungan Hidup.

Tolok ukur semakin membaiknya pengelolaan dan manajemen lingkungan hidup diindikasikan oleh semakin mantapnya pranata pengelolaan lingkungan hidup. Tahap kedua ini pengembangan lingkungan hidup di Kota Cimahi diarahkan pada peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dan memasyarakatnya pola dan perilaku berwawasan lingkungan dalam setiap aspek kehidupan. Semua itu ditujukan untuk mempersiapkan pengelolaan lingkungan hidup yang mantap dan seimbang yang berbasiskan pada kearifan lokal. Tahap ini juga disiapkan berbagai pranata pendukung terutama berkaitan dengan penyiapan informasi dan peraturan serta ketentuan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi.

Penerapan pengelolaan sampah melalui program 3R semakin dgalakkan di semua aspek kegiatan perkotaan dan masyarakat. Kawasan lindung dan kawasan konservasi Bandung Utara yang ada dipertahankan keberadaan dan keseimbangannya. Peraturan dan ketentuan yang mengacu pada ketentuan kondisi lingkungan lokal disiapkan sebagai penjabaran peraturan di tingkat propinsi.

Membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi, RTH sebesar 20% dari luas Cimahi, meningkatnya penegakan hukum lingkungan serta penerapan nilai-nilai lingkungan hidup pada kegiatan sektoral, pendidikan lingkungan dan membangun sinergitas antar lingkungan serta pemangku kepentingan.

5.2.3 RPJM Daerah Ketiga (2012 – 2017)

RPJM Daerah ketiga ditujukan untuk *pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.*

Pada tahap ini pemantapan ekonomi dilakukan dalam segala bidang melalui daya saing kompetitif ekonomi kecil dan industri olahan, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan pemanfaatan ilmu dan teknologi yang sesuai dengan karakter Kota Cimahi. Pada masa ini piranti pendukung pemerintah sudah berbasis IPTEK yang memudahkan upaya pengendalian pembangunan maupun pendapatan daerah sehingga masyarakat dilayani secara mudah, transparan dan akuntabel yang menciptakan kondusif yang fair, dan saling berbagi (share) dan peduli (care) pada golongan yang perlu dibantu. Pemantapan kemajuan juga menjadi prasyarat untuk tercapainya kemajuan nyata.

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bidang Pendidikan

Dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas yang dititikberatkan kepada peningkatan tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap, peningkatan status akreditasi sekolah, sekolah berstandar nasional, Sekolah Berstandar Internasional (SBI), peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan pendidikan serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar pelayanan pendidikan nasional (SPN).

Upaya yang dilakukan pada tahap ini antara lain :

- 1) pengembangan guru sebagai profesi
- 2) Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi
- 3) perluasan pendidikan kecakapan hidup
- 4) pembangunan sekolah bertaraf internasional
- 5) akselerasi program pendidikan kejuruan dan vokasi
- 6) peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran
- 7) peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan.

Bidang Kesehatan

Pada tahap ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan perintisan kemandirian masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di tahapan ini dilakukan pengembangan kualitas pelayanan kesehatan, dimana salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan serta melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik / rujukan. Berkaitan dengan itu maka akan dilakukan pengembangan berbagai Puskesmas menjadi Puskesmas Spesialistik. untuk itu perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, spesialisik dan rujukan. Berbagai Pelayanan kesehatan yang ada pada kenyataannya harus melayani masyarakat dari daerah lain yang berbatasan, oleh karena itu permasalahan pelayanan kesehatan lintas batas perlu menjadi prioritas dan diharapkan selesai pada tahap ini. Hal lainnya adalah : perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dan berbagai *stakeholders* dalam upaya pembangunan bidang kesehatan; Rekayasa sosial diperlukan dalam upaya pemantapan promkes dan intervensi PHBS yang mengarah pada pembudayaan PHBS dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan dan Peningkatan UC JPKM untuk seluruh masyarakat Cimahi. Peningkatan mutu lingkungan juga menjadi salah satu prioritas termasuk lingkungan perumahan dan permukiman meliputi sanitasi dasar dan sanitasi tempat umum, industri dan tempat lainnya.

Bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial

1) Kependudukan

Pada periode ini, pembangunan bidang kependudukan diarahkan pada Pemantapan sistem administrasi kependudukan, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan upaya pemerataan penyebaran penduduk.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan sosial tersebut, antara lain dengan :

- a) Pemantapan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan yang aplikatif, efektif, dan efisien
- b) Pemantapan program keluarga berencana yang berkualitas dan komprehensif
- c) Pemantapan kebijakan pembatasan penduduk melalui pengetatan dokumentasi kependudukan dan catatan sipil dengan penekanan pada pengawasan dan penindakan

- d) Peningkatan program transmigrasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

2) Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Cimahi diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang berbasis peluang dan penempatan kerja, dengan penguatan pada potensi lokal dan kewirausahaan, serta pemantapan pola hubungan industrial yang baik.

Pada tahap ini dititikberatkan pada upaya perwujudan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintah, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah berpenghasilan menengah, disamping itu indikator lainnya adalah menguatnya kinerja kelembagaan pengelola SDM, konsistensi upaya penegakan hukum serta pendayagunaan SDM yang berkesinambungan.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan tersebut, antara lain dengan :

- a) Pemantapan sarana, prasarana, dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja, dengan penguatan pada potensi lokal dan kewirausahaan.
- b) Peningkatan pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja, potensi lokal dan kewirausahaan dengan jaminan penempatan kerja. Perhatian khusus pada peningkatan daya saing ketenagakerjaan dikaitkan dengan penguasaan dan pemanfaatan teknologi.
- c) Pemantapan pola hubungan industrial yang baik antara pekerja dengan dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.
- d) Pemantapan kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk penjaminan penempatan tenaga kerja.

3) Sosial

Pembangunan bidang sosial diarahkan pada pemantapan sistem pelayanan sosial yang berkualitas dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial secara umum dengan sosialisasi pelibatan masyarakat dan dunia usaha.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan sosial tersebut, antara lain dengan :

- a) Pemantapan sarana, prasarana, dan SDM pelayanan sosial.

- b) Pemantapan kebijakan pelayanan sosial.
- c) Peningkatan kualitas pendataan dan pemetaan masalah-masalah kesejahteraan sosial.
- d) Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang bersifat darurat dan non darurat dengan sosialisasi pelibatan masyarakat dan dunia usaha.

Bidang Keagamaan

Di bidang keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan merevitalisasi dan mengevaluasi peran dan fungsi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara, agar penyelenggaraan kehidupan bernegara dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Pembangunan bidang keagamaan di Kota Cimahi memprioritaskan kepada peningkatan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan :

- 1) Merevitalisasi dan mengevaluasi peran dan fungsi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
- 2) Fasilitasi kepada lembaga-lembaga sosial dan pendidikan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan sosial.
- 3) Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara, agar penyelenggaraan kehidupan bernegara dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah. Sedangkan pembangunan pemuda diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain.

Pada tahap ini dukungan akses pada kawasan Contong – Padasuka – Sangkuriang diharapkan akan semakin meningkat sehingga kawasan tersebut menjadi pusat sarana dan prasarana Olahraga yang memiliki menjadi daya tarik tinggi bagi berbagai aktivitas Olahraga berskala regional ataupun nasional.

Bidang Kebudayaan

Fokus perhatian bidang kebudayaan pada RPJM ke 3 adalah menumbuhkembangkan budaya lokal Kota Cimahi khususnya dan budaya Jawa Barat umumnya. Upaya untuk mewujudkan pengembangan budaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal serta Jawa Barat yang mempunyai nilai tambah sehingga dapat dijadikan sebagai jati diri dan karakter masyarakat Kota Cimahi yang khas sebagai bagian dari Jawa Barat pada umumnya. Kelengkapan sarana kebudayaan perlu diperhatikan seperti Gedung Kesenian maupun bangunan-bangunan cagar budaya sejalan dengan pembinaan lembaga-lembaga kesenian dan budaya lokal. Perhatian khusus juga ditujukan untuk memelihara budaya setempat dengan menyelenggarakan kegiatan budaya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan melalui peningkatan peran serta perempuan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Bidang IPTEK diarahkan pada peningkatan industri kreatif dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah,

pengembangan SDM dan sarana prasarana IPTEK. Perhatian khusus pemanfaatan IPTEK pada inovasi-inovasi baru yang tumbuh di masyarakat untuk mengembangkan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan dalam upaya membangun ekonomi kota yang kuat. Dengan menguasai rantai produksi, distribusi dan pelayanan akan tercipta daya saing daerah yang unggul. Beberapa upaya kreatif seperti di bidang pembuatan suku cadang kendaraan bermotor, produk orthopedi, produk makanan ringan, animasi dan film, serta nilai tambah dari adanya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi BITC harus didorong untuk meningkatkan keahlian, kompetensi, dan kesiapan kalangan muda dalam memasuki pasar kerja.

Bidang Politik

Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi, kemitraan dan partisipasi, pembangunan budaya politik dan mutu kehidupan berpolitik yang menjunjung yang tinggi nilai-nilai demokrasi, pengembangan partisipasi aktif masyarakat yang kritis dan konstruktif sehingga dapat mendukung keberlanjutan kemajuan sistem demokrasi, serta peningkatan partisipasi politik perempuan melalui pembangunan lembaga-lembaga politik yang menumbuhkembangkan kesetaraan gender.

Bidang Hukum dan HAM

Pembangunan Bidang Hukum diarahkan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada tahap ini pula selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juga dilakukan pula perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban pada RPJM Daerah tahap ke-3 ini dilakukan dengan upaya pemantapan kondisi ketertiban dan keamanan melalui peningkatan sinergitas penanganan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan bencana antar institusi secara efektif, penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berbasiskan pada peningkatan partisipasi

masyarakat, serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.

Bidang Aparatur

Pembangunan bidang aparatur pada tahap ini dititik beratkan pada pengembangan sumber daya aparatur yang handal dan profesional , serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi yang didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi informasi, melalui:

- 1) Penyempurnaan Sistem Informasi yang saling berintegrasi dengan berbagai sistem informasi lainnya
- 2) Peningkatan sumber daya aparatur yang handal , profesional serta kompeten dalam memanfaatkan teknologi informasi
- 3) Peningkatan etika birokrat yang menjunjung tinggi budaya organisasi
- 4) Pendayagunaan dan pengembangan karier aparatur sesuai dengan kompetensi
- 5) Pengembangan dan pembentukan kebijakan-kebijakan bidang aparatur yang berpihak pada publik.

Bidang Keuangan Daerah

Pembangunan pada bidang keuangan daerah dilakukan dengan melanjutkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan tahapan sebelumnya serta diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan, kekayaan dan asset daerah untuk lebih diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah, diantaranya melalui :

- 1) Restrukturisasi peraturan daerah;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi;
- 3) Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil;
- 4) optimalisasi pengelolaan belanja daerah terutama di tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
- 5) Peningkatan pendayagunaan aset-aset daerah melalui BUMD;
- 6) Upaya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah;
- 7) Menjaga kesinambungan fiskal daerah; serta
- 8) Mengintensifkan kerjasama antar daerah dan luar negeri sebagai upaya meningkatkan investasi di Kota Cimahi.

Bidang Industri dan Perdagangan

Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, Pengembangan Industri kreatif, Pengembangan Industri IT, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.

Bidang Pertanian

Pada bidang pertanian diarahkan pada pemantapan mutu melalui pertanian organik dan bibit unggul, pengembangan pertanian terpadu. pembangunan peternakan selain diarahkan kepada pengembangan peternakan melalui pemanfaatan teknologi peternakan, juga diarahkan kepada budidaya ternak. Strategi pengembangan bisnis perikanan pada tahap ketiga diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan produk perikanan, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan teknologi perikanan, pengembangan jejaring usaha perikanan.

Bidang Kepariwisata

Pengembangan pariwisata diarahkan pada penciptaan destinasi wisata, agar setiap wilayah untuk terus menggali potensi sumber daya wisata agar berdaya jual. Upaya perlu dilakukan untuk mendorong terwujudnya kawasan strategis sosial-budaya Cireundeu-Ciseupan-Padasuka-Sangkuriang sebagai kekuatan integrasi budaya kuliner-rekreasi dan olah raga. Perhatian khusus bagi penyediaan prasarana jalan untuk memudahkan akses ke pusat rekreasi air, olah raga menembak, olah raga balap sepeda serta olah raga balap motor (lapangan Brigif) dan olah raga sepak bola. Kelengkapan sarana seperti ini tentulah sangat unik dan dapat menjadi destinasi wisata di masa depan. Selain itu perlu dikembangkan destinasi wisata jogging track di Cipageran-Citeureup hingga Cibabat, dengan nodal kegiatan di Sungai Cimahi sebagai pusat rekreasi yang terintegrasi.

Bidang KUMKM

Pengembangan KUMKM diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang melilitnya antara lain dalam pengembangan produk dan pemasarannya, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta kualitas kinerja yang rendah pula. Untuk itu pengembangan KUMKM diarahkan pada

meningkatnya kemampuan technopreneurship KUMKM, meningkatnya jumlah dan kapasitas lembaga penyedia jasa pengembangan dan pembiayaan usaha, berkembangnya jaringan usaha berbasis kemitraan, berkembangnya lembaga pendukung usaha yang kompeten, berfungsinya budaya usaha dan kompetensi wirausaha didukung oleh kemampuan teknis dan manajemen sehingga dapat berdaya tahan. Perhatian khusus perlu dilakukan dalam mengembangkan praktek berkoperasi yang sesuai dengan prinsip dan azas koperasi, meningkatnya peran koperasi dalam memfasilitasi kesejahteraan anggotanya.

Bidang Investasi

Investasi memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi karena menciptakan akumulasi modal yang dapat meningkatkan produktivitas seiring dengan investasi yang tinggi. Menyadari masih belum mampunya dipenuhi oleh penanaman modal dalam negeri, usaha untuk menarik investasi juga menarik investasi asing melalui perbaikan iklim investasi secara terus menerus. Dukungan terhadap investasi daerah pada tahap ini diupayakan pada mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah dengan swasta.

Bidang Infrastruktur Kota (Sarana dan prasarana)

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan pada pemantapan pembangunan pranata infrastruktur kota. Pengembangan infrastruktur kota diarahkan guna melanjutkan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur kota yang strategis sebagaimana telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahap kedua, juga diarahkan pada pemantapan kualitas pelayanan dan percepatan pencapaian keseimbangan pelayanan antara kapasitas dan beban pelayanan.

Pemantapan kualitas pelayanan dalam bidang transportasi diarahkan pada pengembangan konsep sistem transportasi massal (*Mass Transport*) berbasis busline dan *cable car* atau monorel bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, perencanaan dan pengembangan terminal tipe B serta penataan sarana angkutan umum, terutama AKAP, dan kendaraan pribadi. Selain itu indikator lainnya adalah mulai mantapnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kota terutama transportasi darat serta mulai terbangunnya jalur lingkaran utara/selatan sebagai pemecah beban jalan nasional.

Pengembangan infrastruktur transportasi jalan kereta api ditandai dengan semakin mantapnya ketersediaan prana, melalui konsep revitalisasi jalur eksisting, penataan sebagai dukungan bagi pembangunan jalur ganda dan penataan lanjutan kawasan sekitar stasiun kereta api dan sepanjang jalur sempadan kereta api yang melintasi Kota Cimahi serta pembangunan flyover diatas perlintasan sebidang terutama di 2 (dua) titik perlintasan, yaitu: Kebonsari dan Padasuka untuk membuka dan memperlancar akses pergerakan utara-selatan.

Pada aspek pembangunan infrastruktur sumber daya air, guna memantapkan dan meningkatkan fungsi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, dilakukan melalui lanjutan penyelesaian pembangunan embung (15 buah: 1 buah per kelurahan eksisting) sebagai pengendalian bencana banjir dan kekeringan, peningkatan layanan air baku melalui pengembangan konsep kelembagaan pengelola air baku dan air minum bagi warga, pengembangan berbasis lembaga eksisting maupun lembaga alternatif dan termasuk pengembangan sistem dan metoda penyediaan air baku dan air bersih. Sementara dalam bidang air minum, dilakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) skala kota dan regional.

Dalam bidang persampahan, dilakukan penyiapan sarana dan prasarana persampahan dengan pendekatan teknologi non sanitary landfill, serta mensinergikan dengan sistem pengelolaan sampah regional (provinsi).

Pada tahap ini pengembangan infrastruktur kota lainnya, kelistrikan dan telekomunikasi yang sudah mulai dikembangkan pada tahap kedua, diarahkan pengembangannya lebih lanjut untuk memantapkan dan meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi regional berbasiskan teknologi masadepan. Kelistrikan diarahkan untuk mengembangkan dan menerapkan penggunaan energi alternatif masyarakat berbasiskan teknologi terbarukan (*renewable*) dan bio energi. Begitu juga sistem pengolahan air limbah diarahkan pada sistem pengelolaan terpadu dan sinergi. Percepatan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman diarahkan pencapaian program perumahan dan permukiman vertikal berbasiskan rusun sewa dan milik melalui pendekatan penataan kawasan padat dan kumuh serta lahan-lahan eks industri yang idle.

Infrastruktur perkotaan yang berpihak pada pejalan kaki dan berwawasan lingkungan dimantapkan dan dipelihara serta diperluas pengembangannya mencakup kawasan-kawasan perkotaan, permukiman dan non permukiman.

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1) Tata Ruang

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan pada Pemantapan Pola Ruang Seimbang dan Memadai disertai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Mantap.

Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik ke arah perwujudan ruang yang seimbang dan memadai disertai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mantap. Tahap ini antara lain ditandai dengan dilaksanakan dan ditindaklanjutinya Perda tentang Revisi RTRW Kota Cimahi dalam penataan ruang yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, yang lebih rinci. Tahap ini juga ditandai dengan mulai terwujudnya target pencapaian RTH 30% serta terwujudnya preservasi dan konservasi kawasan lindung dan KBU melalui pembangunan berwawasan lingkungan dengan pembatasan dan ketentuan guna mempertahankan fungsi konservasi kawasan. Kawasan budidaya atau kawasan terbangun secara mantap direncanakan berkisar 65-70 %.

Hal tersebut diikuti dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Perwujudan Struktur Ruang Kota ditandai dengan mulai berfungsi dan berkembangnya kawasan-kawasan strategis kota yang prospektif, kawasan strategis kota (KSK) Baros, KSK Cireundeu – Ciseupan - Contong – Sangkuriang, berfungsinya sistem dan fungsi pelayanan Pusat dan Sub Pusat serta Pusat Lingkungan, untuk mendukung kegiatan masyarakat kota yang memiliki nilai ekonomi dan kreatif.

2) Lingkungan Hidup

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan pada pemantapan penataan pranata lingkungan hidup. Penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahap ini semakin mantap, sejalan dengan semakin meningkatnya manajemen dan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan memperluas penerapan pola 3R, meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi, tercapainya RTH sebesar 23% dari luas Cimahi, serta meningkatnya penegakan dan kesadaran hukum lingkungan serta semakin digalakkannya penerapan nilai-nilai lingkungan hidup pada setiap aspek kegiatan kota.

5.2.4 RPJM Daerah Keempat (2017 – 2022)

RPJM Daerah keempat ditujukan untuk *pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.*

Pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan keempat ini adalah :

Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan pada tahap ini ditandai meningkatnya dan meratanya aksesibilitas pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan yang disertai semakin efektif dan efisiennya manajemen pelayanan pendidikan.

Upaya yang dilakukan pada tahap ini antara lain :

- 1) penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional
- 2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas
- 3) peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat
- 4) peningkatan ketaatan aparat pada peraturan perundang-undangan.

Bidang Kesehatan

Pada tahap ini diprioritaskan pada perwujudan pelayanan kesehatan terpadu yang mantap dengan berbasis kemandirian dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan pada terwujudnya pelayanan kesehatan terpadu yang mantap. Selain itu pada tahapan ini ditekankan pada pemantapan peran serta dan partisipasi masyarakat dan penguatan institusi

dalam pelayanan kesehatan, terwujudnya budaya PHBS, serta terlaksananya JPKM yang mencakup hingga pelayanan spesialisik bagi masyarakat Cimahi.

Bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial

1) Kependudukan

Pembangunan bidang kependudukan pada tahapan ini diarahkan pada Peningkatan kualitas data sistem administrasi kependudukan, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan upaya pemerataan penyebaran penduduk.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan sosial tersebut, antara lain dengan :

- a) Peningkatan kualitas data sistem administrasi kependudukan
- b) Peningkatan program keluarga berencana yang berkualitas dan komprehensif
- c) Peningkatan kebijakan pembatasan penduduk melalui pengetatan dokumentasi kependudukan dan catatan sipil dengan penekanan pada pengawasan dan penindakan.
- d) Peningkatan program transmigrasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, serta mandiri.

2) Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Cimahi diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang berbasis peluang dan penempatan kerja dengan titik berat pada potensi lokal dan kewirausahaan, serta pengembangan pola hubungan industrial yang baik.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan tersebut, antara lain dengan :

- a) Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dengan titik berat pada potensi lokal serta kewirausahaan
- b) Peningkatan pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja, potensi lokal dan kewirausahaan dengan jaminan penempatan kerja dan kesempatan berusaha
- c) Pengembangan pola hubungan industrial yang baik antara pekerja dengan dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja

- d) Peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk penjaminan penempatan tenaga kerja dan rintisan pembinaan kewirausahaan oleh perusahaan
- e) Penumbuhkembangan budaya kewirausahaan dalam aspek kehidupan masyarakat.

3) Sosial

Pembangunan bidang sosial diarahkan pada peningkatan sistem pelayanan sosial yang berkualitas dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial secara umum dengan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan sosial tersebut, antara lain dengan :

- a) Peningkatan sarana, prasarana, dan SDM pelayanan sosial.
- b) Pengembangan kebijakan pelayanan sosial.
- c) Peningkatan kualitas pendataan dan pemetaan masalah-masalah kesejahteraan sosial.
- d) Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang bersifat darurat dan non darurat dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Bidang Keagamaan

Pembangunan bidang keagamaan di Kota Cimahi diprioritaskan pada peningkatan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan :

- Meningkatkan fungsi dan peran FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
- Fasilitasi kepada lembaga-lembaga sosial dan pendidikan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan sosial.
- Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda melalui peningkatan karakter, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, revitalisasi gerakan pramuka, pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, dan peningkatan penghargaan kepemudaan. Sementara dalam pengembangan keolahragaan masyarakat Kota Cimahi yang mampu berprestasi dan dapat mencetak atlet berprestasi dalam PORDA Jawa Barat, penyelenggaraan olah raga pendidikan dan prestasi, dan penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan. Perhatian khusus ditujukan bagi perbaikan sarana olah raga daerah serta pendayagunaan sarana olah raga yang dikuasai oleh TNI guna mendukung kesehatan masyarakat dengan berolah raga.

Bidang Kebudayaan

Pada RPJM ke 4 ini pembangunan kebudayaan di Kota Cimahi diprioritaskan pada penguatan dan eksistensi nilai dan budaya khas lokal Cimahi. Upaya yang dilakukan adalah mengaktualisasikan nilai dan budaya lokal tersebut dalam berbagai event sehingga dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi pariwisata di Kota Cimahi. Selain yang telah diarahkan pada RPJM sebelumnya perlu pula dikembangkan pemberdayaan masyarakat adat, seperti Cireundeu dan padepokan-padepokan yang berkembang, pengembangan promosi kebudayaan, pemberian insentif kepada para pelaku seni.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Perhatian perlu diberikan pada peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak, penyediaan data dan informasi perlindungan anak, serta peningkatan koordinasi lintas bidang untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Dalam visi CIMAHI KOTA CERDAS yang dicapai melalui 5 misi dan misi pertama menyatakan ilmu pengetahuan dan daya saing. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada membangun daya saing daerah dengan membangun SDM yang berkualitas, memperkuat perekonomian kota (daerah), meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membangun sarana dan prasarana yang maju dan memadai. Untuk itu perlu disusun Sistem Inovasi Daerah (kota) yang akan menjelaskan arah pembangunan IPTEK yang meliputi penataan kelembagaan iptek, penguatan sumberdaya iptek, dan penataan jaringan iptek guna mendukung daya saing daerah.

Bidang Politik

Bidang Politik diarahkan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, peningkatan sarana prasarana publik sebagai fasilitasi untuk menyampaikan aspirasi publik serta peningkatan peran dan fungsi komunikasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi komunikasi publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi sebagai fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat.

Bidang Hukum dan HAM

Pada tahap ini pembangunan bidang hukum diarahkan pada pelaksanaan, penegakan dan harmonisasi produk hukum yang semakin mantap melalui Pada Bidang Hukum diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat, perwujudan harmonisasi produk hukum, pemantapan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban diarahkan pada perwujudan lingkungan yang aman, tentram dan damai yang didukung dengan kewaspadaan masyarakat dan upaya preventif masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana dan penyakit masyarakat.

Bidang Aparatur

Pada tahap RPJMD ke 4 , pembangunan bidang aparatur difokuskan pada Peningkatan kualitas aparatur yang handal, profesional dan bebas dari KKN, serta pemantapan pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi melalui :

- 1) Peningkatan kualitas dan relevansi kompetensi aparatur yang handal dan profesional serta bebas dari KKN
- 2) Penguatan konsistensi pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik
- 3) Penyempurnaan regulasi pelaksanaan sistem informasi
- 4) Pendayagunaan dan pengembangan karier aparatur sesuai dengan kompetensi yang terarah dan berbasis model analisis yang akuntabel
- 5) Pengembangan dan pembentukan kebijakan-kebijakan bidang aparatur yang berpihak pada publik.

Bidang Keuangan Daerah

Pembangunan Bidang Keuangan Daerah akan terus diarahkan pada pemantapan upaya-upaya yang telah dilakukan pada RPJM sebelumnya, Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah, penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah, peningkatan peluang bagi BUMD untuk mengembangkan usaha dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah, menguatnya peranan sektor swasta dan masyarakat sehingga semakin signifikan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bidang Industri dan Perdagangan

Pada bidang industri dan perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui Penguatan potensi industri dan industri kreatif , Penguatan Industri IT, penciptaan kesempatan kerja dan pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri, perluasan kawasan perdagangan ekspor serta perluasan jaringan perdagangan luar negeri.

Bidang Pertanian

Pada tahap ini, pengembangan pertanian Kota Cimahi harus sudah dapat menguasai jaringan bisnis yang luas. Untuk peternakan pada tahap ini akan diarahkan kepada pemasaran budidaya peternakan dan produk-produk hasil peternakan dengan kualitas yang baik. Strategi pengembangan bisnis perikanan pada tahap keempat diarahkan pada pengembangan perikanan komersial, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.

Bidang Kepariwisata

Pengembangan pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi wisata serta daya tarik wisata lainnya, agar setiap wilayah untuk terus mengembangkan atraksi wisata. Upaya perlu dilakukan untuk mengembangkan lebih lanjut kawasan strategis sosial-budaya Cireunde-Ciseupan-Padasuka-Sangkuriang sebagai kekuatan integrasi budaya kuliner-rekreasi dan olah raga. Perhatian khusus bagi penyediaan prasarana jalan untuk memudahkan akses ke pusat rekreasi air, olah raga menembak, olah raga balap sepeda serta olah raga balap motor (lapangan Brigif) dan olah raga sepak bola. Kelengkapan sarana seperti ini tentulah sangat unik dan dapat menjadi destinasi wisata di masa depan. Selain itu perlu dikembangkan destinasi wisata jogging track di Cipageran-Citeureup hingga Cibabat, dengan nodal kegiatan di Sungai Cimahi sebagai pusat rekreasi yang terintegrasi.

Bidang KUMKM

Pengembangan KUMKM diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang melilitnya antara lain dalam pengembangan produk dan pemasarannya, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta kualitas kinerja yang rendah pula. Untuk itu pengembangan KUMKM diarahkan pada meningkatnya kemampuan technopreneurship KUMKM, pembinaan wirausaha KUMKM, meningkatnya jumlah dan kapasitas dan cakupan lembaga penyedia jasa pengembangan dan pembiayaan usaha, berkembangnya jaringan usaha berbasis kemitraan, berkembangnya lembaga pendukung usaha yang kompeten, berfungsinya budaya usaha dan kompetensi wirausaha didukung oleh kemampuan teknis dan manajemen sehingga dapat berdaya tahan. Perhatian khusus perlu dilakukan dalam mengembangkan praktek berkoperasi yang sesuai dengan prinsip dan azas koperasi, meningkatnya peran koperasi dalam memfasilitasi kesejahteraan anggotanya.

Bidang Investasi

Investasi memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi karena menciptakan akumulasi modal yang dapat meningkatkan produktivitas seiring dengan investasi yang tinggi. Menyadari masih belum mampunya dipenuhi oleh penanaman modal dalam negeri, usaha untuk menarik investasi juga menarik investasi asing melalui perbaikan iklim investasi secara terus menerus. Dukungan terhadap investasi daerah pada tahap ini diupayakan pada mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta.

Bidang Infrastruktur Kota

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan pada Pencapaian Pranata Infrastruktur Kota. Pada tahap ini, pengembangan infrastruktur kota, diarahkan pada pencapaian kemantapan pengelolaan infrastruktur kota strategis yang ditandai oleh tercapainya keseimbangan antara kapasitas infrastruktur kota dengan kebutuhan serta pencapaian tingkat pelayanan yang optimum sehingga menjadi faktor pendukung bagi pencapaian masyarakat Cimahi yang maju, mandiri bagi keadilan masyarakatnya.

Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan tercapainya kemantapan pengelolaan sistem transportasi massal (*Mass Transport*) yang berbasis *busline* dan *cable car* atau monorel. Tercapainya sistem pergerakan angkutan umum dan juga pribadi yg terintegrasi dan efisien dengan sarana dan prasarana (jalan lingkar, jalan kota terminal, shelter, dll) yang mantap dan memadai serta terdukungnya fungsi-fungsi pergerakan dan angkutan didalam dan antar kawasan-kawasan strategis kota yang menjadi penggerak ekonomi kota.

Pengembangan infrastruktur transportasi jalan kereta api ditandai dengan semakin mantapnya pengelolaan jalur kereta api Bandung – Sukabumi – Bogor serta jalur Padalarang – Cicalengka yang melalui Kota Cimahi serta sistem transportasi berbasis *bussline* dan monorel. Tercapainya kemantapan kondisi sempadan rel kereta api dan perlintasan *flyover* bagi pencapaian tingkat kenyamanan dan keselamatan.

Pada tahap ke empat ini, skenario rencana pembangunan sumber daya air, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air mulai tercapai dengan indikator pencapaian kondisi saluran drainase kota dan saluran lain yang mantap tercapainya optimalisasi fungsi

embung-embung dan mantap serta handalnya fungsi pengendalian banjir perkotaan.

Sistem penyediaan air baku dan air minum kota pada tahap ini mencapai target ketersediaan yang memadai sebagaimana dicanangkan dalam millenium goal untuk air minum demikian juga untuk sanitasi perkotaan.

Sistem pengelolaan persampahan pada tahap ini mencapai kondisi mantap dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi alternatif selain *sanitary landfill*, antara lain dengan teknologi berprinsip *zero waste to energy* dan pemanfaatan skema perdagangan karbon internasional.

Pengembangan infrastruktur kelistrikan ditandai dengan penggunaan yang seimbang antara sumber energi konservatif dan sumber energi alternatif seperti solar cell listrik dari sampah. Infrastruktur telekomunikasi pada tahap ini diarahkan untuk dapat mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan yang mantap, dengan indikasi peningkatan signifikan persentase masyarakat kota yang memahami dan menggunakan teknologi informasi dan internet. Cakupan pelayanan jaringan telepon dan *broadband* skala regional dengan pusat di BITc sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan Internet kelurahan melalui program Desa Pinter Jawa Barat, peningkatan ketersediaan air minum, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana sewa atau milik di kawasan padat dan di lahan kosong eks industri.

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1) Tata Ruang

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan pada pencapaian pola ruang seimbang dan memadai disertai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mantap.

Penyelenggaraan penataan ruang semakin mantap yang ditandai dengan tercapainya perwujudan ruang kota yang efisien, efektif dan mampu mendukung kegiatan kota sebagai tempat untuk hidup dan bekerja serta beristirahat. Tingkat daya dukung dan daya tampung lingkungan yg semakin memadai dan mantap dengan pencapaian target RTH publik 20% sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Penataan Ruang.

Perwujudan ruang yang seimbang antar fungsi-fungsi guna lahan yang ada menjadi indikasi tercapainya tata ruang Kota Cimahi yang baik. Hubungan fungsional sistematis dan hirarki antar pusat-pusat pelayanan kota yang baik mampu mendukung kinerja kota. Kawasan-kawasan strategis

berkembang dan berfungsi secara optimum menjadikan generator perkembangan ekonomi kota baru. Kawasan-kawasan strategis lama terrevitaliasi dengan baik sehingga secara mantap dapat menghidupi masyarakat kota. Perwujudan pemekaran administratif baik internal maupun kemungkinan pemekaran eksternal (menambah lahan administratif kota) mampu meningkatkan tingkat pelayanan secara optimum. Fungsi konservasi kawasan lindung dan KBU menjadi tulang punggung pencapaian daya tampung lingkungan yang mantap.

Hal tersebut di atas diikuti dengan pelaksanaan koordinasi penataan ruang dalam konteks perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, serta koordinasi dengan provinsi dengan kabupaten/kota yang berbatasan

2) Lingkungan Hidup

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan pada pencapaian pranata lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup sudah mantap yang ditandai dengan semakin baiknya manajemen dan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di setiap aspek kegiatan kota. Daya dukung lingkungan Kota Cimahi yang mantap mampu berkontribusi maksimum dan mendukung pada upaya pencapaian Propinsi Jawa Barat sebagai *eco-province*. Pada tahap ini juga ditandai dengan sistem informasi lingkungan hidup dan sumber data lainnya yang handal, serta sarana dan prasarana lingkungan yang lengkap dan memadai.

Penggunaan teknologi alternatif yang ramah lingkungan dalam pengelolaan aspek kegiatan perkotaan yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan juga menandai arahan pengembangan pada tahap ke empat ini. Ruang Terbuka Hijau Publik hampir mencapai 20% sebagaimana amanat UU penataan ruang juga dicapai pada tahap ini.

5.2.5 RPJM Daerah Kelima (2022 – 2025)

RPJM Daerah kelima ditujukan untuk *pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat madani Cimahi, dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.*

Pada tahap ini upaya pemeliharaan keunggulan Kota Cimahi dilakukan di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi memiliki kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat. Indeks Daya Beli pada akhir kurun waktu RPJP Daerah 2005-2025 diharapkan meningkat dan dapat memberikan kontribusi terhadap target daya beli Jawa Barat.

Disisi lain, dilakukan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain dengan dititik beratkan pada upaya pencapaian sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi iptek.

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan kelima ini adalah :

Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan yang berkualitas, pada tahap ini dititik beratkan pada pelaksanaan manajemen pendidikan yang sudah maju dengan ditandai dengan peningkatan kualitas pendidikan secara kompetitif dan terpadu.

Upaya yang dilakukan pada tahap ini antara lain :

- 1) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing lulusan pendidikan
- 2) peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas
- 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Bidang Kesehatan

Pada tahap ini diprioritaskan pada mantapnya budaya PHBS serta terciptanya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan, serta terwujudnya pelayanan kesehatan terpadu yang berkualitas dan merata.

Pembangunan Bidang kesehatan pada tahap ini lebih diarahkan pada kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan mantapnya sistem pembiayaan kesehatan yang dapat mencakup seluruh pelayanan dasar dan spesialisik yang berkualitas dan terjangkau, secara kewilayahan dan ekonomi serta mantapnya budaya PHBS di masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cimahi.

Bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial

1) Kependudukan

Pada periode kelima RPJP Daerah 2005 – 2025 ini, pembangunan kependudukan di Kota Cimahi diarahkan pada upaya peningkatan sinergitas sistem administrasi kependudukan dengan pendataan pembangunan, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan upaya pemerataan penyebaran penduduk.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan kependudukan tersebut, dilakukan langkah dan upaya sebagai berikut :

- a) Peningkatan penggunaan data pada sistem administrasi kependudukan sebagai dasar acuan pembangunan
- b) Pengembangan program keluarga berencana yang berkualitas dan komprehensif
- c) Pengembangan kebijakan pembatasan penduduk melalui inovasi pendekatan legal formal dengan penekanan pada pengawasan dan penindakan
- d) Penumbuhkembangan kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan program transmigrasi.

2) Ketenagakerjaan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Cimahi diprioritaskan pada pembudayaan kewirausahaan melalui potensi lokal dengan tetap memperhatikan kompetensi dan daya saing tenaga kerja untuk peluang kerja yang tumbuh, serta pembudayaan inovasi pola hubungan industrial yang baik.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan tersebut, dilakukan langkah dan upaya sebagai berikut :

- a) Pengembangan sarana, prasarana dan kurikulum pendukung budaya kewirausahaan melalui potensi lokal dengan tetap memperhatikan peluang kerja yang tumbuh.
- b) Peningkatan pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja, potensi lokal dan kewirausahaan dengan jaminan penempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- c) Pembudayaan dan pengembangan inovasi pola hubungan industrial yang baik antara pekerja dengan dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

- d) Peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk penjaminan penempatan tenaga kerja dan pembinaan kewirausahaan oleh perusahaan
- e) Pemantapan budaya kewirausahaan dalam aspek kehidupan masyarakat.

3) Sosial

Pembangunan bidang sosial diarahkan pada pengembangan sistem pelayanan sosial yang berkualitas dan pembudayaan peran serta penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial secara aktif oleh masyarakat dan dunia usaha.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan tersebut, dilakukan langkah dan upaya sebagai berikut :

- a) Peningkatan sarana, prasarana, dan SDM pelayanan sosial.
- b) Pengembangan kebijakan pelayanan sosial.
- c) Peningkatan kualitas pendataan dan pemetaan masalah-masalah kesejahteraan sosial
- d) Pembudayaan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial secara aktif oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Bidang Keagamaan

Pembangunan bidang keagamaan di Kota Cimahi diprioritaskan pada upaya peningkatan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam setiap aspek kehidupan.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, dilakukan langkah dan upaya sebagai berikut :

- Mengoptimalkan fungsi dan peran FKUB sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama.
- Fasilitasi kepada lembaga-lembaga sosial dan pendidikan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan sosial.
- Memantapkan sikap hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan.

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda melalui peningkatan karakter, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, revitalisasi gerakan pramuka, pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, dan peningkatan penghargaan kepemudaan. Sementara dalam pengembangan keolahragaan masyarakat Kota Cimahi yang mampu berprestasi dan dapat mencetak atlet berprestasi dalam PORDA Jawa Barat, penyelenggaraan olah raga pendidikan dan prestasi, dan penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan. Perhatian khusus ditujukan bagi perbaikan sarana olah raga daerah serta pendayagunaan sarana olah raga yang dikuasai oleh TNI guna mendukung kesehatan masyarakat dengan berolah raga.

Bidang Kebudayaan

Pada RPJM ke 5 ini pembangunan kebudayaan di Kota Cimahi diprioritaskan pada penguatan dan eksistensi nilai dan budaya khas lokal Cimahi. Upaya yang dilakukan adalah mengaktualisasikan nilai dan budaya lokal tersebut dalam berbagai event sehingga dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi pariwisata di Kota Cimahi. Selain yang telah diarahkan pada RPJM sebelumnya perlu pula dikembangkan pemberdayaan masyarakat adat, seperti Cireundeu dan padepokan-padepokan yang berkembang, pengembangan promosi kebudayaan, pemberian insentif kepada para pelaku seni.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Perhatian perlu diberikan pada peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak, penyediaan data dan informasi perlindungan anak, serta peningkatan koordinasi lintas bidang untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Dalam visi CIMAHI KOTA CERDAS yang dicapai melalui 5 misi dan misi pertama menyatakan ilmu pengetahuan dan daya saing. Pembangunan bidang

IPTEK diarahkan pada membangun daya saing daerah dengan membangun SDM yang berkualitas, memperkuat perekonomian kota (daerah), meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membangun sarana dan prasarana yang maju dan memadai. Pada periode akhir RPJP Kota Cimahi 2005-2025 Sistem Inovasi Daerah (kota) telah terbentuk sehingga arah pembangunan IPTEK sudah lebih jelas yang meliputi penataan kelembagaan iptek, penguatan sumberdaya iptek, dan penataan jaringan iptek guna mendukung mempertahankan daya saing daerah.

Bidang Politik

Pembangunan bidang politik diarahkan pada peningkatan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjunjung tinggi budaya demokrasi, dan pengembangan penataan hubungan antar lembaga demokrasi local menuju kemitraan yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (*e-governance*).

Bidang Hukum dan HAM

Pembangunan Bidang Hukum diarahkan pada perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat serta memantapkan budaya hukum.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pada tahap RPJM Daerah ke-5 ini diarahkan pada perwujudan tumbuhnya kesadaran bina lingkungan yang semakin tertanam dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban kota Cimahi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Bidang Aparatur

Pada tahap Akhir RPJP pembangunan bidang aparatur diarahkan pada terwujudnya pelaksanaan *e-government* di semua aspek pelayanan sehingga dapat berperan aktif dalam perwujudan *e-governance*. Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan melalui

- 1) Pemantapan dan berfungsinya sistem administrasi dan manajemen kepegawaian yang akuntabel dan transparan

- 2) Terbentuknya aparatur pemerintahan yang profesional, beretika dan sejahtera
- 3) Terwujudnya sinergitas antara birokrasi, swasta dan masyarakat secara dinamis dan konstruktif
- 4) Pelaksanaan pemberian pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *e-government* di semua aspek pelayanan sehingga dapat berperan aktif dalam perwujudan *e-governance*.

Bidang Keuangan Daerah

Pembangunan Bidang Keuangan Daerah akan terus diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Peranan sektor swasta diharapkan semakin besar dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bidang Industri dan Perdagangan

Pada tahapan ini bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penguatan jaringan antar industri, penguatan industri kreatif dan Penguatan Industri IT melalui pengembangan SDM yang berdaya saing, Adapun pada sektor perdagangan, diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.

Bidang Pertanian

Pembangunan bidang pertanian pada tahap ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan Jawa Barat, selain itu dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan Jawa Barat.

Untuk peternakan lebih diarahkan kepada pengembangan bisnis peternakan, agar dapat bersaing di pasar regional maupun nasional dengan kualitas yang baik.

Strategi pengembangan bisnis perikanan pada tahap kelima masih diarahkan pada pengembangan perikanan komersial, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.

Bidang Kepariwisata

Pengembangan pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi wisata, agar setiap wilayah untuk terus mengembangkan atraksi wisata. Upaya

perlu dilakukan untuk mengembangkan lebih lanjut kawasan strategis sosial-budaya Cireundeu-Ciseupan-Padasuka-Sangkuriang sebagai kekuatan integrasi budaya kuliner-rekreasi dan olah raga. Perhatian khusus bagi penyediaan prasarana jalan untuk memudahkan akses ke pusat rekreasi air, olah raga menembak, olah raga balap sepeda serta olah raga balap motor (lapangan Brigif) dan olah raga sepak bola. Kelengkapan sarana seperti ini tentulah sangat unik dan dapat menjadi destinasi wisata di masa depan. Selain itu perlu dikembangkan destinasi wisata jogging track di Cipageran-Citeureup hingga Cibabat, dengan nodal kegiatan di Sungai Cimahi sebagai pusat rekreasi yang terintegrasi.

Bidang KUMKM

Pengembangan KUMKM diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang melilitnya antara lain dalam pengembangan produk dan pemasarannya, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta kualitas kinerja yang rendah pula. Untuk itu pengembangan KUMKM diarahkan pada meningkatnya kemampuan technopreneurship KUMKM, pembinaan wirausaha KUKM, meningkatnya jumlah dan kapasitas dan cakupan lembaga penyedia jasa pengembangan dan pembiayaan usaha, berkembangnya jaringan usaha berbasis kemitraan, berkembangnya lembaga pendukung usaha yang kompeten, berfungsinya budaya usaha dan kompetensi wirausaha didukung oleh kemampuan teknis dan manajemen sehingga dapat berdaya tahan. Perhatian khusus perlu dilakukan dalam mengembangkan praktek berkoperasi yang sesuai dengan prinsip dan azas koperasi, meningkatnya peran koperasi dalam memfasilitasi kesejahteraan anggotanya.

Bidang Investasi

Investasi memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi karena menciptakan akumulasi modal yang dapat meningkatkan produktivitas seiring dengan investasi yang tinggi. Menyadari masih belum mampunya dipenuhi oleh penanaman modal dalam negeri, usaha untuk menarik investasi juga menarik investasi asing melalui perbaikan iklim investasi secara terus menerus. Dukungan terhadap investasi daerah pada tahap ini diupayakan pada mempertahankan keberadaan investasi yang ada diperkirakan telah tercapai investasi baru di kawasan strategis ekonomi Baros sebagai penggerak ekonomi kota yang berskala regional. Upaya menarik investasi baru diarahkan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi revitalisasi industri, reposisi jenis-jenis industri yang unggul.

Bidang Infrastruktur Wilayah (Sarana dan prasarana)

Pada tahap in pembangunan bidang infrastruktur kota (Sarana dan prasarana) diprioritaskan pada Pemeliharaan Pranata Infrastruktur Kota. Tahap kelima ini merupakan akumulasi dari tahapan-tahapan sebelumnya dimana pembangunan diarahkan guna pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur kota serta mempertahankan kuantitas dan kualitas guna mendukung RPJPD berikutnya dan keberlanjutannya dengan tetap memperhatikan kualitas kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat, sebagai stakeholder pembangunan.

Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan terpelihara serta terjaganya kemantapan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi darat yang handal dan terintegrasi yang dibangun pada tahap-tahap sebelumnya, semakin berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Transport) yang berbasis busline dan cable car atau monorel, pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi jalan kereta api.

Dalam hal pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya mempertahankan dan memelihara kondisi guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, dilakukan melalui semakin mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan embung sebagai pengendalian bencana banjir dan kekeringan, serta peningkatan layanan air baku.

Pengembangan infrastruktur kota lainnya, dilakukan antara lain melalui peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi yang ditandai dengan semakin mantapnya kualitas dan cakupan layanan dan pengelolaan jaringan kelistrikan dan telepon serta broadband skala regional yang berpusat di BITc Baros sekaligus semakin mantapnya dukungan terhadap pelaksanaan Internet kelurahan melalui program Desa Pinter Jawa Barat, peningkatan ketersediaan air minum, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perumahan padat dan lahan-lahan kosong eks industri.

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1) Tata Ruang

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan pada pemeliharaan pola ruang seimbang dan memadai disertai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan.

Pada tahap akhir RPJPD ini, perwujudan tata ruang yang mantap telah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Cimahi yang mandiri dan madani. Seluruh masyarakat kota dapat menikmati pelayanan yang baik

dari pusat-pusat pelayanan dan infrastruktur yang telah terbangun. Arahannya pada tahap akhir ini adalah menjaga dan mempertahankan serta memelihara kesinambungan penataan ruang yang sudah terwujud secara baik dalam rangka menyiapkan target pengembangan kota pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berikutnya. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan secara terkoordinasi secara mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan didukung oleh jaringan infrastruktur data spasial yang mutakhir.

2) Lingkungan Hidup

Pada tahap ini pembangunan diprioritaskan pada pemeliharaan pranata lingkungan hidup.

Pada tahap akhir Rencana Jangka Panjang Daerah ini, bidang lingkungan hidup diarahkan untuk memelihara dan menjaga tingkat kemantapan pengelolaannya. Pencapaian RTH 30% pada tahap ini menjadi salah satu indikasi arahan pengembangan. Semakin terjaganya dan terpeliharanya kemantapan manajemen dan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi, meningkatnya penegakan hukum lingkungan. Semua tingkat kemantapan pengelolaan lingkungan hidup ini diarahkan sebagai landasan kokoh pembangunan kota dan sebagai benchmark pengelolaan lingkungan hidup pada RPJPD berikutnya.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam :

1. Penyusunan Visi, Misi dan program calon kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
2. Penyusunan RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Cimahi;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang, antar waktu, antar tingkatan pemerintahan baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan;
4. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
5. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cimahi dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Kota Cimahi, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cimahi berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cimahi untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;

5. Pemerintah Kota berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cimahi dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cimahi berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cimahi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJP Daerah, Pelaksanaan RPJP Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJP Daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Untuk merealisasikan RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan maka digunakan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :
 - a) Asas kepastian hukum;
 - b) Asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c) Asas kepentingan umum;
 - d) Asas keterbukaan;
 - e) Asas proporsionalitas;
 - f) Asas akuntabilitas;
 - g) Asas efisiensi ;
 - h) Asas efektifitas.

8. Menyusun kesepakatan bersama (*MoU*) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintahan Kota dengan Para Pemangku Kepentingan / Stake Holder;
9. Hasil pelaksanaan pengawasan intern pemerintah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
10. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembanguna Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cimahi.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan Kota Cimahi merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Cimahi 20 tahun ke depan.

RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 merupakan pedoman di dalam penyusunan (a) RTRW Kota Cimahi, (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi dan sekaligus menjadi pedoman bagi calon Walikota dan calon Wakil Walikota dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD, (c) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), (d) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), (e) Renja OPD, serta (f) dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Cimahi .

Keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dalam mewujudkan visi ***Cimahi Kota Cerdas*** perlu didukung oleh:

- 1) Komitmen dari kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kuat dan demokratis;
- 2) Konsistensi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD lima tahunan dan RKPD setiap tahun;
- 3) Keberpihakan kepada masyarakat Kota Cimahi; dan
- 4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Ke depan, lima belas tahun mendatang mulai sekarang, melalui kerja keras, kebersamaan dan kesungguhan segenap komponen masyarakat Kota Cimahi dapat membuktikan bahwa CIMAHI KOTA CERDAS yang menjadi benar-benar cerdas menjadi sebuah kota yang dikenal jauh lebih baik dengan kehidupan warganya yang berkehidupan baik, khusnul khotimah, sejajar dengan kota-kota yang dapat menyejahterakan warganya.

WALIKOTA CIMAHI

ITOC TOCHIJA

CATATAN: